

**POLITIK LUAR NEGERI IRAN PADA PEMERINTAHAN
AHMADINEJAD DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
AMERIKA SERIKAT PERIODE 2005 – 2009**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Politik dan
Hubungan Internasional di Timur Tengah Pada Program Studi Timur
Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

**INDRI HAPSARI
0806450640**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2009**





Program Kajian Timur Tengah Dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Indri Hapsari
NPM : 0806450640
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Politik Luar Negeri Iran Pada Masa Pemerintahan
Ahmadinejad Dalam Hubungannya dengan Amerika
Serikat Periode 2005-2009
Tanggal disetujui : 15 Desember 2009

Pembimbing Tesis

(Achmad Ramzy Tadjoedin)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : Indri Hapsari
NPM : 0806450640
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Politik Luar Negeri Iran Pada Masa Pemerintahan
Ahmadinejad Dalam Hubungannya dengan Amerika
Serikat Periode 2005-2009

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hanief Saha Gafur, M. Si ()
Pembimbing : Achmad Ramzy Tadjoedin ()
Penguji : Zainuddin Djafar, MA, Ph.D ()
Pembaca Ahli : Drs. Hamdan Basyar, M. Si ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Indri Hapsari

NPM : 0806450640

Tanda Tangan :

Tanggal : 16 Desember 2009



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Hapsari

NPM : 0806450640

Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam

Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non – exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Politik Luar Negeri Iran Pada Pemerintahan Ahmadinejad Dalam Hubungannya Dengan Amerika Serikat Periode 2005 – 2009.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Desember 2009

Yang menyatakan

(INDRI HAPSARI)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kasih dan sayang serta segala dzat yang dimilikinya sehingga penulisan tesis ini dapat saya selesaikan. Tesis ini berjudul Politik Luar negeri Iran Pada Pemerintahan Ahmadinejad Dalam Hubungannya dengan Amerika Serikat Periode 2005 – 2009. Tesis yang mengambil tema seperti ini merupakan salah satu fenomena menarik yang saya kira patut diteliti diantara sekian banyak sisi-sisi peristiwa yang terjadi di Timur Tengah khususnya Kebijakan Politik Luar Negeri Iran dalam hubungannya dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad periode 2005 – 2009.

Selain sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah Universitas Indonesia, kewajiban melakukan penulisan tesis ini, atau bahkan penulisan karya ilmiah lainnya telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas seorang individu sebagai anggota masyarakat akademisi. Namun demikian sebuah tesis tentulah mengandung prinsip terbuka untuk didiskusikan dan diberi saran atau masukan agar lebih memiliki bobot ilmiah. Untuk itu penulisan tesis ini juga tidak luput dari prinsip-prinsip tersebut, dan penulis tentunya akan sangat berterimakasih.

Dalam kesempatan ini, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia;
2. Bapak Dr. Hanief Saha Gafur, M,Si, Sekretaris Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana, Universitas Indonesia;

3. Bapak Ahmad Ramzy Tadjoedin, selaku pembimbing tesis penulis yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak, Amin;
4. Bapak Drs. H. Ali Hadiyanto, M. Si, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI yang telah banyak memberikan kebaikan dan dukungan kepada penulis, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada Bapak, Amin;
5. Seluruh staf perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Indonesia di Salemba, perpustakaan LIPI, dan kedutaan besar Iran di Jakarta, dan Staf Sekretariat Kajian Timur Tengah dan Islam Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
6. Secara khusus untuk Almarhum Ayah, Allahumaghfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anh. Ya Allah Ampunilah dia dan sayangilah dia, maafkanlah dia dan muliakanlah tempatnya, Ayah semua tesis ini Indri persembahkan untuk Ayah yang telah banyak memberikan semua kasih dan sayangnya kepada anak-anak ayah. Kami anak-anak ayah selalu menyayangi dan mendoakan Ayah.
7. Rasa Hormat, sembah sujud dan terima kasih yang tidak mungkin terbalaskan untuk ibunda tercinta, Cita-citaku adalah juga cita-citamu, semangatku adalah juga semangatmu, kasih sayang dan kesabaranmu ibu telah banyak memberi arti dalam hidupku. Janganlah ibu pernah berhenti berdoa untuk anak-anakmu baik dalam suka maupun duka. Terima kasih ibu, sembah sujudku senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah hidupmu dan segenap kelelahan-kelelahan yang tiada pernah engkau hiraukan demi anak-anakmu.
8. Abangda, Zulkarnain, S.IP, M.Si, rasa sayang dan cintaku yang tulus tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Kau adalah segalanya bagiku. kesabaran, dukungan, dan motivasimu teramat berarti bagiku, termasuk dalam penulisan tesis ini. Terima kasih abang, semoga kebersamaan dan cinta kasih kita selalu abadi. *Till Death Do Us Part*.
9. Anak-anakku tersayang dan terkasih Sarah Zhafirah Adzra Zulkarnain dan Muhammad Aidan Nadenggan Zulkarnain, jadilah selalu anak-anak papa dan

mama yang manis dan baik budi, doa mama selalu untuk Sarah dan Aidan semoga Allah selalu memberikan kebaikan disetiap langkah kehidupanmu.

10. Adik-adikku M. Rusydi Sani, S.Fil.I dan Atik Ramadhani, S.KG. Tetaplah semangat, tegar, sabar dan tawakal sambil terus menjaga persaudaran kita hingga akhir hayat. Teramat penting bagi kita adalah senantiasa mendoakan kesehatan ibunda kita serta mendoakan almarhum Ayah yang sama-sama kita cintai agar diterima disisi Allah SWT.
11. Terakhir untuk semua sahabat-sahabatku, terima kasih atas segalanya. Semoga kita selalu saling nasehat-menasehati untuk kebaikan bersama.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 16 Desember 2009

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	x
ABSTRAK BAHASA ARAB	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Politik Luar Negeri	16
2.2 Kepentingan Nasional	19
2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya	20
2.4 Kerangka Konseptual	23
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pengantar	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2.1. Batasan Objek Masalah	26
3.2.2. Karakteristik Data	26
3.3 Metode Penelitian	27
3.3.1. Metode Studi Kasus	28
3.4 Unit Analisis	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data	30
3.7 Metode Analisis Data	30
BAB IV : ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI IRAN TERHADAP AMERIKA SERIKAT	
4.1 Tinjauan Umum Politik Luar Negeri Iran	32
4.1.1. Politik Luar Negeri	32
4.1.2. Politik Luar Negeri Iran Pada Masa Awal Pemerintahan Ahmadinejad	37
4.1.3. Proses Pengambilan Keputusan	40
4.2 Konfrontatisme Dalam Politik Luar Negeri Iran Terhadap AS	43

4.3	Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Politik Luar Negeri Iran	51
4.3.1.	Faktor Internal	51
4.3.1.1.	Faktor Idiosinkratik	51
4.3.1.2.	Posisi Strategis Iran	53
4.3.1.3.	Kekuatan Sosial Ekonomi	56
4.3.1.4.	Sistem Politik dan Kekuasaan	61
4.3.1.5.	Kekuatan Militer Iran	63
4.3.2.	Faktor Eksternal	71
4.3.2.1.	Instabilitas Keamanan Regional	71
4.3.2.2.	Unilateralisme Amerika Serikat	74
4.3.2.3.	Ketakutan Terhadap Islam Global	74
4.4	Kepentingan Nasional Iran	75
4.4.1.	Pengembangan Nuklir	75
4.5	Karakteristik Politik Luar Negeri Iran Terhadap AS	85

BAB V	: KESIMPULAN	89
--------------	---------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Politik Luar Negeri Iran Pada Masa Pemerintahan Ahmadinejad Dalam
Hubungannya Dengan Amerika Serikat Periode 2005 - 2009

Indri Hapsari

Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah

Abstrak : Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa *holocaust*.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Konfrontasi.

**Iranian Foreign Government On The Ahmadinejad In His Relationship With The
United State Period 2005 - 2009**

Indri Hapsari

Politics and International Relation In The Middle East

Abstract Iranian foreign policy toward the United States under the government of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the national interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad government since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators that show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events.

Keywords: Foreign policy, National Interests, Confrontation.

السياسة الخارجية الإيرانية في حكومة أحمدى نجاد و علاقتها مع الولايات المتحدة في الفترة
2009-2005

اندري هافسري

السياسة والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط

المخلص: السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة في حكومة أحمدى نجاد لها سمة خاصة و هي المواجهة.

قد تحدث السياسة الخارجية مثل هذه السمة عندما تكون المصالح الوطنية لا يتوافق في هذين البلدين و يتعارض مع بعضها البعض.

إن المواجهة التي وضعتها إيران ضد الولايات المتحدة في حكومة أحمدى نجاد قد حدث منذ انتخابه في أيار / مايو 2005 ، حتى بداية الفترة الثانية من رئاسته، أي في شهر أيار / مايو 2009.

المؤشر الذي يدل على المواجهة منها المواقف السياسية الخارجية للولايات المتحدة التي تميل الى الهيمنة، وتنمية النزعة الانفرادية ، وممارسة الهيمنة.

السياسة الخارجية للولايات المتحدة لمثل هذا الموقف مخالفة للقيم وتوجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تؤكد على المناهضين للأحادية والهيمنة.

و يمكن ان يري المواجهة التي وضعتها إيران عندما يكون ضوء ساطع على مناقشة لا سيما في المسألة النووية تم تطويرها إيران وموقف اسرائيل و حالتها ، وكذلك الشكوك حول المحرقة هلوكت

الكلمات الرئيسية : السياسة الخارجية ، والمصالح الوطنية ، والمواجهة.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tampilnya Ahmadinejad sebagai pemenang pemilu di Iran pada pertengahan Agustus 2005 dengan perolehan suara lebih kurang 60 persen, telah mengundang keterkejutan banyak pihak, terutama media massa Barat. Betapa tidak, orang yang menjadi saingannya dalam memperebutkan kursi kepresidenan adalah politikus ulung yang sangat berpengalaman sekaligus Imam Jum'at Teheran dan Ketua Kebijakan Republik Islam Iran serta mantan Presiden Iran, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.

Ahmadinejad dikenal bergaya hidup sederhana dan tidak memiliki banyak uang untuk melakukan kampanye keliling Iran dan menyedot perhatian massa. Bandingkan dengan Rafsanjani yang terkenal dan merupakan pejabat presiden yang masih berkuasa serta mempunyai logistik yang banyak pada pemilu tersebut. Nama Rafsanjani sudah mengisi lembaran awal sejarah Revolusi Islam karena seringnya mendampingi Imam Khomeini dan termasuk pilar utama Revolusi Islam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rafsanjani memiliki beberapa perusahaan dan cukup sukses di bidang bisnis. Karena itu dalam kampanyenya Rafsanjani memilih untuk tidak banyak memilih berkeliling ke kawasan di luar Teheran dan lebih memanfaatkan media massa seperti TV sebagai sarana kampanye. Bagaimanapun rakyat sudah mengenal Rafsanjani dan minimal sebulan sekali ia tampil di TV mengisi acara khotbah Shalat Jum'at di Universitas Teheran (*Al-Caff*, 2008; 129-130).

Namun semua kelebihan yang dimiliki Rafsanjani dan calon presiden lain sama sekali tidak meredupkan nama Ahmadinejad di mata para pencintanya. Salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki Ahmadinejad dan tidak dimiliki selainnya adalah komitmennya terhadap nilai-nilai Revolusi Islam dan penegakan keadilan, kesederhanaan hidupnya serta pembelaannya terhadap rakyat kecil. Gaya hidup dan penampilannya yang sederhana benar-benar menjadi identitas Ahmadinejad ini menjadi buah bibir masyarakat desa dan kota. Bahkan Ayatullah

Ali Khomeini turut memujinya. Pujian ini dimanfaatkan oleh tim sukses Ahmadinejad dalam kampanye presiden (*Al-Caff; 2008; 130*).

Kemenangannya dalam pemilu tersebut telah membuat Ahmadinejad sebagai seorang yang sangat fenomenal di Iran. Jutaan rakyat Iran meletakkan harapan-harapan barunya di atas pundak Ahmadinejad, sang pemimpin. Banyak pihak yang meyakini bahwa naiknya Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan merupakan wujud nyata dari keputusan yang diambil kelompok konservatif serta garis keras, pada masa kepemimpinan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Menjadi Presiden Iran sungguh bukan tugas ringan bagi Ahmadinejad. Dia harus menghadapi segala keterpurukan Iran akibat perang, embargo (politik, ekonomi, militer), minimnya sumberdaya, penurunan cadangan moneter serta sisa-sisa pemerintahan korup dan radikal yang harus segera ia bereskan. Ahmadinejad membutuhkan energi revolusi yang begitu besar untuk segera mengangkat Iran dari ketertinggalan. Ahmadinejad mengaplikasikan gaya kepemimpinan yang berbasis kerakyatan dan menjadikan Islam sebagai fondasinya. Dalam pandangannya Revolusi Islam Iran harus juga berorientasi kepada kepentingan global yang memang telah dan akan tetap menjadi misi besar Revolusi Islam. Ahmadinejad meyakini bahwa Revolusi Islam akan segera menciptakan kemajuan besar, kemerdekaan dan kemaslahatan Islam (*Simanjuntak; 2007; 27-28*). Dalam bidang ekonomi Iran, Ahmadinejad melemparkan kritik keras atas model kebijakan ekonomi yang selama ini dimiliki Iran. Beberapa tahun sebelumnya ekonomi Iran mengalami sakit yang berkepanjangan, dimana terdapat 60 persen pemusatan perputaran uang di kota-kota besar saja. Akibatnya jenjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Iran tidak merata hingga ke sudut-sudut negeri Persia tersebut. Lebih jauh, pada kenyataannya Ahmadinejad ingin membuktikan bahwa Revolusi Islam bukan hanya sebagai revolusi para ulama Iran saja. Melainkan revolusi yang akan bertumpu pada cita-cita kemajuan, kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Iran (*Simanjuntak; 2007; 28*).

Revolusi Islam telah dijadikan sebagai dasar politik Ahmadinejad dalam menjalankan pemerintahannya di Iran. Ia menyebutnya dengan istilah Revolusi Ketiga dengan semboyan "itu mungkin dan bisa kita lakukan" (*Misyavad va Mitavonim*). Revolusi Ketiga ini jelas berbeda dengan Revolusi Islam Iran 1979

yang dikomandani oleh Imam Khomeini, lantaran revolusi ini berjalan dalam koridor Revolusi 1979. Bukan hanya itu, Revolusi Ketiga ini adalah revitalisasi Revolusi 1979. Tuntutan revolusi Ahmadinejad bukan perubahan sistem pemerintahan secara komprehensif, melainkan perubahan struktur elit dan pola menjalankan roda kekuasaan. Dia menuntut elit berkuasa yang ikut menggerakkan Revolusi 1979 untuk kembali menjadi revolusioner, kembali menjadi bagian dari rakyat, kembali merasakan derita dan kemiskinan rakyat. Revolusi ketiga ini menasar pada sekelompok elit Iran yang ikut berjuang dalam Revolusi 1979, tapi pelan-pelan bergeser menjadi *status-quo* yang menikmati kekuasaan dan melupakan bahwa perjuangan mereka adalah untuk rakyat kebanyakan. Jelas sekali dia telah menyaksikan apatisme sebagian besar rakyat terhadap elit bersorban yang telah berkuasa, tujuan-tujuan Revolusi 1979 itu perlahan mereka gerus dari dalam. Buah-buah segar revolusi telah dipetik sendiri, dinikmati oleh sebagian kelompok kecil. Akibatnya cita-cita Revolusi 1979 itu semakin lama semakin jauh dari real politik (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 150). Menurut Ahmadinejad, Revolusi Ketiga pada hakekatnya adalah perubahan dalam mengelola kekuasaan dan perubahan manajemen pemerintah setelah 25 tahun Revolusi 1979 (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 152).

Pada statemen publik pertamanya di acara Radio Republik Islam Iran sejak terpilih sebagai presiden, Ahmadinejad menyatakan ingin menciptakan Iran sebagai model pemerintahan yang modern, maju dan islami. Model pemerintahan seperti ini menurutnya tidak bisa tidak harus berpijak pada manajemen kerja yang kuat, profesional, bebas korupsi dan favoritisme politik. Baginya pemerintahan Islam ideal itu bukan sekedar konsep dan jargon, tetapi sebuah kerja keras tanpa kenal lelah, kerja keras dan tanpa kenal lelah itu tidak bisa ditawar-tawar, bahkan dengan imbalan sesuatu sesakral demokrasi. Masih menurut Ahmadinejad, "kita melakukan revolusi bukan dalam rangka memiliki demokrasi," katanya suatu ketika, mengacu pada sebagian kelompok yang bersembunyi di balik demokrasi untuk menampung para koruptor dan menjaga konglomerat (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 154).

Basis pendekatan revolusi yang digunakan oleh Ahmadinejad dalam mengelola pemerintahan ternyata tidak hanya ditujukan untuk pengelolaan dalam

negeri, melainkan juga terhadap ranah internasional. Tampuk kekuasaan yang berhasil ia raih ternyata sekaligus juga telah merubah wajah dan tampilan politik luar negeri Iran. Tidak lama setelah Ahmadinejad menduduki kursi kepresidenan di Iran, ia dengan tegas menyerukan slogan anti Israel dan menunjukkan sikap perlawanan atas segala bentuk hegemoni Barat. Kemudian ia juga menegaskan kepada dunia bahwa Iran adalah negara berdaulat yang berhak mengembangkan teknologi nuklir sebagaimana negara-negara lain yang terlebih dahulu sudah mempunyai teknologi nuklir tersebut. Tampilan politik luar negeri Iran yang sedemikian rupa ini sebenarnya telah membawa Iran kepada sebuah kondisi yang saling berhadap-hadapan dengan arus besar politik internasional yang berkembang saat itu, dalam mana unilateralisme AS telah menjadi satu-satunya kekuatan dunia yang berhasil mengontrol sistem internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, AS dan sekutu Baratnya sangat menentang keras sikap politik luar negeri Iran yang dikomandoi oleh presiden Ahmadinejad. Pada saat yang sama, Iran tampil dengan menjalin hubungan harmonis dengan beberapa negara yang dipandanginya anti hegemoni AS dan mempunyai nilai-nilai revolusioner yang sama dengan Iran. Negara-negara tersebut antara lain adalah Kuba, Venezuela, Bolivia, Korut, Cina dan Rusia.

Sebagaimana diketahui, sejak Ahmadinejad berkuasa di Iran pada tahun 2005, arah politik luar negeri Iran bertumpu pada prinsip mengurangi ketegangan dan mengembangkan hubungan dengan semua negara di dunia, terutama negara-negara Islam (*El-Gogary; 2007; 92*). Arah politik luar negeri Iran di bawah pemerintahan Ahmadinejad ini memang tidak secara tegas menyampaikan pesan yang menentang AS, Israel dan sekutu-sekutu Barat. Namun demikian dalam prakteknya, pemerintahan Ahmadinejad selalu menunjukkan ketegasannya yang menolak pendudukan Israel atas beberapa wilayah di Timur Tengah dan sangat anti terhadap hegemoni dan unilateralisme AS.

Isu penghapusan Israel dari peta dunia serta ungkapan Ahmadinejad tentang keraguannya atas peristiwa *holocaust* pada perang dunia kedua telah membuat AS dan Israel berang, ditambah lagi dengan upaya Iran yang terus menjalankan program pengembangan teknologi nuklir di dalam negerinya, merupakan sikap politik luar negeri Iran yang sangat bertentangan dengan

kepentingan-kepentingan AS dan Israel serta negara-negara sekutu Barat lainnya. Pandangan-pandangan revolusioner Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad secara tidak langsung telah mewarnai arah politik luar negeri Iran yang sangat kontra kepada AS, Israel dan sekutu-sekutu Baratnya di Eropa.

Pandangan-pandangan revolusioner Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad yang membuat Barat dan sekutu-sekutunya meradang dapat di lihat dari sebuah momentum kegiatan PBB. Pertengahan September 2005, di lantai 38 Markas Besar PBB, terjadi perjumpaan diplomatik yang sama sekali tidak diplomatik. Lima orang bersama gerombolan asisten dan penerjemah sedang mengadakan rapat yang menegangkan. Salah satu dari mereka adalah Mahmoud Ahmadinejad, presiden Iran yang baru beberapa bulan terpilih. Berbicara dengan nada lembut tapi tegas, Ahmadinejad sama sekali tidak berusaha menyembunyikan maksudnya kepada beberapa lawan bicaranya. "Jangan berani-berani mengancam kami dengan segala rupa sanksi atau kalian akan menyesalinya," tukasnya setelah para Menlu Inggris (Jack Straw), Prancis (Philippe Dousteblazy) dan Jerman (Joschka Fischer) membeberkan kemungkinan dijatuhkannya sanksi PBB atas Iran. "Kalian jangan hanya mengikuti kemauan AS" (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 183-184). Demikian pernyataan Ahmadinejad terkait dengan program pengembangan nuklir yang sedang dilanjutkan oleh Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad. Dalam kesempatan itu Ahmadinejad melanjutkan lagi pernyataannya bahwa "bila nuklir itu berbahaya, mengapa ada pihak yang dibiarkan menggunakannya ? bila nuklir itu berguna, mengapa ada pihak yang tidak diperbolehkan menggunakannya", (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 185). Logika revolusioner Ahmadinejad sungguh mengalir tanpa ambivalensi dan ambiguitas yang kerap menyerang pola pikir manusia modern. Memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah tuntutan seluruh rakyat Iran dan pejabat sebagai wakil rakyat harus berupaya sekuat tenaga untuk merealisasikan tuntutan tersebut (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 185).

Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad mempunyai sejumlah alasan rasional yang dapat dijadikan sebagai dasar mengapa Iran tetap pada pendiriannya melanjutkan program nuklir. *Pertama*, nuklir merupakan teknologi prestisius yang

dapat membawa Iran melejit menuju bangsa yang maju. Konkretnya, jika Iran berhasil memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, maka Iran akan dapat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang notabene jauh lebih murah dan sangat efektif. Dengan begitu anggaran subsidi untuk konsumsi listrik nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dikurangi secara drastis. Itu artinya, untuk jangka panjang Iran akan sangat dimungkinkan menjadi negara yang mandiri hampir di semua bidang. Dengan memiliki alternatif teknologi nuklir dan cadangan minyak yang besar, Iran jelas akan lahir menjadi negara kaya. Sedangkan untuk jangka pendeknya, Iran akan memperoleh devisa negara yang sangat besar, seiring meningkatnya harga migas dunia. *Kedua*, teknologi nuklir dapat membantu Iran dalam melawan segala bentuk penindasan dan dominasi negara-negara barat atas Iran khususnya serta negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Ini jelas merupakan perisai tangguh yang dapat menangkis geliat hegemoni barat atas Iran. *Ketiga*, adalah hak legal bangsa Iran untuk melakukan dan tetap melanjutkan meski dilarang, program pengembangan nuklir. Itu sudah menjadi tuntutan hampir semua rakyat Iran, meski disampaikan dengan beragam perbedaan pendapat yang ada. Lebih dari itu program pengembangan nuklir dinilai dapat memantik api semangat kemajuan seluruh rakyat Iran yang selama ini hidup dalam berbagai tekanan, embargo dan kekangan dunia barat sejak bergulirnya Revolusi 1979 (Simanjuntak; 2007; 38). Ahmadinejad menekankan bahwa energi nuklir memiliki banyak manfaat hampir pada semua bidang kehidupan, termasuk bidang pertanian dan kedokteran. Karena itulah negara-negara barat berusaha melarang Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Tujuannya, agar mereka-mereka sajalah yang dapat menikmati kemajuan yang ditimbulkan dari pemakaian energi nuklir.

Ketika Revolusi Islam baru berumur sepuluh tahun, Iran merupakan negara pinggiran yang dipandang sebelah mata oleh Negara-negara tetangganya seperti Qatar, Yordania dan Saudi Arabia serta negara-negara barat yang memiliki hegemoni besar di kancah politik internasional, khususnya Amerika Serikat (AS). Bahkan pada saat itu, ketika kalangan diplomat Iran datang berkunjung untuk tugas kenegaraan, banyak diantaranya yang mendapat penolakan terhadap paspornya oleh petugas imigrasi level rendah. Beberapa kalangan analis kala itu,

memprediksi bahwa Iran bakal berakhir dengan kembali ke pangkuan Washington seperti pada masa pemerintahan Shah sebelumnya, yaitu pada saat rejim Shah Reza Pahlevi berkuasa.

Namun seiring berjalannya waktu, ternyata sejarah berkata lain, setelah lama terisolasi dari percaturan politik dunia internasional, Iran pasca Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini, kembali ke panggung dunia internasional sebagai negara yang mandiri yaitu negara yang mampu untuk membangun dirinya sendiri tanpa perlu bergantung terhadap negara lain. Bahkan saat ini Iran dapat memproduksi hampir semua kebutuhan sendiri dari film hingga kran air. Terlebih lagi semenjak diembargo oleh AS atas persenjataan dan suku cadangnya, Iran mampu menciptakan persenjataan dengan teknologi berkemampuan tinggi yang siap untuk menandingi persenjataan milik AS dan Israel. Belakangan juga dikabarkan, dunia internasional sedang dikejutkan oleh proliferasi nuklir yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ternama milik Iran yang awal tujuan mulanya untuk kepentingan damai hingga dalam perkembangannya sebagai alat eksistensi simbol kekuatan negara itu.

Kemenangan kandidat garis keras Mahmoud Ahmadinejad pada pemilu presiden tahun 2005 lalu, adalah klimaks dari semakin diperhitungkannya Iran dalam agenda-agenda sensitif politik internasional. Pada masa pemerintahan Ahmadinejad, Iran telah muncul sebagai sebuah negara dengan kekuatan besar di kawasan Timur Tengah, terlebih-lebih negara tersebut tumbuh dan berkembang di atas sendi-sendi demokrasi.

Dalam banyak hal, Iran menghadirkan wajah Islam yang modern. Bahasa Persia kini merupakan bahasa populer ketiga di internet (setelah Inggris dan Mandarin), di mana seseorang dapat berselancar ke lebih dari 80.000 blog milik warga Iran. Masyarakat Iran secara aktif terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai pemikiran Barat. Terdapat lebih banyak terjemahan Immanuel Kant ke dalam bahasa Persia pada dekade lalu dari pada bahasa lainnya (dan dicetak ulang berkali-kali); salah satu di antaranya diterjemahkan oleh seorang pembicara konservatif di parlemen Iran.

Dalam bidang matematika dan fisika, pusat penelitian Iran menduduki ranking di antara yang terbaik di dunia; tak lupa juga sinema-sinema Iran pada

tahun-tahun belakangan ini menjadi suatu kekuatan besar, dengan filmnya seperti drama eksistensial arahan sutradara *Abbas A Taste of Cherry*, telah berhasil menarik perhatian dunia (Nasr, 2007; 256). Dinamisme kultural ini bahkan telah menampakkan tanda-tandanya dalam kemapanan agama warga Iran. Sejak revolusi Khomeini, pusat pendidikan Syi'ah di Iran, terutama yang berada di kota Qom begitu makmur. Terdapat begitu banyak perpustakaan-perpustakaan baru dan besar di Mashad serta Qom. Setiap perpustakaan menampung jutaan judul buku dan berbagai manuskrip. Disusun secara elektronik dengan teknologi database terbaru yang dapat diakses dalam menerima dan menyimpannya. Seorang pengunjung perpustakaan di tempat suci Imam Reza di Mashad, atau perpustakaan Ayatullah Marashi di Qom tidak mungkin tak akan terkesan dengan begitu banyak koleksinya, tingkat pelayanannya, dan kepeduliannya atas infrastruktur serta penggunaan teknologi. Prestasi ini semakin memajukan studi Syi'ah, dengan mengusahakan manuskrip-manuskrip langka dan teks-teks kuno tersedia bagi para ulama dan santri. Hal ini juga meningkatkan ilmu kepustakaan, dengan menciptakan semacam alat yang bisa mengatur koleksi jubah ataupun jas.

Manuskrip-manuskrip yang berumur dan langka, menjadi satu dalam terminal komputer dan tempat restorasi berteknologi tinggi serta laboratorium preservasi. Perpustakaan jubah ini dipenuhi dengan surban para santri, beberapa di antaranya terkubur dalam teks-teks teologis. Untuk mengatur koleksi lainnya, dikerjakan pada terminal-terminal komputer.

Kebangkitan militer Iran dalam sepuluh tahun belakangan ini telah melengkapi Iran sebagai satu-satunya Negara di kawasan Timur Tengah yang potensial mengancam negara-negara lain di sekitarnya – terutama bagi Negara yang tidak sejalan kepentingan nasionalnya dengan Iran- dan Israel adalah Negara yang paling terancam dengan kebangkitan kekuatan militer Iran tersebut. Kemampuan Negara Iran dalam membangun energi nuklir dalam beberapa tahun terakhir ini, baik untuk tujuan damai maupun untuk tujuan persenjataan, telah membuktikan bahwa Iran adalah Negara kuat dalam bidang militer. Tidak mengherankan bila kemudian AS, sebagai satu-satunya Negara hegemon di dunia dalam bidang pertahanan keamanan, harus memperhatikan dengan seksama kebangkitan militer Iran ini. Dalam banyak kesempatan, AS selalu menyudutkan

Iran terkait dengan isu kepemilikan senjata nuklir. Dengan fakta yang ada saat ini, AS dan juga Israel telah menyatakan dirinya terancam dengan kemampuan militer Iran.

Berangkat dari adanya kemajuan dan penguatan militer Iran ini, maka dapat dipastikan bahwa kawasan Timur Tengah kembali pada situasi yang mencekam, meskipun sebenarnya belum dapat dipastikan secara benar apakah kekuatan militer Iran tersebut ditujukan untuk mengancam Israel atau kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa kawasan Timur Tengah telah berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang instabil sebagai akibat kemunculan kekuatan militer baru Iran.

Menyangkut sepak terjang Ahmadinejad, pada Desember 2005, Presiden baru Iran ini menyerang Undang-undang yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa yang melarang siapapun yang menolak kejadian *holocaust*. Katanya, kendatipun dia tidak tahu apakah *holocaust* itu dan sampai sejauhmana rincian kejadiannya, atau apakah ia benar-benar terjadi atau tidak. Dalam pernyataannya Ahmadinejad menegaskan bahwa negara-negara Eropa harus mengganti kesalahan mereka kepada kaum Yahudi dengan memberi tanah mereka untuk mendirikan negara (Yahudi) di Eropa (Jerman, Austria atau negara-negara lain), AS, Kanada atau Alaska ketimbang bangsa Palestina yang tidak berdosa harus membayar kejahatan ini (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 171-172).

Selanjutnya Presiden Iran Ahmadinejad pada tanggal 14 April 2006, menegaskan kembali bahwa terdapat keraguan di seputar terjadinya pemusnahan bangsa Yahudi (*holocaust*) di Eropa ketika perang dunia kedua pecah. Penegasan ini diucapkan Ahmadinejad pada saat diadakan muktamar untuk mendukung Palestina. Ahmadinejad berkata, "jika terdapat keraguan pada kejadian pemusnahan bangsa Yahudi (*holocaust*), maka janganlah kita ragu pada bencana dan pemusnahan bangsa Palestina", Ahmadinejad menambahkan, "sebagian kekuatan Barat berkeyakinan bahwa banyak orang Yahudi yang dibunuh pada perang dunia kedua, untuk membalas hal ini orang-orang Yahudi membentuk gerakan zionis. Ahmadinejad bertanya-tanya, "jika bencana ini benar-benar terjadi, mengapa kawasan Timur Tengah yang harus bertanggungjawab membayar ini semua" (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 193).

Berikutnya, terkait dengan penghapusan Israel dari peta dunia, Ahmadinejad mengatakan hal ini dalam sebuah kesempatan di Iran, pada tanggal 24 April 2006. Ia menjelaskan penentangannya terhadap Israel dengan mengatakan bahwa "sistem negara Israel adalah sistem merampas yang tidak cocok untuk kehidupan, kemudian dia melanjutkan, bukalah pintu-pintu penjara besar itu (Israel), biarkanlah orang-orang memutuskan diri mereka sendiri, niscaya kalian akan melihat mereka dengan kemauannya akan menuju negerinya masing-masing". Negara-negara Eropa bertanggungjawab membangun Israel, kalian telah melihat permasalahannya, maka selesaikanlah. Saya heran mengapa bangsa-bangsa di Timur Tengah harus terus bertanggungjawab atas pemusnahan bangsa Yahudi 60 tahun silam (setelah perang dunia kedua berakhir).

Pernyataan-pernyataan Ahmadinejad yang sedemikian rupa ini jelas telah membuat ketersinggungan bagi Israel, AS dan beberapa negara-negara Eropa, terutama sekutu-sekutu AS di Eropa. Dalam konteks ini, Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad dengan nyata telah menampilkan politik luar negerinya terhadap AS yang sangat beresiko. Namun demikian Iran tetap pada pendiriannya, meskipun ia tahu resiko yang akan dihadapi sungguh sangat berat.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian konteks permasalahan di atas, terlihat bahwa Iran di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadinejad mempunyai karakteristik tersendiri dalam tampilan politik luar negerinya terhadap AS, yaitu sangat konfrontatif terhadap negara AS. Karakteristik yang konfrontatif ini ditandai dengan adanya sikap, pikiran dan tindakan Ahmadinejad sebagai Presiden Iran yang cenderung menentang keras kemauan dan atau kepentingan nasional negara kuat tersebut tatkala berhadapan dengan keinginan atau kepentingan nasional Iran dalam ranah internasional. Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad ini menunjukkan sikap perlawanan serta tidak mau didikte oleh AS. Kebulatan tekad, keteguhan dan sikapnya yang tidak bergeming atas tuntutan AS dan himbauan PBB untuk segera melucuti program pengayaan uranium bagi kepentingan nuklir Iran sama sekali tidak dihiraukannya. Alih-alih mengikuti kemauan dan desakan internasional tersebut, Iran malah membangun terus kekuatan nuklirnya sekaligus menjalin

hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain seperti negara-negara Islam di sekitar Iran dan negara lain yang dianggap anti terhadap hegemoni atau unilateralis AS, sebagaimana ia tunjukkan dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara revolusioner di Amerika Latin, seperti Kuba, Venezuela, Bolivia dan Korea Utara serta Cina di Asia. Tidak ketinggalan juga dengan Rusia yang merupakan negara strategis bagi Iran.

Karakteristik politik luar negeri Iran yang konfrontatif ini sangat berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya, terutama pada masa kepemimpinan Mohammad Khatami dan Hashemi Rafsanjani. Pada dua masa pemerintahan sebelum Ahmadinejad ini, Iran memiliki karakteristik politik luar negeri yang cenderung kooperatif dengan AS dan selalu memelihara hubungan dan komunikasi yang baik dengan AS dan sekutu-sekutunya. Oleh karena kedua presiden Iran sebelum Ahmadinejad ini berasal dari kalangan Reformis, maka politik luar negeri Iran cenderung moderat dan dalam setiap pembicaraan isu-isu strategis menyangkut wilayah regional di kawasan Timur Tengah, Iran senantiasa berpihak kepada usulan-usulan moderat yang tidak membuat AS dan sekutu-sekutunya tersinggung tetapi sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi Iran. Karakteristik politik luar negeri Iran yang konfrontatif di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, terutama sikap konfrontatifnya terhadap negara AS adalah fokus permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan di atas maka pertanyaan yang diajukan penulis adalah terkait dengan politik luar negeri Iran serta karakteristiknya pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Iran mengambil sikap politik luar negeri yang konfrontatif terhadap AS pada masa Pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad periode 2005-2009 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi politik luar negeri Iran terutama pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad ?
3. Bagaimanakah karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad periode 2005-2009 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Selain sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua pada program pascasarjana Kajian Wilayah Islam dan Timur Tengah, penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai hal penting menyangkut politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad periode 2005-2009. Sejumlah hal penting tersebut berkisar pada penjelasan komprehensif tentang adanya determinan politik domestik dan determinan politik internasional yang mempengaruhi orientasi politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad. Kemudian menjelaskan karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad dan terakhir adalah menjelaskan sikap dan karakter politik luar negeri Iran yang konfrontatif terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengambil judul politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad periode 2005-2009 mempunyai beberapa manfaat yang patut diperhatikan.

- a. Bermanfaat bagi para penstudi dalam bidang Islam dan politik internasional di Timur Tengah. Kajian sejenis ini tentunya dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat luas yang berminat dalam studi Islam dan politik internasional di Timur Tengah.
- b. Bermanfaat bagi para pengambil keputusan, khususnya orang-orang yang terlibat dalam instansi pemerintah. Kajian sejenis ini bisa dijadikan refleksi dan pembelajaran tentang bagaimana harus mengambil sikap dan kebijakan luar negeri, tatkala situasi politik internasional berada dalam tahap kecemasan dan ketidakpastian.
- c. Bermanfaat bagi para analis kebijakan luar negeri, khususnya mereka yang terlibat dalam pusat-pusat kajian, media massa dan pelaku politik luar negeri.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini akan dipaparkan sejumlah materi penting sebagai bagian dari konstruk penelitian secara keseluruhan. Bagian pendahuluan ini mempunyai sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teori, yaitu bagian yang menjelaskan sejumlah pengetahuan dasar dan atau pengetahuan pendahuluan yang menyangkut dimensi pada seputar politik luar negeri Iran. Dalam bagian ini akan dipaparkan konsep-konsep penting sebagai bagian dari kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Konsep-konsep yang akan diuraikan dalam penulisan tesis ini terdiri dari *konsep politik luar negeri* dan *konsep kepentingan nasional*. Selain itu dalam bagian ini akan dipaparkan dan diinformasikan juga sejumlah hasil pembahasan atau hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para penstudi politik luar negeri Iran. Beberapa karya tulis dan karya penelitian sebelumnya tersebut sifatnya adalah memperkaya gagasan dan pembahasan sekaligus membuka wawasan bagi penulis dalam rangka mengamati lebih jauh tentang politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad. Seterusnya, dalam bab ini akan dijelaskan kisi-kisi yang terdapat dalam teori yang digunakan tersebut, lalu menerapkannya untuk tujuan pemecahan masalah.

Bab III adalah Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan metode yang dinilai tepat untuk memecahkan masalah. Kemudian dalam bagian ini juga akan ditampilkan sejumlah data yang digunakan serta tahapan dan prosedur penyelesaian masalah melalui penggambaran model, skema atau matriks maupun alur sebagai bagian dari tahap penyelesaian masalah.

Bab IV adalah Analisis Permasalahan. Rumusan judul bab yang diambil penulis dalam Bab IV ini adalah Analisis Politik Luar Negeri Iran pada masa Pemerintahan Ahmadinejad tahun 2005-2009. Sejumlah sub-judul yang terdapat pada bagian ini terdiri dari (a) Tinjauan umum politik luar negeri Iran, yaitu mencakup ; prinsip dasar politik luar negeri Iran, orientasi politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami dan Rafsanjani, orientasi politik luar negeri Iran

pada masa pemerintahan Ahmadinejad; (b) Dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad; (c) Kepentingan nasional Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad; (d) Karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS (e) Sikap konfrontatif politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah kesimpulan yang dapat diambil penulis berdasarkan hasil pembahasan. Rumusan kesimpulan ini merupakan bagian integral dari upaya menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian dalam bagian akhir dari penulisan tesis ini, akan dirumuskan sejumlah saran yang dinilai mengandung manfaat, baik manfaat akademis maupun praktis.



BAB II LANDASAN TEORI

Pembahasan terhadap rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, sangat terkait dengan pentingnya menempatkan sejumlah kerangka teori sebagai alat analisa. Dalam tulisan ini, penulis menganggap perlunya konsep atau teori politik luar negeri dan kepentingan nasional sebagai kerangka analitiknya. Politik luar negeri sebuah negara disebut mengalami kegagalan bilamana kepentingan nasional negara yang bersangkutan tidak bisa diperjuangkan dalam ranah politik internasional, atau paling tidak, negara yang bersangkutan tidak bisa menempatkan kepentingan nasionalnya diantara kepentingan nasional negara lain. Untuk itu jika sebuah negara menginginkan politik luar negerinya berhasil dalam ranah politik internasional, maka negara bersangkutan haruslah mempunyai diplomat-diplomat unggul yang benar-benar memahami apa yang menjadi kepentingan nasionalnya dan mampu memperjuangkan serangkaian kepentingan nasional tersebut dalam hubungan antar negara bangsa. Tetapi itu saja sesungguhnya tidaklah cukup, sebab sebuah negara juga harus mampu menata politik pada tingkat domestiknya secara bersamaan tatkala negara yang bersangkutan menjalankan politik luar negerinya, atau ketika negara bersangkutan ingin memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam ranah politik internasional.

Iran sebagai sebuah negara, tentu saja tidak dapat menghindari dari interaksi antar negara bangsa yang sarat dengan upaya-upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Iran dihadapkan kepada sebuah situasi politik regional dan politik global yang lebih cenderung menunjukkan aspek konfliktual dibandingkan dengan aspek kerjasama. Oleh karena itu, Iran mengambil langkah-langkah strategis demi mewujudkan tujuan-tujuan nasionalnya, atau paling tidak Iran berusaha semaksimal mungkin agar kepentingan-kepentingan nasionalnya dapat sejalan dengan arus politik internasional. Dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini, penulis memandang perlu menempatkan konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional sebagai

dasar untuk membahas politik luar negeri Iran pada era kepemimpinan Ahmadinejad.

2.1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri tidaklah dijalankan dalam situasi *vacuum*. Politik luar negeri dijalankan dalam ruang yang dipenuhi partikel-partikel aktif dan bergerak sehingga ruang dinamis lebih menonjol ketimbang ruang statis. Millar memastikannya dengan mengemukakan bahwa politik luar negeri terkait dengan ... *all policies which have an effect upon a national government's relations with other national governments...* (Millar dalam Rossenau; 69; 57). Adanya benturan kebijakan antara pemerintahan negara yang satu dengan pemerintahan negara yang lain, semakin memperkuat kenyataan bahwa ruang tersebut adalah lingkungan yang *salient* bukan lingkungan yang *silent* (Zulkarnain dalam Azian Tamin; 2005; 165).

Sangat menarik untuk dicatat bahwa dalam berbagai literatur dan diskursus mengenai teori hubungan internasional, politik luar negeri merupakan salah satu isu yang banyak memperoleh kajian dan sorotan. Meski banyak definisi yang ditawarkan. Dalam bukunya *Understanding International Relation*, Chris Brown memberikan pemahaman secara sederhana mengenai politik luar negeri. Menurut Brown politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar (Brown; 2001; 68). Dalam konteks ini Brown lebih menekankan betapa pentingnya dimensi "cara" yang diambil sebuah negara dalam menempatkan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya ditengah kepentingan nasional negara lain. Terkait dengan politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad, maka dimensi cara yang diterapkan Iran tergolong non-linier ketika memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Non-linier artinya adalah sebuah cara yang mengandung tindakan saling berlawanan antara satu negara dengan negara lain. Negara lain dalam hal ini adalah AS. Pada konteks yang demikian ini, Iran lebih menonjolkan sikap, pandangan dan tindakan yang bertentangan (*vis a vis*) terhadap AS. Sementara dalam perspektif lain, AS juga cenderung mengedepankan sikap, pandangan dan tindakan yang mengandung dimensi

bertentangan juga. Indikator tindakan yang dilakukan oleh kedua negara melalui cara non-linier ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah yang mengandung resiko tinggi, seperti saling ancam mengancam, embargo, penguatan militer, mobilisasi militer dan aksi-aksi kekerasan militer lain yang pada akhirnya dapat menimbulkan peperangan dalam jangka pendek dan atau jangka panjang.

Pengertian sederhana lain tentang politik luar negeri dapat juga di lihat dari pendapat Christopher Hill dalam bukunya *The Changing Politics of Foreign Policy*. Menurut Hill politik luar negeri adalah serangkaian strategi nasional yang dihadapkan kepada ranah internasional demi mewujudkan keinginan-keinginan nasional sebuah Negara (Hill; 2003; 1). Pengertian yang dikemukakan oleh Hill ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Brown. Keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu adanya upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebuah negara ditengah kepentingan nasional negara lain. Namun demikian patut dicatat bahwa pengertian Hill ini lebih menekankan pada aspek "strategi", bukan pada cara sebagaimana yang diusulkan oleh Brown. Strategi lebih mengacu pada sejumlah perencanaan-perencanaan dan kaidah-kaidah normatif. Sejumlah perencanaan dan kaidah-kaidah ini sesungguhnya bisa saja mengalami perubahan, sehingga sangat mungkin bila sebuah negara keluar dari *platform* yang sebelumnya sudah tersusun rapih dan dibangun dengan baik. Makna "strategi" lebih cenderung diartikan sebagai serangkaian konsep di atas kertas, sedangkan makna "cara" adalah aplikasi atau pelaksanaan dari strategi. Terkait dengan politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad, maka dimensi strategi adalah sejumlah kaidah atau prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan umum yang kemudian tercatat sebagai perspektif nasional masing-masing negara terhadap fenomena eksternal. Masih dalam kaitan ini, maka prinsip, kaidah dan atau pandangan umum politik luar negeri Iran adalah berdasarkan pada ideologi Syi'ahnya yang sangat menekankan kemandirian suatu negara Islam, dan berkeinginan melepaskan seluruh rakyat tertindas dari penjajahan bangsa kuat. Kemudian politik luar negeri Iran sangat menekankan juga kepada upaya membangun kekuatan negara dengan menjalin hubungan dengan negara-negara yang bisa memberi kemajuan untuk Iran. Intinya, Iran menjadikan semboyan

Imam Khomeini "tidak Timur tidak Barat tetapi Islam" sebagai acuan bagi arah politik luar negerinya.

Secara teoritis, tidak diragukan bahwa substansi suatu politik luar negeri adalah bagaimana mengedepankan atau mewujudkan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Untuk mewujudkan kepentingan nasional itu, sebuah negara akan cenderung menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negerinya agar kepentingan nasionalnya bisa diwujudkan.

Politik luar negeri mempunyai sifat yang cenderung berubah dari waktu ke waktu tanpa indikasi yang jelas. Meskipun demikian ada beberapa faktor determinan atau indikator yang dapat dipakai untuk memahami perilaku politik luar negeri yang dinamis. Dalam hal ini William D. Coplin mengidentifikasi ada 4 (empat) determinan politik luar negeri. *Pertama*, adalah konteks internasional. Dalam hal ini situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. Dalam kaitan ini Coplin mengatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu; geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi geografis yang didudukinya dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, serta hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lainnya. Kondisi geografis merupakan sesuatu yang konstan keberadaannya. Faktor *kedua* yang menjadi determinan dalam politik luar negeri adalah perilaku para pengambil keputusan. Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga di suatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. Kemudian determinan *ketiga*, adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain.

Keempat, determinan terakhir yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam

negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dalam pelaksanaan politik luar negeri (Coplin; 1992; 165).

2.2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional (*national interest*) berasal dari kaum realis. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan terminologi Perancis yaitu *raison d'Etat*, yaitu negara yang mempunyai serangkaian tujuan dan ambisi-ambisi tertentu baik dalam bidang ekonomi, militer atau budaya dalam hubungan antar negara. Asumsi utama konsep ini sama dengan asumsi yang dibangun oleh kaum realis yang memandang perlunya sebuah negara untuk tetap *survive* di tengah hubungan-hubungan yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Dalam pandangan kaum realis, negara adalah unit politik utama yang dijalankan oleh manusia dalam hubungan internasional. Manusia adalah makhluk politik yang senantiasa membahayakan dan cenderung mengancam kelangsungan hidup manusia lain. Oleh sebab itu negara yang dijalankan oleh manusia tadi adalah juga dipandang sebagai negara yang senantiasa membahayakan bagi negara lain. Dalam kondisi yang demikian ini, setiap negara perlu melindungi negaranya dari segala macam ancaman. Untuk itu, kepentingan nasional utama sebuah negara dalam pandangan kaum realis adalah melindungi negara tersebut dari ancaman negara lainnya sehingga ia bisa melangsungkan kehidupannya.

Hans J. Morgenthau, adalah salah seorang pemikir realis populer yang kerap menghiiasi khazanah akademik tentang kepentingan nasional. Bersama-sama dengan konsep *power*, kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis, bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologis yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Dalam kaitannya dengan politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad ini, terlihat dengan jelas bahwa pola pencapaian atau

cara yang dilakukan oleh Iran untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Morgenthau. Hal ini bisa dikaitkan dengan cara-cara non-linier yang kerap dikembangkan oleh Iran pada masa Ahmadinejad tatkala berhadapan dengan politik luar negeri AS. Cara-cara non-linier itu sesungguhnya diterapkan oleh Iran adalah untuk mengejar dan mempertahankan kekuatan. Iran sangat tidak ingin berada dalam kontrol kekuatan dari AS, sehingga Iran selalu berusaha terlepas dari kontrol kekuatan tersebut. Dengan demikian dalam rangka mencapai kepentingan nasional itu, politik luar negeri Iran terhadap AS cenderung menggunakan perspektif kekuatan.

Pendapat George F. Kennan (1951) tentang kepentingan nasional tampaknya perlu juga dijelaskan dalam penulisan tesis ini. *Pertama*, konsep kepentingan nasional bukan merupakan konsep yang terpisah dari lingkungan pergaulan antar bangsa atau bahkan aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. *Kedua*, kepentingan nasional suatu negara bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu pada perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Ketiga*, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.

2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Semenjak Ahmadinejad tampil sebagai presiden di Iran pada bulan Agustus 2005, telah lahir sejumlah hasil karya pengamatan atau penelitian yang membahas Iran. Pembahasan terhadap Iran menjadi semakin banyak ditemukan dalam berbagai literatur dibandingkan dengan pembahasan Iran sebelum kepemimpinan Ahmadinejad, baik dalam bentuk artikel di jurnal, surat kabar,

website maupun tulisan-tulisan yang terbit dalam bentuk buku dan laporan-laporan lainnya. Secara umum fokus penelitian atau pengamatan tersebut lebih banyak diarahkan kepada sosok Ahmadinejad sebagai presiden dan tentunya fenomena Iran sebagai negara yang berada dibawah kepemimpinannya. Lihat misalnya buku yang ditulis oleh Muhsin Labib, Ibrahim Muharram, Musa Kazhim dan Alfian Hamzah (2007; 1). Buku yang berjudul "Ahmadinejad ! David di tengah angkara Goliath Dunia", cenderung menempatkan Iran dalam wajah baru politik dunia. Tampilnya Iran dalam wajah baru politik dunia ini berhubungan erat dengan hadirnya sosok Ahmadinejad sebagai presiden Iran yang sangat populer di dalam negerinya. Buku yang kata pengantarnya ditulis oleh Rosianna Silalahi, seorang jurnalis senior stasiun televisi SCTV itu menghadirkan cerita-cerita menarik tentang dinamika sosial politik Iran menjelang terpilihnya Ahmadinejad dan pasca terpilihnya Ahmadinejad. Para penulis menggambarkan betapa posisi Ahmadinejad dan Iran yang berada dibawah pemerintahannya sangat lemah serta diasingkan di tengah arus utama politik dunia.

Pada tinjauan literatur yang lain, dapat di lihat dari buku yang ditulis oleh Ahmadinejad sendiri setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah "Ahmadinejad Menggugat; Republik Islam Iran Mematahkan Arogansi Amerika dan Israel" (2008; 1). Karya aslinya berjudul *Hoviyare Iran dar New York & Govtar Ravesh Iranian*. Buku terjemahan ini sebenarnya merupakan pandangan-pandangan kontemporer Ahmadinejad tentang Amerika Serikat dan Israel. Intinya, ia sangat tidak suka dengan arogansi AS dan Israel. Ia menginginkan perlunya sebuah kekuatan alternatif untuk mengimbangi hegemoni AS dan Israel, terutama dari perspektif militer dan ekonomi. Dalam mewujudkan keinginannya itu, Ahmadinejad memilih perlunya penguatan militer Iran sebagai opsi terbaik, dan opsi penguatan militer itu dilakukan melalui pengembangan nuklir. Buku Ahmadinejad di atas, hampir mirip dengan buku yang ditulis oleh Adel El-Gogary yang berjudul "Ahmadinejad; The Nuclear Savior of Tehran; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis" (2007; 1). Judul asli buku ini adalah *Ahmadinejad; Rajulun fii Qolbil'aashifah* yang diterbitkan oleh Daarul Kitab Al-Arabi, Kairo-Damaskus pada tahun 2006, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul di atas oleh Tim Kuwais. Buku ini

memaparkan tentang pribadi Ahmadinejad dan revolusi nuklirnya untuk perdamaian dunia. Gagasan-gagasannya tentang perlunya Iran memiliki nuklir dijelaskan dengan baik oleh penulis sehingga sangat masuk akal. Intinya, buku ini lebih khusus memaparkan mengapa Iran sebagai sebuah negara memerlukan nuklir ditengah situasi politik keamanan regional dan global yang anarkis. AS, Israel dan negara-negara yang mendukung hegemoni AS dan Israel adalah negara yang dimaksudkan oleh Ahmadinejad sebagai perusak tatanan keamanan dunia. Negara-negara yang dimaksud oleh Ahmadinejad ini dinilai sebagai biang kerok munculnya ketegangan-ketegangan dan situasi yang mencekam, terutama di wilayah Arab dan Timur Tengah dalam mana Iran berada di tengah pusaran wilayah tersebut.

Dalam tinjauan kepustakaan lainnya tentang Iran dan Ahmadinejad sebagai presidennya, dapat di lihat pada buku yang ditulis oleh Ali M. Ansari (2008; 1). Judulnya adalah "Supremasi Iran; Poros Setan atau Super Power Baru ?" Judul ini merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul *Confronting Iran* yang ditulis oleh Ali M. Ansari dan terbit di London, Inggris pada tahun 2006. Karya Ali M. Ansari ini lebih banyak mengupas realitas Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad. Penulis ini mengulas sejumlah fakta yang kemudian membawanya kepada sebuah kesimpulan bahwa Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad adalah sebuah negara yang patut diperhitungkan dan telah menjadi sebuah negara yang berstatus super power baru, bukan justeru sebaliknya, yaitu negara poros setan. Ali M. Ansari sebagai penulis dalam buku tersebut, juga menerangkan dengan disertai fakta-fakta empirik bahwa Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad adalah satu-satunya negara muslim yang berani menentang imperialisme Amerika dan Israel. Keberanian Iran dalam menentang arus utama politik dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Ali M. Ansari, tampaknya paralel dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Alcaff (2008; 1).

Alcaff dalam buku yang berjudul "Perang Nuklir ? Militer Iran" tersebut memaparkan dengan data menyangkut postur angkatan bersenjata Iran. Alcaff mengkategorikan Iran termasuk sebagai negara kuat dalam bidang militer serta menempatkan Iran sebagai negara yang termasuk memiliki angkatan bersenjata

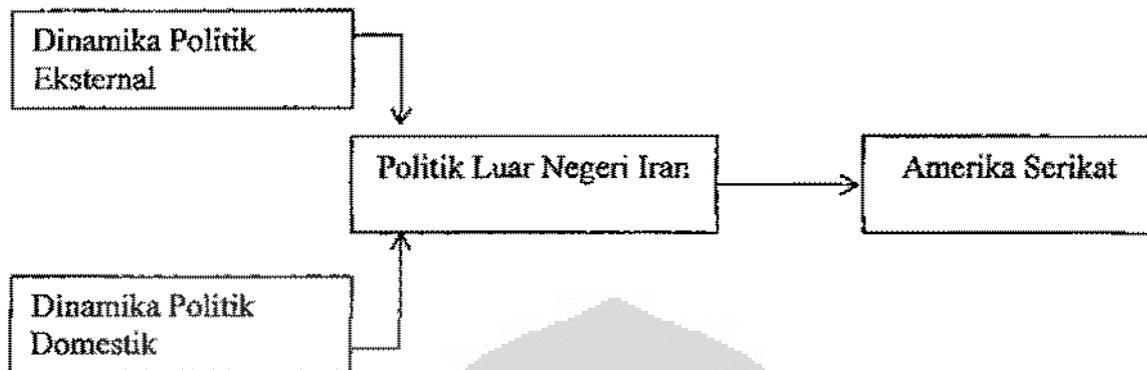
terbesar di dunia disamping negara-negara lain yang selama ini sudah tergolong maju dalam bidang persenjataan militer. Kekuatan militer Iran dijelaskan dengan baik oleh Alcaff dalam buku itu sekaligus juga memaparkan sejumlah fakta otentik yang membuat Iran memiliki keberanian untuk melawan kekuatan militer negara-negara lain yang dianggapnya sebagai musuh terbesar Iran, seperti AS dan Israel. Pada tinjauan pustaka lainnya, Musa Kazhim dan Alfian Hamzah (2007; 1), membeberkan sejumlah skenario penghabisan Iran yang menurut penulis ini dapat melahirkan perang dunia ketiga. Menurut kedua penulis ini, wilayah di sekitar Iran sangat mungkin sebagai pemicu munculnya perang dunia ketiga, karena Iran digambarkannya sebagai negara yang tidak pernah ragu untuk menggunakan kekuatan senjata nuklirnya.

Literatur lain tentang Iran sebenarnya masih banyak ditemukan. Karya tulis tentang Iran ini bisa saja dalam bentuk cuplikan atau artikel lepas, terutama di berbagai media massa Indonesia. Kemudian bisa juga dalam bentuk penggalan tulisan sebagaimana tulisan Robert E. Quirk et.all yang berjudul Poros Setan. Buku ini tidak sepenuhnya membahas Iran, melainkan memasukkan Iran dan kepemimpinan Ahmadinejad sebagai sub bab. Sama halnya dengan tinjauan beberapa penulis lainnya, dalam buku ini Quirk juga menjelaskan betapa Ahmadinejad adalah seorang tokoh dunia yang dapat disamakan dengan Fidel Castro, Evo Morales dan Hugo Chavez. Kehadiran sejumlah tokoh-tokoh revolusioner ini, turut menghiasi kepustakaan Indonesia menyangkut Iran dan kepemimpinan revolusioner Ahmadinejad.

2.4. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas arah dan ruanglingkup pembahasan dalam penulisan ini, diperlukan kerangka konsep atau bingkai pemikiran yang merupakan garis-garis besar pembahasan. Sejumlah variabel dan indikator akan termuat di dalam bingkai pemikiran ini dan variabel serta indikator itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai unit analisa dalam tahapan pembahasan dari tesis ini. Kerangka pemikiran yang dikembangkan penulis adalah seperti tergambar dalam skema di bawah ini.

Gambar 1



Dalam konteks politik luar negeri Iran terhadap AS di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, indikator-indikator yang termasuk dalam dinamika politik eksternal/internasional antara lain adalah ; *Pertama*, sistem internasional (unilateralisme) yang menempatkan AS sebagai satu-satunya hegemon dan kekuatan dunia. *Kedua*, instabilitas kawasan dan persepsi ancaman keamanan regional yang menempatkan situasi konflik di tanah Palestina dan keterlibatan Israel di dalamnya sebagai fokus kajian. Sedangkan indikator-indikator yang termasuk dalam dinamika politik domestik Iran antara lain adalah ; *Pertama*, adalah determinan tetap. Yang termasuk dalam determinan tetap ini ialah landasan dan prinsip dasar politik luar negeri Iran. *Kedua*, adalah determinan berubah. Yang termasuk dalam determinan ini ialah kondisi sosio-ekonomi, sosio-politik dan kondisi militer Iran serta perilaku pembuat kebijakan. Nilai-nilai revolusioner yang dibawa oleh Ahmadinejad turut serta sebagai indikator utama dalam determinan ini. Kemudian dari skema di atas, indikator yang termasuk dalam dimensi politik luar negeri Iran adalah menyangkut karakteristik politik luar negerinya yang cenderung konfrontatif terhadap AS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Penelitian ini mempunyai sejumlah permasalahan yang hendak dijawab. Seperti yang sudah dipaparkan pada bab awal penulisan tesis ini, permasalahan yang hendak dijawab itu menyangkut pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan presiden Mahmoud Ahmadinejad, bagaimanakah karakteristik politik luar negerinya dan mengapa Iran di bawah pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad mengambil sikap politik luar negeri yang konfrontatif terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya, khususnya terhadap AS.

Metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas, adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menyelidiki, memahami dan kemudian menjelaskan atau menganalisa sesuatu gejala yang diteliti dalam lingkungan masyarakat termasuk proses-proses sosial dan pola-pola perilaku yang terdapat dalam lingkungan masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selengkapnya Denzin dan Lincoln menyebutkan bahwa *qualitative research is analysis and understanding of the patterned conduct and social processes of society* (Denzin and Lincoln; 1994; 6). Penjelasan atas gejala yang diamati tersebut, tentulah dilakukan dengan mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal, sistematis dan rasional dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika. Tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang sedang diamati. Oleh karena penelitian kualitatif menjadikan data sebagai dasar bagi proses analisa, maka perlu dijelaskan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang terdapat dalam penulisan ini berasal dari data-data sekunder yaitu sejumlah informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data itu berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen dan media informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan atau analisis data.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Batasan Objek Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2009, yaitu semenjak Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden sampai dengan bulan Mei 2009, bertepatan dengan berlangsungnya pemilu presiden periode berikutnya. Sebagaimana diketahui presiden terpilih untuk periode berikutnya adalah orang yang sama, yaitu Mahmoud Ahmadinejad. Dengan demikian ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad jilid pertama.

3.2.2. Karakteristik Data

Kemudian untuk tidak terlalu bias, maka data-data atau dokumen yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini akan dibatasi pada materi-materi tertentu saja, yaitu :

- a. Terkait dengan data atau dokumen yang tujuannya menjelaskan secara rinci sejumlah faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Iran. Faktor-faktor tersebut meliputi dinamika politik dalam negeri (*internal*) dan dinamika politik internasional (*eksternal*). Dinamika politik dalam negeri yang dinilai berpengaruh besar terhadap politik luar negeri Iran, dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut :
 - Ideologi serta sistem politik dan pemerintahan Iran
 - Keadaan sosial dan ekonomi Iran
 - Geopolitik Iran
 - Keadaan militer Iran

Adapun dinamika politik internasional, yang dinilai berpengaruh besar terhadap politik luar negeri Iran, dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut :

- Dinamika politik dan keamanan regional (Instabilitas kawasan)
 - Dinamika politik global (Unilateralisme AS)
- b. Terkait dengan data atau dokumen yang tujuannya ingin menjelaskan secara rinci karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad periode 2005-2009.
 - c. Terkait dengan data atau dokumen yang tujuannya ingin menjelaskan secara rinci sikap konfrontatif politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa

pemerintahan Ahmadinejad. Sikap konfrontatif tersebut dilihat dari sejumlah pernyataan-pernyataan yang dikembangkan oleh presiden Ahmadinejad ketika menghadapi isu-isu kritikal yang bersinggungan dengan kepentingan nasional Iran.

3.3. Metode Penelitian

Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian haruslah disadari bahwa terdapat konsekuensi tersendiri sebagai sebuah proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari pendekatan tersebut. Sebuah pendekatan mengisyaratkan sejumlah kriteria untuk menyeleksi data yang dianggap relevan. Sebuah pendekatan mencakup di dalamnya standar dan cara kerja atau prosedur tertentu dalam proses penelitian, termasuk misalnya memilih dan merumuskan masalah, menjangkau data serta menentukan unit analisis yang akan diteliti dan lain sebagainya. (Azis; 2003; 18).

Dalam khazanah metodologi, sebuah pendekatan diakui selain mengandung sejumlah keunggulan juga memiliki kelemahan tertentu. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dan universal adanya. Karena itu memang harus disadari sejak awal. Meskipun demikian tidak berarti sebuah pendekatan menjadi tidak sah atau tidak penting untuk digunakan. Sebab persoalannya lebih terletak pada bagaimana menggunakan dan menempatkan sebuah pendekatan (dengan keunggulan dan kelemahan yang melekat padanya) dalam suatu studi dengan masalah yang relevan ditelaah menurut logika pendekatan tersebut. Dalam konteks ini peneliti diharapkan bersikap cermat memilih sebuah pendekatan agar benar-benar sesuai dengan masalah yang diangkat atau diajukan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label atau nama yang bersifat umum saja dari sebuah rumpun besar metodologi penelitian. Tetapi aspek-aspek yang bersifat kemetodean, dalam arti yang dapat dipraktikkan dalam kegiatan penelitian kualitatif, terdapat berbagai variasi atau jenis-jenis metode. Jenis-jenis tersebut yang utama misalnya adalah metode atau studi etnografi, studi grounded, studi life history, observasi partisipan dan studi kasus. Masing-masing studi ini memiliki karakteristik kemetodean dan teknik-teknik spesifik tersendiri dalam mendekati dan menelaah sebuah fenomena sosial. (Azis; 2003; 18).

Metode penelitian dalam pendekatan kualitatif cenderung menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa penjelasan dan penggambaran fenomena berdasarkan interpretasi yang logis dan rasional. Salah satu ciri khas dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah kuatnya penggunaan data sekunder sebagai sumber atau referensi bagi aktifitas interpretasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus sebagai pilihan untuk proses pembahasan masalah dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

3.3.1. Metode Studi Kasus

Bila kita melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, kita melakukan apa yang disebut studi kasus. Metode ini melibatkan peneliti dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu. Disamping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga dan berbagai unit sosial lainnya. Jadi studi kasus dalam khazanah metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian. Menurut Robert K Yin, yang dikutip dalam Abdul Azis S.R (2003), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. (Azis; 2003; 20). Studi kasus sebagai sebuah bentuk inkuiri tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama sekaligus pula tidak harus bergantung semata-mata pada data etnografi ataupun observasi partisipan. Bahkan seorang peneliti bisa saja melakukan studi kasus yang valid dan berkualitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, tergantung pada topik yang akan diselidiki. (Azis; 2003; 22). Masih dalam sumber yang sama, Robert K Yin mengintrodusir studi kasus itu lebih banyak berkuat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan apa/apakah (*what*) dalam kegiatan penelitian.

3.4. Unit Analisis

Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif perlu ditentukan apa yang menjadi unit analisa utamanya. Untuk itu, unit analisa utama dari penelitian yang dilakukan oleh

penulis ini adalah negara (*state*), yaitu Iran pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad dari tahun 2005 sejak ia terpilih, hingga tahun 2009. Kemudian variabel yang akan dibahas adalah menyangkut pada politik luar negerinya. Masa-masa pemilu presiden Iran menjelang terpilihnya Ahmadinejad sebagai pemenang pemilu adalah titik awal dari inti pembahasan dalam penulisan ini hingga pada kiprah politik luar negerinya pada tahun 2009, setidaknya sampai bulan Mei 2009 saat dilangsungkannya pemilu Presiden di Iran.

Obyek Kasus	Politik Luar Negeri Iran masa Pemerintahan Ahmadinejad 2005-2009
Unit Analisis	Politik Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat
Sub Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik luar negeri Iran 2. Kepentingan nasional Iran 3. Karakteristik politik luar negeri Iran 4. Konfrontasi dalam politik luar negeri Iran

3.5. Metode Pengumpulan Data

Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik. Penggunaan keenam sumber ini memerlukan keterampilan dan prosedur metodologis yang berbeda-beda (Yin; 1996; 101). Selain sumber-sumber di atas, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data studi kasus. Hal itu mencakup penggunaan :

1. Berbagai sumber bukti; yaitu bukti dari dua atau lebih sumber tetapi menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan yang sama.
2. Data dasar; yaitu kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus yang bersangkutan, dan;
3. Serangkaian bukti; yaitu keterkaitan yang eksplisit antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul dan konklusi-konklusi yang ditarik. (Yin; 1996; 101).

Data diperoleh dari sejumlah perpustakaan dan lembaga-lembaga kajian tertentu yang menyediakan sejumlah data terkait dengan tema penulisan. Data-data yang terkumpul kemudian dikelola dan dikategorisasi sedemikian rupa menurut

persepsi penulis, sehingga memudahkan dalam membangun sistematika penulisan. Dalam proses selanjutnya, data yang telah diperoleh dan telah dikategorisasikan itu akan menjadi penuntun bagi penulis untuk melakukan interpretasi atas data sekaligus menganalisa data.

3.6. Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan data

Pengabsahan data dilakukan dengan cara interpretasi berdasarkan pada hasil kategorisasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Pengabsahan data kemudian dilakukan sesuai dengan ketentuan serta berdasarkan pada kerangka analitik yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian agar pengabsahan data lebih terukur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka proses pembimbingan menjadi tahapan penting selanjutnya yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena metode yang digunakan adalah studi kasus, maka validasi dan pemeriksaan keabsahan data cenderung lebih banyak merujuk kepada sumber-sumber referensi yang digunakan.

3.7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kasus. Ketangguhan berpikir dari peneliti, penian bukti yang cukup serta pertimbangan seksama tentang interpretasi alternatif, merupakan ciri khas yang terdapat dalam metode analisis kasus. Atas dasar ini metode analisis kasus adalah strategi umum yang dilakukan peneliti untuk memperlakukan bukti secara wajar, menghasilkan konklusi analisis yang mendukung dan menetapkan alternatif interpretasi. (Yin; 1996; 134-135). Dalam metode analisis data ini, terdapat dua strategi umum, yaitu;

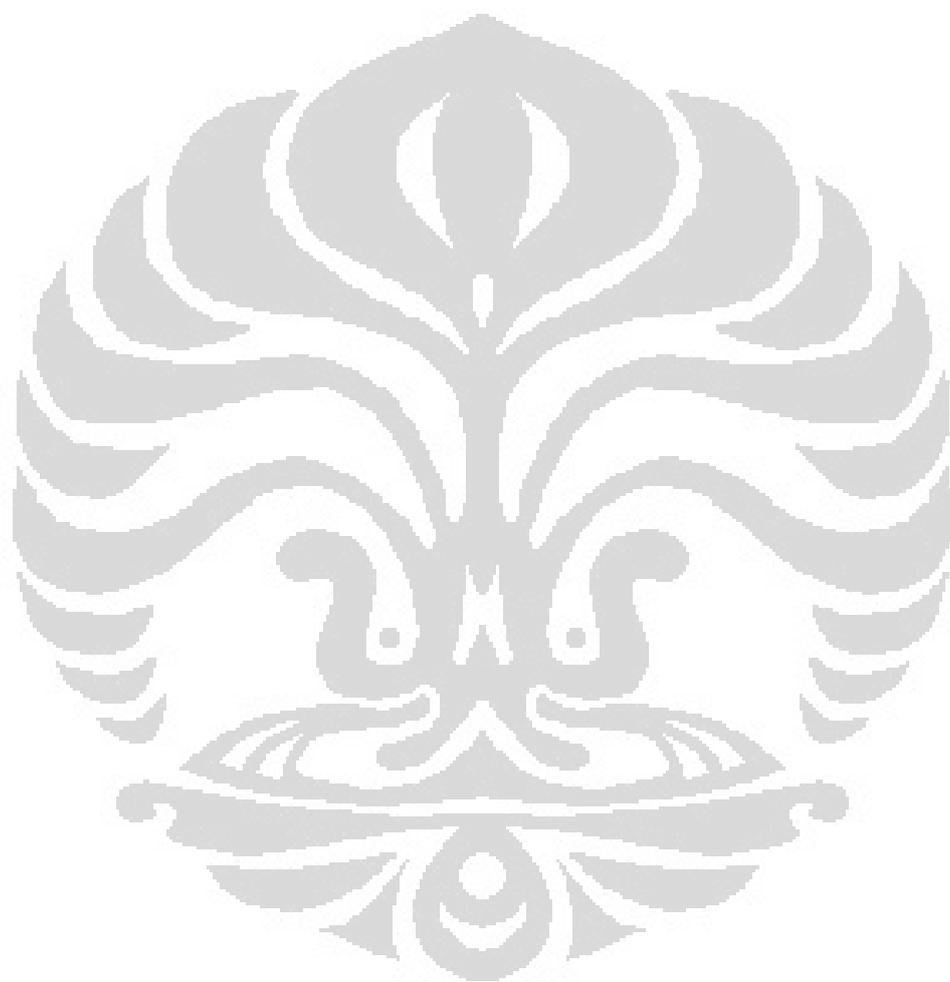
1. Mendasarkan pada proposisi teoritis.

Mendasarkan pada proposisi teoritis berarti memberikan prioritas pada analisis yang relevan. Peneliti sangat berorientasi pada proposisi teoritis yang dibangun sebelumnya dan berfungsi menuntun analisis studi kasus. Secara jelas proposisi-proposisi tersebut membantu agar lebih fokus perhatiannya pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain. Proposisi tersebut juga sangat membantu mengorganisasikan keseluruhan studi kasus dan menetapkan alternatif penjelasan yang harus diuji. Proposisi teoritis tentang hubungan-hubungan kausal serta jawaban-jawaban pertanyaan bagaimana dan mengapa, bisa sangat berguna untuk menuntun analisa studi kasus. (Yin; 1996; 136-137).

2. Mengembangkan deskripsi kasus.

Mengembangkan deskripsi kasus adalah suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus. (Yin; 1996; 136-137).

Melakukan interpretasi atas data yang ditemukan berdasarkan sumber referensi yang diperoleh menjadi bagian penting dalam analisis data kasus ini. Namun demikian, penelitian ini tetap mengacu pada analisis data kasus tertentu, yaitu hal-hal yang terkait dengan sikap, pikiran dan tindakan Iran pada era pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad antara tahun 2005 hingga 2009 terhadap AS. Begitupun, harus diakui bahwa terdapat sejumlah kebijakan politik yang diambil oleh Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad, tetapi dalam kasus ini penulis hanya akan memfokuskan analisisnya pada sikap dan tindakan Iran terhadap AS yang tujuannya adalah ingin mewujudkan kepentingan nasionalnya, tetapi kebijakan itu sendiri memberikan dampak serta reaksi yang besar dari negara-negara lain, termasuk ketika Iran mengembangkan program nuklirnya.



BAB IV

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI IRAN TERHADAP AMERIKA SERIKAT

Iran (atau dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Persia) merupakan sebuah Negara di kawasan Timur Tengah yang terletak di wilayah Asia Barat Daya. Negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, namun demikian hingga tahun 1953 Iran masih dipanggil Persia di kalangan dunia barat. Pada tahun 1959, Syah Mohammad Reza Pahlevi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran dikisahkan dari sebuah sebutan perkataan suku "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya".

Dalam sejarah perjalanannya, Iran sempat direbutkan oleh Rusia dan Inggris di abad ke-19. Kemudian pada abad ke-20, terjadi lima peristiwa besar yang mengubah sejarah Iran sampai sekarang. *Pertama*, Revolusi Konstitusional (1905 – 1911) yang merupakan sebuah gerakan demokrasi, anti feodal, anti imperialisme, dan dilakukan oleh kaum bangsawan, para Imam dan tuan tanah. *Kedua*, terjadinya kudeta oleh Reza Khan pada 21 Februari 1921, kemudian mengangkat dirinya menjadi raja dan mendirikan Dinasti Pahlevi sampai dijatuhkan pada tahun 1979. *Ketiga*, penghapusan perjanjian-perjanjian yang menyangkut minyak bumi sebagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan nasional. *Keempat*, Amerika Serikat menunjang pengangkatan rezim Shah untuk mengamankan kepentingan stok minyak buminya. Pada masa itu kaum oposisi dikejar dan ditindas. *Terakhir*, dan sampai sekarang masih sangat terkenal adalah sebuah revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini pada tanggal 12 Februari 1979 hingga mengubah Negara menjadi bentuk Republik Islam Iran, mengalami perubahan total dalam tatanan dan sistem politik yang sebelumnya berorientasi pada barat (Adi; 2007; 264).

4.1. Tinjauan Umum Politik Luar Negeri Iran

4.1.1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Iran kontemporer tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan revolusi Islam tahun 1979, bersamaan dengan berakhirnya rejim

Shah Pahlevi di negara tersebut. Ayatulloh Khomeini yang menggulingkan kekuasaan Reza Pahlevi melalui pagelaran eksekusi kolektif bernama Revolusi Islam Iran pada 11 Februari 1979 itu, telah menciptakan rangkaian keberhasilan, walaupun tetap ada ancaman besar di balik revolusi dahsyat tersebut.

Revolusi selalu meniscayakan perubahan substansial dan sangat mendasar pada sistem pemerintahan atau keadaan sosial sebagai sebuah konsekuensi. Di Iran, Revolusi '79 merupakan produk koalisi empat poros kekuatan raksasa, yakni nasionalis, nasionalis-Islamis, nasionalis-revolusionis, dan kubu tangguh Ayatulloh Khomeini. Dalam penataan ulang Iran setelah revolusi mengemukakan problema baru soal keputusan dilematis antara alternatif, memperluas penerapan sistem politik pengganti atau stabilisasi perekonomian nasional. Krisis perang saudara Iran-Irak (1980-1988) menjadi proyek tambahan yang menguji kesungguhan pengusung revolusi dan rakyat Iran sendiri untuk mampu menaklukkan keadaan kemudian bangkit bersama menyongsong era kegemilangan.

Proyek peruntuhan Dinasti Pahlevi telah dirintis setahun sebelum revolusi direalisasi melalui penguasaan kota-kota dan wilayah di Iran. Pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat begitu mengakar pada tata negara dan kebijakan Pahlevi. Tendensi tersebut benar dipahami pengusung revolusi sebagai akibat suksesnya lobi Zionis-Yahudi di AS yang kerap menelurkan kebijakan yang merugikan penganut Islam. Barangkali karena krisis Palestina tak bisa dilepaskan dari Yahudi, maka Khomeini pun menegaskan, "Salah satu target besar revolusi ini membebaskan kota Al-Quds dan tanah Arab, menyelamatkan Masjid Qubbatu Shakhrah, dan melakukan perlawanan terhadap penjajah-Zionis."

Sehari setelah pengambilan kekuasaan di Iran oleh poros revolusi pimpinan Khomeini, seluruh pejabat Kedutaan Besar Israel di Teheran diusir dari Republik Islam Iran. Pemerintahan baru itu menggantinya menjadi Kedutaan Besar Palestina dan menyerahkan mekanisme administrasi ke bangsa Arab. Sepertinya memang, pengusung revolusi menghendaki jalur konfrontasi menghadapi kebiadaban Yahudi. Pandangan mereka bahwa Zionis telah menggagahi hak kemanusiaan, menodai kehormatan Islam di Palestina, bahkan telah menganeksasi tanah milik rakyat Palestina.

Bila sasaran politik revolusi dicermati ulang, seperti yang pernah dilakukan analis Iran, Tafid Daud Abu Khair, pada majalah al-Munadhil, edisi 296 tahun 1999, terlihat ada enam bundel proyek revolusi 1979 - sebagian sudah terwujud - sebagai berikut: krisis Palestina (membebaskan Al-Quds dan memelihara tempat-tempat suci di Palestina); teritorial Lebanon (membebaskan Lebanon Selatan); piagam internasional (penegasan peranan PBB dan Majelis Umum); penyatuan bumi Irak (menjaga kedaulatan dan wilayahnya); konfrontasi Arab-Israel (Iran berperan mengkanal skenario politik AS dan Israel); serta fungsi Iran membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab. Tafid ingin menegaskan, di atas krisis Palestina sesungguhnya terdapat proyek yang jauh lebih besar bagi Iran, yaitu kepentingan revolusi Iran menanamkan hegemoni Syiah di seluruh dunia.

Membicarakan politik luar negeri Iran akan menghantar kita pada realita pentahapan sejarah yang terbagi menjadi empat dekade, sebagaimana paparan Dr. Birn Izdy, Mantan Petinggi di Kementerian Luar Negeri Iran, dalam bukunya, *"Madkhal Ela Al-Siyasah Al-Kharigiyah Li-Gumhouriyat Eiran Al-Eslamiyah"*, 1999. Fase pertama: 1979-1980, dimana kubu liberal-konservatif memegang kebijakan neo-konservatif dalam upaya menjalin hubungan bilateral antara Iran dan masyarakat internasional. Fase kedua: 1980-1988, yang bisa disebut sebagai fase radikal pola interaksi Iran kepada bangsa dunia tanpa mengindahkan mediasi pemerintahan, yang justeru mengakibatkan instabilitas dalam negeri Iran. Fase ketiga: 1988-1997, menunjukkan sikap moderat, menerapkan pola santun strategi luar negeri Iran, dan obsesi memperbaiki serta meningkatkan harmonisasi hubungan bilateral. Presiden Hasyemi Rafsanjani bersama Menlunya Dr. Ali Akbar Vilayati berhasil menata kembali keretakan hubungan Iran dengan masyarakat dunia. Beberapa pointer yang dicapai, antara lain: eksistensi pemerintahan Revolusi Iran mendapat pengakuan negara-negara Kawasan Teluk Arab; pencabutan isolasi masyarakat internasional atas Iran setelah revolusi; penerimaan Barat dan dibukanya pangsa pasar Eropa; legalisasi dunia atas revitalisasi angkatan perang Iran; penyebaran pemikiran revolusi melalui kran kebudayaan; dan, Iran diajak menyelesaikan krisis di Afghanistan dan kawasan Timteng. Fase keempat: 1997-2005, semasa Dr. Muh. Khatami berkuasa.

Pandangan reformisnya seringkali menimbulkan konflik internal dengan kubu konservatif yang loyal memelihara amanat revolusi Syiah. Ini pulalah yang menjadi akar carutmarutnya pemerintahan dalam negeri Khatami. Lain halnya mengenai iklim politik luar negeri Iran, Khatami benar-benar lentur terhadap Barat bahkan untuk pertama kalinya ia mengadakan kontak politik dengan Moshe Katsav, Presiden Israel, April 2005, hal yang tak pernah dilakukan pendahulunya semenjak revolusi ditabuh.

Selain paparan Dr. Birn Izdy, ada imbuhan dari Adel El-Gogary, Pemred al Ghad al Araby, (Adel El-Gogary, "Ahmadinejad; Rajulun fi Qalbi al-Ashifah", 2006) yang menyoroti sosok kharismatik Ahmadinejad. Dan, ini menjadi Fase kelima: 2005-2009, dimana Nejad mengambil strategi politik luar negeri berseberangan dengan Khatami. Ahmadinejad dikenal loyalitasnya memegang ajaran Imam Khomeini terlebih menyoal konfrontasi terhadap Zionis-Yahudi. Satu hal yang barangkali berbeda, tulis El-Gogary, bahwa Iran pada tanggal 29 Oktober 2005 mengeluarkan statemen akan menaati piagam PBB untuk tidak menggunakan kekuatan militer menyerang negara lain, tanpa terkecuali Israel. Iran bisa ditebak hanya memainkan penyelesaian damai berseteru dengan Israel.

Pada saat perang Iran-Irak juga sangat menentukan arah kebijakan politik luar negeri Iran. hubungan kurang harmonis yang di jalin dengan sesama negara timur tengah tersebut juga disinyalir karena terdapat intervensi AS. pada perang delapan tahun Iran-Irak, AS memang banyak mensuplai persenjataan ke Irak.

Mengawali abad ke 21, Iran berada di bawah kepemimpinan Mohammad Khatami yang dikenal reformis. Khatami berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang cenderung konservatif dan menutup diri khususnya dengan negara-negara Barat. Khatami mengupayakan upaya diplomasi khususnya dalam mensosialisasikan program nuklir damai Iran. Namun selama kepemimpinan Khatami, Iran dianggap cenderung bersifat lunak terhadap Barat yang selama ini terlalu dinilai mencampuri masalah dalam negeri Iran, khususnya dalam masalah nuklir.

Sistem pemerintahan Islam Iran memang sangat menolak hegemoni AS. hubungan buruk Iran dengan AS, memicu Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran yang menyatakan Iran tidak akan berkompromi dengan AS.

Menurutnya AS hanya menginginkan Iran meninggalkan nilai-nilai Islam dan menekan Iran agar pemerintah tunduk pada negara adikuasa tersebut. Hubungan buruk tersebut tidak hanya tercermin dari respon AS terhadap program nuklir Iran. AS juga menuduh Iran sebagai negara pelindung terorisme bahkan secara ekstrem menyebut Iran sebagai salah satu negara poros setan "*axes of evil*".

Iran dengan ideologi Syi'ahnya tersebut sangat menekankan kemandirian suatu negara Islam, dan berkeinginan melepaskan seluruh rakyat tertindas dari penjajahan bangsa kuat. Politik luar negeri Iran sangat menekankan kepada upaya membangun kekuatan negara dengan menjalin hubungan dengan negara-negara yang bisa memberi kemajuan untuk Iran. Iran juga erat menjalin hubungan dengan negara-negara poros Komunis, seperti Rusia dan Cina yang secara ideologi sangat bertentangan dengan AS. Bahkan akhir-akhir ini hubungan bilateral yang semakin diperkuat, juga dilakukan dengan negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Argentina dan Brazil.

Program nuklir Iran merupakan salah satu upaya yang terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik Iran. Iran juga merupakan negara yang anti dengan ideologi seperti Kapitalis-Liberal ataupun Komunis, sebagaimana semboyan Imam Khomeini, "tidak Timur tidak Barat tapi Islam". Satu-satunya Ideologi yang menjadi acuan bagi arah politik luar negeri Iran adalah ajaran Islam. Namun Iran tetap tidak tertutup dengan ideologi keagamaan tersebut, karena jalinan hubungan internasional yang tetap dilakukan Iran.

Iran juga aktif dengan keorganisasian internasional hal tersebut membuktikan Iran sama sekali tidak menutup diri dari pergaulan internasional, dan Iran justru semakin memperluas hubungan bilateralnya dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin hingga Asia. Iran yang baru-baru ini melepaskan pelaut Inggris yang secara nyata melewati batas perairan Iran, telah menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Iran sangat menekankan upaya-upaya diplomatis dalam menjalankan politik luar negerinya, dan justru sangat memihak pada upaya damai ketimbang memicu munculnya kontra-persepsi.

4.1.2. Politik Luar Negeri Iran pada masa Awal Pemerintahan Ahmadinejad

Dinamika Politik luar negeri Iran harus dilihat ke belakang, ketika Ahmadinejad baru saja terpilih sebagai presiden ke sembilan Republik Islam Iran. Pada masa-masa itu, terjadi krisis yang serius dalam hubungan luar negeri Iran dengan Barat. Krisis ini berpulang pada masalah program nuklir Iran. Barat tidak setuju Iran menguasai teknologi nuklir, sekalipun untuk tujuan damai. Waktu itu, kebijakan politik luar negeri Iran terkait isu nuklir lebih toleran mengikuti keinginan Barat. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Iran. Melihat kesempatan itu, AS dan sekutunya mempretensikan Iran dalam posisi lemah. Pada masa kampanye pemilihan presiden Iran yang ke sembilan, media-media Barat berusaha meyakinkan rakyat Iran bahwa seandainya Ahmadinejad terpilih menjadi presiden, hubungan Iran dengan Barat akan memasuki babak-babak terburuknya. Konflik Iran dengan Barat menjadi tidak terhindarkan.

Rakyat Iran ternyata tidak peduli dengan propaganda media-media Barat dan tetap mengikuti pemilihan umum. Hasilnya Ahmadinejad terpilih menjadi presiden Iran yang kesembilan. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah Ahmadinejad mencari solusi keluar dari tekanan Barat yang dimotori AS. Pemerintah Ahmadinejad tidak memilih kebijakan asal selamat dan mundur dari tekanan Barat, melainkan bersikukuh memperjuangkan prinsip-prinsip dan cita-cita revolusi sejalan dengan keinginan bangsa Iran. Rakyat Iran menuntut hak-haknya terkait dengan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Keinginan ini yang diperjuangkan oleh pemerintah Ahmadinejad hingga akhir dua tahun pertama masa jabatannya. Berdasarkan alasan-alasan inilah, sejak awal, pemerintah Ahmadinejad menolak politik hegemoni Barat yang bertujuan menghalangi Iran menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah Ahmadinejad memilih kebijakan menentang hegemoni Barat.

Krisis nuklir Iran berubah menjadi masalah internasional berkat tekanan dan konspirasi yang dilakukan Amerika dan sekutunya. Hal ini membuat pemerintah Ahmadinejad pada tahun pertama di bidang politik luar negerinya tidak diberi pilihan lain. Pemerintahnya mengkonsentrasikan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dari sini, masalah nuklir menjadi fokus utama diplomasi Iran. Tidak diragukan lagi, penguasaan teknologi nuklir sangat strategis

bagi pengembangan dan kemajuan sebuah negara. Namun, kebijakan politik luar negeri Iran berhasil mengubah masalah ini menjadi simbol perjuangan rakyat Iran menentang hegemoni Barat. Krisis nuklir Iran menjadi ujian bagi rakyat dan pejabat pemerintah untuk mengukur seberapa besar mereka membela kemandirian politik luar negeri Iran.

Dalam sebuah kesempatan, Ahmadinejad, dalam pertemuannya dengan para pemuda berprestasi Iran menjelaskan masalah ini. Ia mengatakan, "Sejak kemenangan Iran, musuh-musuh rakyat Iran tanpa kenal lelah berusaha menghalang-halangi kemajuan bangsa Iran. Sekitar tiga dekade belakangan ini, upaya itu diwujudkan dengan boikot, perang dan teror untuk melemahkan Iran. Saat ini, hegemoni Barat berhadapan dengan Iran dalam masalah nuklir. Barat khawatir bila Iran mampu meraih semua tujuan yang diinginkannya di bidang pemanfaatan damai energi nuklir, Iran akan menjadi simbol bagi seluruh negara berkembang. Masyarakat tertindas di dunia akan meniru apa yang telah dicapai oleh bangsa Iran dan akan mempermasalahkan otoritas monopoli sejumlah negara atas energi nuklir. Atas dasar ini, dalam dua tahun terakhir ini, Amerika, sejumlah sekutu Eropanya dan rezim zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk menghentikan program damai energi nuklir Iran."

Ada dua hal yang membuat pemerintah Ahmadinejad memperkuat politik luar negerinya. Pertama, tekanan dan serbuan yang luas dari hegemoni Barat dan peran vital energi nuklir dalam kemajuan dan pembangunan negara mengharuskan pemerintah Ahmadinejad memperkuat politik luar negerinya. Terlebih lagi, saat melihat keinginan kuat rakyat Iran untuk mendapatkan haknya memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listriknya. Kemampuan politik luar negeri Iran untuk keluar dari tekanan Barat dalam masalah nuklir mengubah stigma sebelumnya. Saat ini, kemampuan nuklir Iran berubah menjadi sebuah kekuatan diplomatik dalam politik luar negeri Iran dengan dunia internasional. Hal itu karena kemajuan pesat Iran di bidang ekonomi, budaya dan sosial ditambah sekarang Iran telah menjadi salah satu kekuatan nuklir dunia. Saat ini, masalah nuklir Iran menjadi kekuatan diplomasi pemerintah Ahmadinejad.

Politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi Iran

dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Iran menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Kemampuan Iran diakui oleh tokoh-tokoh Barat yang menasehati Gedung Putih agar tidak memandang sebelah mata peran dan posisi Iran di Timur Tengah. Perundingan segi tiga Baghdad menunjukkan posisi Iran sangat menentukan di peta politik Timur Tengah. Perundingan segi tiga terlaksana setelah permintaan resmi Amerika dan desakan pemerintah Irak. Satu hal yang menggembirakan, ketika Timur Tengah menjadi pusat konsentrasi tekanan politik dan militer Amerika dan sekutunya terhadap Iran, keberhasilan diplomasi Iran lebih mendominasi. Pejabat-pejabat tinggi Irak lebih menganggap Iran sebagai negara sahabat dan lebih dekat dengan mereka. Usaha Amerika untuk merusak hubungan ini selalu menemui jalan buntu.

Di kawasan Teluk Persia, politik luar negeri Iran yang aktif dan cerdas ditambah kunjungan Presiden Mahmud Ahmadinejad ke Arab Saudi dan Emirat Arab memperkuat hubungan Iran dan negara-negara di sekitar Teluk Persia. Pada saat yang sama, kunjungan pejabat-pejabat tinggi Amerika, khususnya Condoleezza Rice dan Robert Gates, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Amerika, gagal mengajak negara-negara Arab memusuhi Iran. Di Afghanistan, Hamid Karzai, Presiden Afghanistan, membela hubungan mesra Iran dan Afghanistan. Pembelaannya disampaikan saat kunjungannya ke Amerika. Kalangan politisi dan media Barat menilai itu sebagai kemenangan lain diplomasi Iran di kawasan.

Kebijakan politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah dan seluruh negara-negara Islam berlandaskan upaya mewujudkan persatuan di dunia Islam. Kunjungan-kunjungan Presiden Ahmadinejad ke negara-negara seperti Suriah, Malaysia, Azerbaijan, Tajikistan, Qatar, Sudan, Emirat dan Arab Saudi bertujuan mewujudkan persatuan negara-negara Islam. Menteri Luar Negeri Iran, Manucher Mottaki di tahun pertama menjabat telah mengunjungi 21 negara dan tahun kedua 26 negara-negara Islam.

Ketika Ahmadinejad bertemu dengan Ayatullah Khamenei dan para pemimpin lain di Mahkamah Agung, dua tahun setelah kepemimpinannya,

terdapat pujian atas apa yang dicapai Ahmadinejad selama dua tahun. Dalam pertemuan itu Ayatullah Khamenei berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keinginan rakyat, kemajuan negara dan mempertahankan keberhasilan politik luar negeri. Dalam pertemuan lainnya dengan jajaran kementerian luar negeri dan duta-duta besar Iran di luar negeri, pemerintah Ahmadinejad kembali mengingatkan kebijakan politik luar negeri Iran. Iran tidak menerima hubungan dengan kekuatan yang ingin mendikte. Iran menjalankan kebijakan politik luar negerinya secara cerdas dan realistis menghadapi sistem hegemoni dunia. Pemerintah Ahmadinejad berkewajiban melindungi prinsip-prinsip revolusi Islam, identitas dan kepentingan nasional. Hal yang ditekankan oleh Ayatullah Khamenei bahwa Revolusi Islam bertujuan mewujudkan program-program politik, ekonomi, sosial dan budaya Islam. Politik luar negeri Iran dan hubungan internasional harus dibangun berlandaskan syariat Islam. Agama Islam menolak sistem hegemoni sejumlah negara yang sewenang-wenang. Islam mengajarkan perdamaian, keamanan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

4.1.3. Proses Pengambilan Keputusan

Tonggak kekuasaan tertinggi di Iran dipegang oleh seorang Pemimpin Agung. Beliau mempunyai tanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran dan mempunyai wewenang dalam melantik ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara serta enam dari dua belas anggota *Majelis Wali Iran*. Di samping itu, ia merupakan sebagai ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran serta mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang.

Orang penting nomor dua dalam pemerintahan Republik Islam Iran yaitu Presiden. Presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan mempunyai hak kuasa selama empat tahun. Para calon presiden harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dilaksanakan agar mereka sesuai dengan gagasan negara Islam yang diterapkan. Presiden mempunyai tanggung jawab dalam memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Akan tetapi presiden tidak mempunyai kuasa atas perkara-perkara yang terdapat di bawah kekuasaan Pemimpin Agung.

Presiden juga mempunyai wewenang untuk melantik dan mengepalai Kabinet Iran, serta mempunyai kuasa dalam membuat keputusan mengenai administrasi negara. Badan eksekutif itu sendiri di dalamnya mempunyai delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam hal administrasi, dan mereka semua harus mendapat persetujuan badan perundangan terlebih dahulu. Tidak seperti negara-negara pada umumnya, badan eksekutif Iran tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, akan tetapi presiden mempunyai kuasa untuk melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan tentunya harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan terlebih dahulu.

Ditinjau dari segi parlemennya, Iran mempunyai empat Majelis Besar yaitu di antaranya Majelis Wali, Majelis Kebijakan, Majelis Perundangan Islam dan Majelis Ahli. Majelis Wali memiliki dua belas ahli undang-undang dan enam dari mereka dilantik oleh Pemimpin Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam anggota selebihnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau *Majles*. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.

Sedangkan Majelis Kebijakan mempunyai kuasa untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan Majelis Wali Iran. Majelis ini juga turut menjadi penasihat Pemimpin Agung. Kemudian Majelis Perundangan Islam (*Majles-e Shura-ye Eslami*) mempunyai 290 anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua calon Majelis dan ahli undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali. Dan yang terakhir, Majelis Ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan memilih untuk jabatan Pemimpin Agung dan juga berkuasa untuk memecatnya. Majelis-majelis tersebut akan dipilih secara umum untuk bertugas selama empat tahun di semua kota dan

desa. Kekuasaan majelis itu sendiri terbilang sangat luas, dari melantik pimpinan kota hingga menjaga kepercayaan rakyat.

Dari aspek yuridis, Ketua Kehakiman, Ketua Penuntut Umum dan Mahkamah Agung di Iran dilantik oleh Pemimpin Agung. Terdapat beberapa jenis mahkamah di Iran seperti Mahkamah Umum yang mempunyai tanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Selain itu juga, ada yang disebut dengan Mahkamah Revolusi yang mempunyai wewenang untuk mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.

Proses pengambilan keputusan dalam bidang politik luar negeri di Iran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara demokrasi lainnya. Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk memilih dan menjalankan arah dan orientasi kebijakan, tetapi tetap harus mendapat persetujuan Parlemen/Majlis Wali Iran. Bedanya adalah Presiden Iran bisa secara langsung memilih opsi tentang arah dan orientasi politik luar negeri tanpa persetujuan parlemen, asalkan Presiden telah mendapat restu Pemimpin Agung. Jalur birokratik sangat melekat dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri di Iran, sebagaimana juga terdapat pada negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Arah dan orientasi politik luar negeri Iran sangat mudah untuk dipahami dengan melihat siapa yang menjadi Presidennya. Jika yang menjadi Presiden adalah dari kalangan Konservatif, seperti Ahmadinejad maka politik luar negerinya akan sangat bertentangan dengan segala kepentingan politik luar negeri AS dan Israel serta. Artinya Iran akan senantiasa non-koperatif dengan AS dan Israel. Konservatisme yang dibangun oleh Ahmadinejad sebenarnya hanya ditujukan terhadap AS, Israel dan negara-negara Barat yang mengikuti kemauan AS, tidak demikian halnya negara-negara Islam serta pola hubungan multipolarisme. Kemudian, jika Presidennya adalah dari kalangan Moderat, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Presiden sebelum Ahmadinejad, yaitu Hashemi Rafsanjani maka politik luar negerinya cenderung lebih moderat dalam arti kooperatif dengan AS dan negara-negara Eropa yang mengikuti kemauan AS. Rafsanjani lebih mengedepankan perundingan-perundingan dibandingkan dengan tampilan politik luar negeri yang keras, apalagi menentang arus politik dunia.

Jika ditarik kesimpulan, maka komponen-komponen utama dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri di Iran adalah tiga kekuatan lembaga pemerintahan, yaitu Presiden-Pemimpin Agung dan Parlemen. Ketiga lembaga pemerintahan inilah yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik luar negeri tersebut.

4.2. Konfrontatifisme dalam Politik Luar Negeri Iran terhadap AS

Selama satu dekade terakhir, lewat kekuatan sistem diplomasi, kekayaan minyak, keberanian, dan semangat nasionalisme religiusnya, Iran merasa tidak pernah butuh dan tertarik terhadap bantuan Amerika. Sebaliknya, Iran semakin bangga dengan kecaman-kecaman Amerika. Bahkan, Ahmadinejad, Presiden Iran saat ini, dengan lantang menyatakan bahwa tidak ada gunanya penyelesaian konflik AS-Iran lewat diplomasi, yang berguna adalah konfrontasi, dan sikap anti imperialisme dan hegemoni terhadap Barat.

Sikap anti arogansi dan hegemoni Iran ini sebenarnya didasarkan pada satu fakta sejarah hubungan politik yang buruk dan tidak resiprokal antara AS-Iran. Yaitu peristiwa kudeta atas perdana menteri Iran Dr. Mohammad Mosaddeq pada tahun 1953, yang dilakukan oleh Amerika lewat CIA bekerjasama dengan Britania SIS. Britania dan Amerika meruntuhkan pemerintahan Front Nasional Mosaddeq demi tujuan menentang kebijakan nasionalisasi minyak Iran dan kebijakan diplomasi terusan Suez.

Peristiwa kudeta terhadap Mosaddeq ini memunculkan sikap anti Barat di masyarakat Iran, rakyat Iran merasa dikhianati dan didhalimi oleh AS. Dimana perasaan tertindas dan rasa ketidakadilan ini pada akhirnya memuncak dan melahirkan Revolusi Islam Iran yang dikomandoi oleh Imam Khomeini.

Lewat revolusi Islam, Negara Republik Islam Iran (RRI) menjadi Negara anti Amerika, memutus hubungan diplomatik dengan Amerika, mengambil alih kedutaan AS, membakar bendera AS, menyandera kedutaan, menolak keberadaan Israel, dan kembali kepada pentingnya religiusitas dan etika. Iran juga anti terhadap liberalisme, materialisme ala Amerika.

Buku karya Ali M Ansari --seorang Professor kajian Timur Tengah di University of St Andrews dan peneliti di program Timur Tengah Chatham House

London—yang semula berjudul *Confronting Iran* ini ingin mendedahkan secara historis fakta hubungan Iran-AS dalam konteks kemerosotan kerajaan Iran dan kebangkitan nasionalisme religius, juga sikap Iran atas berbagai kebijakan-kebijakan Amerika yang berujung pada konfrontasi yang berevolusi hingga sekarang.

Secara historis, hubungan Iran-AS tidaklah berjalan se-ekstrim sepuluh tahun terakhir, sejarah hubungan Iran-AS juga pernah berlangsung mesra dalam berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan militer. Sebelum berujung pada hubungan yang konfrontatif yang berlangsung hingga sekarang.

Dengan pendekatan historis kronologis, Ali M. Ansari menunjukkan fakta bahwa hubungan Iran-AS diawali dengan sebuah hubungan diplomatik yang mesra, demi menyelamatkan keuangan kerajaan Iran yang kacau. Amerika pada tahun 1911 mengirimkan Morgan Shuster—seorang Bankir Niaga Amerika— ke Iran, dan seorang penasehat ekonomi, Arthur Chester Millspaugh, demi memimpin keuangan kerajaan di Iran. Di bawah tangan Shuster dan Millspaugh keuangan Iran berkembang dengan pesat, ekonomi Iran mulai terbangun dan Iran mulai menjalin hubungan perdagangan dengan Barat.

Amerika, bersama Rezim Reza Shah, telah membawa kebangkitan perekonomian Iran, akibat dukungan dana yang besar dari Amerika dan sikap Rezim Reza Shah yang pro-Israel. Bahkan, Reza Shah sempat menjadi Kaisar minyak dunia, melakukan banyak investasi di luar negeri. Shah bahkan berambisi ingin meletakkan Iran dalam posisi yang sejajar dengan Britania dan Amerika. Di masa ini pula Amerika dan sekutu mendukung program nuklir Iran, dengan asumsi agar tenaga listrik Iran tercukupi dan agar minyak bisa tereksplorasi lebih besar. Amerika menandatangani perjanjian memasok uranium selama 10 tahun dengan Iran, sementara Perancis memberi bantuan SDM dan Britania berupa pendanaan.

Hubungan Iran-AS kembali mencuat pada pergantian Abad ke-20. Saat itu Iran merasa tidak nyaman dengan cara perdagangan Barat, yang cenderung menggunakan kekuatan-kekuatannya untuk berebut minyak di Iran. Iran pun ingin melepaskan diri dari manipulasi politik Rusia dan Britania Raya, yang saat itu berebut kekayaan di Iran. Iran memandang bahwa posisi Amerika sebagai sebuah

peluang untuk melepaskan diri dari manipulasi politik Rusia dan Britania Raya. Hubungan Iran-AS kembali berlangsung mesra, dengan berbagai program pengembangan ekonomi, pendidikan, budaya dan politik Iran.

Peristiwa kudeta 1953 terhadap Mosaddeq benar-benar menjadi momentum buruk hubungan Iran-AS. Bantuan AS yang memajukan perekonomian Iran dengan dibarengi penjajahan kapitalisme dan materialisme dianggap oleh rakyat Iran sebagai godaan setan. Kebencian rakyat Iran tidak dapat dicegah akibat benturan peradaban ini. Dan lahirlah Revolusi Iran dengan ditandai berdirinya Negara Republik Islam Iran. Sebuah negara dengan semangat keberanian tinggi yang diikuti dengan nasionalisme religius yang tinggi. Sumbangan AS lewat Shuster, Millspaugh dan kemajuan-kemajuan ekonomi yang diraih Rezim Reza Shah tidak ada nilainya di mata rakyat Iran. Rakyat Iran tidak percaya lagi pada sistem hukum yang dibangun oleh Barat.

Pasca wafatnya Imam Khomeini pada tahun 1989, beberapa upaya pemimpin baru Iran untuk mencoba membangun kembali hubungan AS-Iran selalu gagal. Rafsanjani, berusaha mereda konfrontasi AS-Iran lewat jalan nasionalisme, realisme dan visi ekonomi. Begitu juga Mohammad Khatami, lewat gerakan reformasi, dialog komunikasi internasional dengan prinsip kebebasan dan demokrasi Islam. Namun, semua upaya tersebut gagal sebab sikap Iran yang anti Israel.

Karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS, sebagaimana yang telah disebutkan di atas sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai arah politik luar negeri yang tergolong konfrontatif. Makna revolusioner, reaksioner dan rasionalis yang terkandung dalam karakter tersebut cenderung bermuara pada sikap yang konfrontatif. Sikap konfrontatif dalam politik luar negeri adalah serangkaian pilihan tindakan dalam mana visi, misi dan kepentingan nasional yang dilaksanakan oleh satu negara dengan negara lain pada domain internasional mengalami benturan, sehingga potensi konflik lebih dominan terjadi dalam interaksi dibandingkan dengan aspek kerjasama. Satu pihak cenderung memposisikan pihak lain sebagai lawan, demikian juga sebaliknya. Masing-masing pihak dianggap dapat mengancam kehormatan, kadaulatan, eksistensi dan survivalitas negaranya, sehingga pilihan konfrontasi adalah opsi terbaik.

Ada sejumlah alasan yang membuat Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad lebih memilih konfrontasi terhadap AS ketika menjalankan politik luar negerinya. *Pertama*, karena Iran masih menempatkan AS sebagai negara yang cenderung menghambat kepentingan nasional, kemajuan dan progresifitas Iran dalam berbagai segmen bernegara. Perspektif Iran yang demikian ini cukup beralasan, karena kedua negara mempunyai catatan historis yang buruk, terutama sejak tumbanganya rejim Shah dukungan AS di Iran oleh Imam Khomeini pada tahun 1970an. Selain dari pada itu, Iran menyimpan kekesalan yang luar biasa terhadap AS sebagai akibat dari pemberlakuan sanksi atau embargo ekonomi dan militer terhadap Iran pada satu dasawarsa terakhir. *Kedua*, karena dalam pandangan Iran, sikap, perilaku dan tindakan AS dalam domain internasional tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Iran. Hal utama yang dianggap tidak sejalan itu adalah karena praktek hegemoni, ketidakadilan dan dominasi power yang dijalankan AS selama ini lebih mengemuka dibandingkan dengan praktek yang bersahabat. Dalam pandangan Iran, AS sama sekali tidak menginginkan kemandirian dan kemajuan Iran. *Ketiga*, karena Iran merasa negaranya memiliki modal untuk paling tidak bisa menyamai dan mengimbangi pengaruh AS, terutama pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, baik secara ekonomi maupun politik. Kemajuan dalam hal penguatan militer Iran serta posisi strategisnya di kawasan Timur Tengah, ditambah dengan kekayaan sumberdaya mineralnya (minyak) dapat dikategorikan sebagai modal power untuk mengambil opsi konfrontasi tadi. *Keempat*, Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad mempunyai dukungan politik, baik secara nasional maupun regional, sehingga opsi konfrontatif dengan AS menjadi lebih beralasan. Kemenangan mutlak yang diperoleh Ahmadinejad pada pemilu presiden 2005 merupakan modal besar, kemudian dukungan regional yang diperolehnya juga cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan isu Israel dan Palestina. Iran selalu mendapat dukungan dari negara-negara islam di kawasan tersebut tatkala dihadapkan dengan isu Israel dan kemerdekaan Palestina. *Kelima* atau yang terakhir adalah karena Iran sangat percaya diri dengan disokong oleh segenap kekuatan nasional yang dimilikinya. Kemudian disokong juga oleh pengalaman selama masa isolasi internasional yang diberlakukan AS terhadap Iran. Iran telah membuktikan dirinya mampu bertahan

dalam masa isolasi internasional yang dimotori oleh AS sehingga pilihan konfrontatif dianggapnya menjadi pilihan yang tidak menimbulkan resiko besar.

Konfrontasi dalam politik luar negeri Iran terhadap AS pada era kepemimpinan Ahmadinejad, ternyata bukanlah sekedar basa-basi. Meskipun sesungguhnya pernah terjadi upaya-upaya perbaikan hubungan diantara keduanya. Hal ini terbukti ketika terdapat upaya-upaya konstruktif yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mendamaikan hubungan kedua negara. Momentum itu bisa dilihat pada awal tahun 2009, ketika Barack Obama menjadi presiden AS. Namun demikian, titik terang kearah perbaikan hubungan tetap saja belum bisa diwujudkan. Pemerintah Iran optimistis hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain, termasuk Iran, akan membaik di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Hal ini pernah dikatakan Menlu Iran Manoucher Motakki. Ia mengatakan, apabila Pemerintah AS menjalankan semua janji yang diucapkan Obama sebelum ia terpilih, itu adalah kabar baik. (Kompas, 12 Pebruari 2009). Ketika berkampanye tahun lalu, Obama mengusulkan diadakan perundingan langsung dengan Iran, dan minggu ini ia kembali mengatakan sedang mencari kesempatan untuk melakukan hal itu asal Iran mau mengirim isyarat-isyarat yang positif.

Komentar Motakki itu dikeluarkan satu hari setelah Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyatakan Iran siap untuk berunding dengan Amerika dalam suasana saling menghargai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, AS harus menghentikan tuduhan-tuduhan tentang apa yang disebutnya kesalahan Iran supaya perundingan bisa berlangsung. Berita dari AS dan Iran itu segera mendapat sambutan pihak lain. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, ia akan mendorong Pemerintah AS untuk segera berunding dengan Iran guna menyelesaikan kontroversi tentang program nuklirnya. Komentar-komentar itu merupakan pertanda membaiknya hubungan di antara kedua negara yang putus 30 tahun lalu semenjak revolusi menggulingkan Shah Reza berhasil dilakukan pada tahun 1979.

Dari media dalam negeri Iran, Situs Pemberitaan Asriran juga melaporkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS mengakui Iran sebagai pemain penting di kawasan Teluk Persia dan Asia Selatan. Ketika ditanya mengenai

kecenderungan pemerintah AS untuk melakukan hubungan langsung dan pernyataan kesiapan Ahmadinejad untuk berunding dalam suasana saling menghargai, Robert Wood mengatakan, "Presiden Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton telah menjelaskan sikap-sikapnya soal perundingan dengan Iran. Kami benar-benar menghendaki perundingan dengan Tehran." Asriran dalam laporan lainnya menyebutkan, Emile Nakhleh, seorang analis dan mantan agen Badan Intelijen AS (CIA) mengatakan, "Washington sebelum memulai perundingan dengan Teheran, harus mengakui Iran sebagai kekuatan di kawasan." (Kompas, 12 Pebruari 2009).

Hingga tahun 2006, Emile bertanggungjawab di bidang Program Analisa Strategi Politik Islam di CIA. Ia baru-baru ini menulis buku tentang hubungan AS dengan dunia Islam. Sementara itu, Majalah Time ketika mengomentari perundingan dengan Iran, mengklaim, "Dalam beberapa hari ini, ada dua pesan kontradiktif dari - pejabat-pejabat Iran mengenai hubungan Iran dan AS." Majalah tersebut melaporkan, Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani dalam konferensi pers di Munich memberikan pernyataan keras anti-AS. Namun beberapa hari setelah itu, Ahmadinejad dalam peringatan Hari Kemenangan Revolusi Islam Iran ke-30 menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan AS. (Kompas, 12 Pebruari 2009). Menyaksikan perkembangan isu hubungan AS dan Iran, Teheran berdasarkan kebijakan dasar luar negerinya menghendaki hubungan baik dengan seluruh negara kecuali Rezim Zionis Israel. Pada dasarnya, Republik Islam Iran membuka peluang untuk menjalin hubungan dengan negara manapun, termasuk AS. Akan tetapi peluang tersebut akan direaksi baik bila pihak-pihak yang bersangkutan saling menghargai. Syarat saling menghargai adalah poin yang harus diperhatikan dalam pernyataan Ahmadinejad dalam peringatan Hari Kemenangan Revolusi Islam Iran ke-30.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh AS untuk memulai hubungan dengan Iran. AS harus lebih dahulu menunjukkan itikad baiknya kepada Iran, mengingat AS selama ini selalu membuat ulah terhadap Iran ini. Perbuatan AS yang dianggap sebagai faktor penghambat untuk harmonisasi hubungan tersebut antara lain adalah; Tanggal 3 Juli 1988, pesawat sipil Airbus milik Iran dalam perjalanannya dari Iran menuju Dubai, ditembak rudal oleh kapal perang AS,

Vincennes. Seluruh penumpang pesawat bernomor Iran Air 655 itu beserta awak pesawatnya, yang keseluruhan berjumlah 298 orang, tewas. Peristiwa ini terjadi di akhir perang Irak-Iran. Saat itu, kapal perang AS tersebut tengah berada di perairan Teluk Persia. AS menyatakan bahwa penembakan itu disebabkan karena kelalaian tentaranya. Namun mengingat kapal perang Vincennes milik AS itu memiliki perlengkapan yang sangat canggih, alasan tersebut sulit diterima. Ini adalah di antara ulah AS yang tentunya akan menjadi kendala serius bagi Tehran-Washington. Yang lebih aneh lagi, setelah peristiwa itu, komandan kapal perang Vincennes tersebut malah diberi medali kehormatan oleh pemerintah AS. Semua fakta ini, termasuk juga dokumen-dokumen resmi lainnya, menunjukkan bahwa penembakan terhadap pesawat sipil Iran oleh AS adalah sebuah kesengajaan.

Mereaksi penembakan terhadap pesawat sipil Iran tersebut, Washington hingga kini tidak mengeluarkan pernyataan maaf secara resmi kepada Republik Islam Iran dan belum memberikan ganti rugi atas kejadian tersebut. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ulah AS itu membuat Iran tidak berpikir positif tentang AS. Jika AS ingin menjalin hubungan dengan Iran, Teheran pasti akan menuntut insiden tersebut dan meminta ganti rugi dari AS.

Selain itu, banyak transaksi di masa pemerintah dinasti Shah yang diberhentikan secara sepihak oleh AS. Padahal pemerintah Iran saat itu sudah mengirimkan dananya. Namun barang-barang yang dikehendaki dalam transaksi tersebut, hingga kini belum diterima Iran. Lebih dari itu, banyak dana pemerintah Iran yang masih dibekukan di bank-bank AS. Jika AS ingin menjalin hubungan dengan Iran, Washington harus mengembalikan seluruh dana pemerintah saat itu yang milik rakyat Iran ke Republik Islam Iran.

Terkait program nuklir sipil Iran, AS menunjukkan sikap destruktif terhadap Iran. Bahkan, negara ini dalam lobi-lobinya berupaya membujuk lembaga-lembaga internasional untuk memberikan sanksi atas Iran. Bahkan, Presiden Obama dalam pernyataan terbarunya masih bersikap miring terhadap program nuklir sipil Iran. Obama meminta Iran untuk menghentikan pengayaan uranium. Sementara itu, Iran menyatakan bahwa pengembangan teknologi nuklir sipil Iran merupakan hak bangsa Iran. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) berulang kali menyatakan bahwa program nuklir Iran tidak terbukti diselewengkan

untuk kepentingan selain sipil. Bahkan, Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohammad Elbaradei, dalam wawancaranya dengan Koran Washington Post, (dalam Kompas, 12 Pebruari 2009) belum lama ini, menyampaikan pandangannya soal nuklir Iran. Wawancara detail Elbaradei juga dipublikasikan oleh media-media Iran. Dalam wawancara tersebut, Elbaradei kembali menegaskan bahwa Tim Inspeksi IAEA yang ditugaskan meninjau situs-situs nuklir Iran, kembali tidak menemukan penyimpangan program nuklir Teheran untuk kepentingan selain sipil. Dikatakannya pula, aktivitas nuklir Iran hingga kini berada dibawah pemantauan IAEA. Elbaradei dengan tegas mengatakan, "Tingkat pengayaan uranium di Iran masih berada di tingkat rendah. Untuk itu, aktivitas Iran hanya bisa digunakan untuk kepentingan sipil".

Menurutnya, selama perselisihan antara Iran dan AS dalam setengah abad terakhir belum dapat diselesaikan, isu nuklir Iran tak akan kunjung selesai. Ia juga mengakui bahwa Iran merupakan negara tangguh di kawasan. Untuk itu, Barat harus mengakui realitas tersebut. Jika AS ingin menjalin hubungan dengan Iran, Washington harus menghentikan langkah-langkah destruktifnya terkait program nuklir Iran.

Dari sisi kebijakan luar negeri, Iran sangat mempermasalahkan kebijakan AS yang mendukung eksistensi Rezim Zionis Israel. Penindasan terhadap bangsa Palestina dan pendudukan Rezim Zionis atas bumi Palestina didukung penuh oleh AS. Bagi Republik Islam Iran, Palestina adalah masalah dalam negeri. Terkait masalah Palestina, Tehran mengusulkan referendum yang melibatkan muslim, kristen dan yahudi untuk membentuk pemerintahan Palestina. Jika AS berkeinginan menjalin hubungan dengan Iran, AS yang juga negara pendukung Zionis Israel harus menekan rezim ini untuk menerima tuntutan Iran.

Adanya fenomena upaya membangun kembali hubungan yang lebih harmonis antara Iran dengan AS, seperti dijelaskan di atas sesungguhnya dapat dipahami sebagai sebuah bentuk perkembangan lain dari dinamika politik luar negeri Iran dengan AS. Namun demikian satu hal yang dapat dipastikan bahwa untuk memperbaiki hubungan diantara kedua negara yang sudah berlangsung hampir setengah abad lamanya itu, ternyata tidak mudah dilakukan. Masing-masing pihak tetap saja menampakkan sikap konfrontatifnya dan oleh sebab itu

karakter konfrontasi tidak dapat dihilangkan dalam tipologi politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad.

4.3. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri Iran

4.3.1. Faktor Internal

4.3.1.1. Faktor Idiosinkratis

Faktor idiosinkratis sangat terkait dengan hal-hal yang menyangkut pada aspek personifikasi dan atau kepribadian seorang individu. Aspek personifikasi itu meliputi karakter, sifat dan latar belakang kehidupan yang dimilikinya, kemudian aspek personifikasi tersebut secara langsung dapat mempengaruhi arah dan orientasi kebijakan-kebijakan yang diambilnya sehingga menjadi kebijakan publik. Dalam konteks Ahmadinejad, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait dengan faktor idiosinkratis ini. *Pertama*, dapat dilihat dari pengalaman dan latar belakang kehidupannya. Jauh sebelum menjadi Presiden, Ahmadinejad adalah seorang anggota militer dari pasukan elit Iran, yaitu Garda Republik. Ia dididik dalam lingkungan militer yang khas dengan ajaran-ajaran revolusioner. Yaitu sebuah ajaran di lingkungan militer Iran yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kedaulatan Iran. Pada saat aktif di militer, ia telah berpengalaman dalam perang Iran-Irak antara tahun 1980 hingga 1989. Pengalaman kemiliteran ini sangat kuat pengaruhnya terhadap orientasi kebijakan luar negeri yang diambilnya. Hal ini dapat dilihat ketika tidak ada ketakutan sedikitpun dalam dirinya tatkala menghadapi hegemoni AS dan kekuatan Israel di kawasan Timur Tengah. Ia sangat berani dalam menghadapi AS, Israel dan Eropa yang notabene tidak sejalan dengan kepentingan nasional Iran. Ia malah cenderung menantang meskipun masih dalam bentuk pernyataan-pernyataan. *Kedua*, Ahmadinejad adalah seorang intelektual atau seorang dosen. Selepas dari militer ia kemudian mengambil profesi sebagai seorang pengajar di sebuah Universitas terkemuka di Iran. Pengalamannya sebagai seorang dosen telah membuat Ahmadinejad mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, artinya tidak semata-mata dalam bidang pengetahuan tertentu saja, seperti bidang kemiliteran saja. Profesinya sebagai dosen sangat berpengaruh dalam tindak

tanduknya ketika ia mengambil posisi sebagai seorang Presiden. Dengan tegas ia menyerukan kepada dunia barat bahwa masalah *holocaust* adalah sebuah polemik. Bahkan ia dengan tegas pula menyebutkan bahwa *holocaust* itu adalah mitos. Pernyataan tentang *holocaust* ini tentulah sebuah pernyataan yang sangat berdasar pada pengetahuan sejarah yang dimilikinya. Ia senantiasa menentang pihak-pihak yang percaya pada *holocaust* untuk membuktikannya secara akademik melalui penelitian-penelitian. Konferensi internasional tentang *holocaust* bahkan diadakan olehnya di Teheran. Mitos *holocaust* yang digemakan oleh Ahmadinejad tentu membuat berang pihak barat, dalam hal ini AS, Israel dan negara-negara di Eropa. *Ketiga*, Ahmadinejad adalah seorang politikus sekaligus eksekutif yang berpengalaman. Sebelum menjadi Presiden ia adalah seorang Walikota Teheran. Dengan pengalaman yang demikian ini, maka pengetahuannya semakin bertambah, terutama dalam bidang administrasi, manajemen dan hukum pemerintahan. *Keempat*, ia adalah seorang murid ideologis Ali Khamenei yang banyak mengajarkan ideologi-ideologi revolusi Iran. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek revolusioner dalam pemerintahannya tetap dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan luar negerinya, terutama kebijakan yang terkait dengan AS dan Israel. *Kelima*, ia adalah seorang yang sangat sederhana hidupnya dan bersahaja. Kesederhanaan dan sifat bersahaja ini banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran tatkala berhadapan dengan AS dan Israel. Ketika di sidang umum PBB ia sangat sederhana dan bersahaja namun tegas sehingga membuat *audiens* menjadi memperhatikannya dengan seksama.

4.3.1.2. Posisi Strategis Iran

Secara geo-politik, Iran berada disuatu lokasi yang sangat strategis. Luas wilayah Iran sekitar 1.648.195 km (636.296 mil) persegi, dan kondisi ini menjadikan Iran sebagai negara terluas ke-16 di dunia. Iran dikelilingi negara-negara penting dikawasan benua Eropa dan Asia, diantaranya Turki, Rusia, Afganistan, Pakistan dan Irak. (Sihbudi; 1995; 72). Sedangkan, batas Iran dengan negara-negara tetangganya terdiri dari 5.170 km garis batas daratan dan 2.150 km garis batas air. Garis batas terpanjang hampir seluruhnya berada di utara, yaitu berbatasan dengan negara-negara bekas Uni Soviet, sepanjang 1.740 km, sebagai

daerah perbatasan bersama termasuk 630 km batas air. Di sebelah barat daya, sepanjang 1.280 km perbatasan Iran dengan Irak, dan perbatasan dengan Turki dibarat laut sepanjang 470 km, dengan Afganistan di Timur laut, Iran bertapak batas sepanjang 850 km. Sedangkan dengan Pakistan sepanjang 830 km. Teluk parsi dan laut oman terletak di selatan dengan garis tapal batas perairan sepanjang 1.880 km (Sihbudi; 1995; 72).

Lansekap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan *basin drainage* atau dataran tinggi yang beragam. Bagian barat yang memiliki populasi terbanyak adalah bagian yang paling bergunung, dengan barisan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m. Sebelah timur terdiri dari gurun di dataran rendah yang tak dihuni seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul. Ladang lapang luas ditemukan di sepanjang pesisir Laut Kaspia dan di ujung utara Teluk Persia, di mana Iran berbatasan dengan sungai Arvand (*Shatt al-Arab*). Plain yang lebih kecil dan terputus ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia.

Iran dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia. Namun, secara keseluruhan hampir separuh dari wilayah yang dimiliki Iran masih berupa padang pasir, sedangkan sekitar 19 juta hektar ditutupi hutan dan sisanya hanya 14 juta hektar yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Sejarah Iran menggambarkan bahwa bangsa ini merupakan keturunan bangsa Arya yang dikenal sebagai pengembara, pemberani dan suka perang merupakan salah satu ras Indo-European yang melakukan migrasi pada 2500 SM ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India. Mereka terbagi dalam dua kelompok yakni Indo Eropa dan Sakas. Sifat patriotisme dan kebanggaan yang tinggi terhadap bangsa Arya masih terlihat sampai saat ini. Mereka tidak pernah gentar dengan tekanan maupun ancaman dari manapun demi tegaknya harga diri bangsa. Jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat Iran sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan tetap tegarnya Iran menghadapi embargo. Rakyat Iran dan

pemerintahnya berusaha untuk berdiri diatas kaki sendiri dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada. Sifat *xenophobic* melahirkan suatu fenomena Iran adalah Persian bukan negara Arab bahkan ras Iran adalah ras yang lebih tinggi dari negara-negara Arab lainnya. Hal tersebut sebagian nampak dari bahasa keseharian mereka yang berbahasa Parsi bukan bahasa Arab.

Posisi Iran cukup strategis karena selain menjadi jalur penghubung negara-negara Eropa Timur, Asia Tengah ke Laut Arab dan Samudra Hindia juga keberadaan teluk Hormus yang merupakan *choke point* dimana pengiriman oil ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Amerika akan melintasi teluk tersebut. Sebagai pintu gerbang perdagangan, Iran dapat menarik keuntungan dengan adanya arus barang dan manusia yang singgah di Iran. Iran terletak di kawasan Timur Tengah, batas darat : sebelah timur adalah Afganistan, Pakistan dan Turkmenistan; sebelah barat : Irak, Kuwait, Turki dan Azerbaijan. Batas laut : utara adalah Laut Kaspia (yang kaya sumber daya alam, kandungan minyak di Laut Kaspia diperkirakan mencapai 1/3 dari kandungan minyak dunia), selatan adalah teluk Persia, teluk Oman dan Laut Arab. Iran memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Saudi Arabia serta gas alam kedua terbesar setelah Rusia yang terletak di wilayah South Pars, yang ditemukan pada tahun 1988 dan telah dikembangkan sejak tahun 2000. Hasil tambang lainnya adalah batu bara, timah hitam, tembaga, biji besi, zink, emas, chromite dan barite. Diperkirakan Iran memiliki 5% dari seluruh total tembaga dunia dan produksi logam tersebut meningkat terus setiap tahun.

Posisinya yang terletak diantara persilangan Eropa di bagian utara dan Asia di bagian Selatan serta keberadaannya ditengah-tengah negara-negara Arab, telah membuat Iran sebagai negara yang senantiasa tersentuh oleh politik luar negeri negara-negara lain dan sekaligus telah membuatnya sebagai negara yang sarat dengan lalu lintas kepentingan nasional dari banyak bangsa dan negara di luar Iran. Sebagai akibatnya, negara-negara di luar Iran yang memiliki pretensi kepentingan nasional di sekitar Iran mau tidak mau harus menjalin hubungan dengan Iran. Setiap negara yang berada di wilayah Timur Tengah misalnya, selalu menempatkan Iran dalam lingkaran pertama dari keseluruhan lingkaran konsentrik politik luar negeri negara-negara di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Rusia yang berada di sebelah utara serta Israel yang sangat dekat dengan Iran dan sejumlah

negara Asia lainnya di sebelah selatan, selalu berusaha untuk menyentuh Iran. Artinya keberadaan Iran di tengah-tengah sejumlah kepentingan nasional negara-negara lain merupakan sesuatu yang signifikan, sebaliknya Iran pun memahami posisi strategisnya, sehingga negara itu kerap memainkan peranan penting. Peranan penting itu terutama dalam hal menata politik dan keamanan serta mengkonstruksikan kekuatan ekonomi pada tingkat regional.

Dimensi geo-strategis yang dimiliki Iran ini secara langsung mempengaruhi arah dan orientasi politik luar negerinya. Terbukti dalam prinsip politik luar negerinya, Iran lebih cenderung menempatkan dan lebih mengutamakan negara-negara di dalam kawasan Timur Tengah sebagai target dari politik luar negerinya. Apalagi orientasi regional ini didasarkan pula oleh prinsip pada politik luar negeri Iran yang mengharuskan negara itu menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan, terutama dengan negara-negara Islam. Penguatan negara-negara Islam di dalam kawasan menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam politik luar negerinya. Di sisi lain, keberadaan Israel di sekitar Iran telah menjadikan orientasi politik luar negeri Iran terlihat lebih konservatif. Seperti diketahui, Iran tidak pernah mengakui eksistensi Israel. Baginya, Israel adalah kaum zionis yang melakukan kolonialisasi atas Palestina, dan baginya pihak-pihak yang menerapkan kolonialisasi harus sirna dari muka bumi. Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Iran sangat antusias untuk secara terus menerus menggalang kekuatan negara-negara Arab untuk tujuan menekan Israel sekaligus menghilangkannya dari sistem hubungan internasional di wilayah regional Timur Tengah. Meskipun upaya tersebut belum menunjukkan hasil nyata, tetapi Iran telah menjalankan prinsip politik luar negerinya yang sesungguhnya berdasarkan pada Islam dan nilai-nilai revolusioner yang diajarkan oleh Imam Khomeini.

Dalam tinjauan lain, posisi geo-strategis ini telah pula berpengaruh pada politik luar negeri Iran, terutama ajakan politik luar negerinya yang menginginkan munculnya Iran sebagai kekuatan utama di wilayah Timur Tengah. Dalam perspektif politik luar negeri Iran, posisi strategis tersebut sangat potensial menjadikan Iran untuk diperhitungkan, baik secara regional maupun global. Secara regional, negara-negara lain di sekitar Iran menganggap Iran sebagai

sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer. Dengan pandangan ini maka Iran selalu dianggap sebagai sebuah kekuatan alternatif yang di satu sisi dapat menjaga ideologi Islam, di sisi lain menjadi stabilitator kawasan. Sebagai stabilitator kawasan, Iran dianggap sebagai satu-satunya negara yang paling siap apabila berhadapan dengan Israel yang merupakan musuh bersama negara-negara Arab. Agar stabilitas tersebut tetap terjaga dan agar ideologi Islam tetap eksis di Iran, maka memanfaatkan lingkungan eksternal terutama kawasan Arab dan Timur Tengah adalah bagian penting dalam politik luar negeri Iran.

4.3.1.3. Kekuatan Sosial Ekonomi

Sementara itu, faktor sosial ekonomi juga turut membentuk arah dan orientasi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Iran. Kekuatan sosial ekonomi menjadi sebuah kekuatan nasional yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pergaulan internasional. Sebagaimana diketahui, sebuah negara yang kondisi sosial ekonominya tergolong tidak menggembirakan, maka akan lebih mudah dikontrol oleh negara atau kekuatan negara lain. Negara yang demikian ini termasuk dalam kategori negara lemah. Negara lemah akan senantiasa menggantungkan hidupnya pada negara kuat. Sebaliknya, bila negara yang bersangkutan mempunyai kondisi sosial ekonomi yang kuat maka negara tersebut akan lebih cenderung percaya diri serta tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada negara lain. Posisi Iran dalam logika di atas tampaknya harus betul-betul dicermati dengan seksama. *Pertama*, secara faktual, Iran masih tergolong negara berkembang, tingkat perekonomiannya masih kurang menggembirakan, tetapi kondisi sosial ekonomi Iran sangat potensial untuk menjadi kuat, meskipun sebenarnya kelemahan ekonomi Iran ini akibat sanksi dan hukuman yang diberikan oleh masyarakat internasional yang dimotori AS. *Kedua*, Iran tidak dapat digolongkan negara miskin, meskipun ia berada di bawah tekanan politik dan ekonomi internasional. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai kekuatan sosial ekonomi meski dalam tekanan isolasi internasional. Bandingkan misalnya dengan Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi Iran jauh lebih baik dari Korea Utara yang sama-sama mendapatkan tekanan isolasi internasional. *Ketiga*, Iran adalah negara yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah,

terutama minyak. Dengan kekuatan minyak tersebut Iran sesungguhnya mempunyai tingkat perekonomian yang maju. Tetapi lagi-lagi karena tekanan isolasi internasional yang dimotori AS, minyak Iran menjadi kurang ekstensif dalam pasar internasional. Kalaupun ekstensif, itu hanya dilakukan dengan sebagian kecil negara di Eropa dan sebagian besar negara-negara berkembang, terutama dengan sejumlah negara di Asia.

Ekonomi Iran mengacu pada sistem campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber utama minyak bumi. Perusahaan-perusahaan utama yang menguasai hajat hidup rakyat Iran dimiliki oleh pemerintah. Pada aspek-aspek perdagangan lainnya dikelola oleh perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran cenderung stabil dari tahun ke tahun, terutama setelah Revolusi Islam berakhir. Namun, perdagangan luar negeri Iran hingga saat ini masih tetap bergantung pada naik turunnya harga minyak di pasar internasional.

Perekonomian Iran tulang punggungnya terletak pada industri perminyakan yang merupakan bagian dari milik negara. Ekspor minyak dan gas bumi menempati 80% pendapatan pemerintah, oleh karenanya komoditas ini sangat berpengaruh terhadap penguatan anggaran belanja Iran. Tahun 2007 merupakan tahun ketiga Repelita keempat, *Gross Domestic Product* (GDP) pada tahun 2007 US\$ 248 Milyar, sedangkan inflasi sebesar 19,1%. Pada tahun 2008, APBN Iran dipatok sebesar US\$.307 Milyar dengan harga minyak mentah dipatok pada 39,7 US\$/barell.

Bank Sentral Iran merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan moneter. Pada awalnya, pemerintah Iran menggunakan kebijakan moneter kombinasi antara *fixed rate* dan *floating rate*. Untuk keperluan ekspor impor bagi para pengusahanya diterapkan kebijakan *fixed rate*, sedangkan untuk keperluan umum masyarakat sehari-hari dan orang asing ditetapkan kebijakan *floating rate*.

Iran memiliki keanekaragaman tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran sebagai akibat keragaman daratan dan iklim. Aneka tanaman yang tumbuh di Iran antara lain adalah gandum, padi, jewawut, kacang tanah, pistasio, almond, hazelnut, walnut, kurma, anggur, lemon, melon, bit gula, saffron, teh, kapas, tembakau dan aneka macam sayuran. Sepertiga pendapatan dari sektor pertanian

berupa hasil peternakan. Ternak pada umumnya dipelihara dalam padang rumput yang dipagari, kecuali biri-biri dan kambing ada yang sebagian dipelihara di padang bebas.

Parameter kesejahteraan bagi masyarakat Iran adalah dicapainya suatu tingkat kesejahteraan dengan terus menerus dan berusaha melepaskan ketergantungannya dari negara-negara lain dan meningkatkan usaha-usaha riset diberbagai bidang. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dengan memodernisasi pabrik-pabrik yang ada sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Berbagai produk otomotif di Iran cukup berkembang pesat. Dengan dimilikinya lisensi produk dari industri mobil seperti kerjasama dengan perusahaan KIA, Peugeot, Proton dan bahkan terakhir ini merakit kendaraan Mercedes yang dikelola oleh perusahaan mobil Iran yaitu Saipa, Iran Kodro, Pars dan sebagainya sehingga Iran mampu mengekspor produk mobilnya ke Asia Tengah dan Amerika Latin. Pembangkit tenaga listrik Iran dapat mencapai 27.500 Megawatts dan direncanakan setiap tahun tambahan kapasitas mencapai 2000 megawatts. Iran telah mampu mengekspor kelebihan tenaga listriknya sekitar 200 Megawatts ke negara tetangga termasuk Azerbaijan, Turki, Armenia, Turkmenistan dan dalam waktu dekat dikembangkan sampai ke Pakistan wilayah Barat. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka panjang, Iran telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu Iran memiliki 60 buah bendungan air dengan kapasitas 130 miliar meter kubik untuk mencukupi kebutuhan energi pembangkit listrik.

Iran mempunyai sarana angkutan lewat darat, laut dan udara dengan jaringan luas dan dapat menjangkau jaringan ke seluruh pelosok negara termasuk daerah terpencil. Kemampuan Pemerintah Iran membangun jaringan transportasi baik darat, laut dan udara yang dapat menghubungkan keseluruhan pelosok di Iran dan ke negara lain telah memudahkan Iran dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya. Dengan jaringan transportasi yang sudah memadai tersebut maka jalur distribusi secara nasional menjadi lancar dan dengan sendirinya melancarkan roda perekonomian dalam negeri.

Jalan-jalan raya di Iran pada umumnya dihubungkan dengan jalan bebas hambatan (Toll), seperti Teheran – Qom – Isfahan, Teheran –Qasvin dan lainnya.

Jalan untuk angkutan berat antara lain Tabriz-Teheran – Mashad, Teheran – Isfahan – Bandara Abbas, Teheran – Hamadan – Kermansah, Teheran Kerman, Ahwaz – Khoramshahr dan lain-lain. Angkutan truk yang menonjol intensitasnya kegiatan adalah yang melalui kota Astara yang merupakan pintu keluar masuk antara Iran dan negara-negara Azerbaijan dan Rusia. Sedangkan kota Bazargan yang berada diperbatasan Iran dan Turki yang merupakan pintu keluar masuk menuju Eropa.

Setiap hari sekitar 400 kereta api menyusuri jaringan rel kereta api utama Iran yang membentang sepanjang 1.392 km dari Bandar Torkoman di laut kaspia dan bersambung dengan jalur selatan yang menghubungkan Bandar Imam Khomeini di Teluk Persia. Jalur kereta api Iran mempunyai hubungan jalur K.A dengan luar negeri ke negara Eropa, ke Asia Tengah melalui Tajikistan dan ke Teluk Persia.

Iran memiliki sekitar 34 lapangan terbang baik untuk pelayanan penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Khusus untuk penerbangan domestik yang dilayani oleh penerbangan milik pemerintah Iran yaitu, perusahaan negara Iran Air. Sedangkan milik swasta antara lain; Aseman Air lines, Mahan Air, Homa Airlines dan Kiss Air. Penerbangan domestik dilakukan setiap hari dari Tehran ke berbagai Ibu Kota Propinsi antara lain; Isfahan, Shiraz, Urumiyeh, Ahvaz, Tabriz, Bandar Abbas, Kerman, Mashad, Kish Island, Hamadan dan lain-lain. Jalur penerbangan internasional menggunakan lapangan terbang utama Mehrabad International Airport dan Imam Khomaini International Airport Tehran, Isfahan, Shiraz, Abadan, Kermanshah dan Kish Island.

Populasi penduduk Iran terdiri dari beragam etnik dan agama. Namun, etnik mayoritas ialah etnik Persia (51% dari rakyatnya,) dan 70% rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arya. Kebanyakan penduduk Iran bertutur dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Kumpulan minoritas Iran ialah Azeri (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%). Penutur ibu Bahasa Iran diperkirakan sebanyak 40 juta di Iran, dan jumlah keseluruhannya (merangkumi negara-negara lain) adalah 150-

200 juta. Penduduk Iran pada tahun 2006 ialah 70 juta. Sebanyak dua pertiga jumlah penduduknya di bawah umur 30 tahun. Tingkat pertumbuhan penduduknya cenderung bertambah. Kebanyakan penduduk Iran adalah muslim, di mana 90% Syiah dan 8% Sunnah Wal Jamaah. 2% lagi adalah penganut agama Baha'i, Mandea, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen. Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen diakui oleh pemerintah Iran dan turut mempunyai perwakilan di parlemen. Agama Baha'i tidak diakui.

Satu hal yang tidak dapat diabaikan dari kondisi sosial ekonomi Iran adalah kenyataan bahwa Iran adalah negara yang memiliki penduduk dengan sumberdaya manusia terdidik dalam jumlah besar serta wiraswasta yang unggul. Modal sosial yang demikian inilah yang kerap menjadikan Iran sebagai negara yang memiliki daya tahan meskipun diterpa oleh sanksi ekonomi internasional. Kemudian pengalaman perang panjangnya dengan Irak, telah pula membuat rakyat Iran mempunyai daya tahan untuk hidup lebih baik. Intinya nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki Iran, merupakan faktor penentu bagi kekuatan sosial ekonominya. Dan nasionalisme serta patriotisme itu senantiasa berlandaskan pada Islam, sehingga posisi Iran dipandang sebagai negara yang patut diperhitungkan.

Dimensi sosial ekonomi yang dimiliki Iran ini tentu mempengaruhi politik luar negerinya. Keberadaan penduduk yang mayoritas adalah Islam merupakan aspek utama yang membuat kenapa Iran harus menempatkan penguatan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah sebagai prioritas dalam politik luar negerinya. Kerjasama ekonomi dengan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah adalah prioritas utama Iran dalam menjalin hubungan dengan pihak luar. Keutamaan Islam dalam interaksi politik luar negeri Iran memang sangat beralasan, karena sesungguhnya perjuangan politik luar negeri Iran adalah untuk mengangkat barkat, martabat dan kehormatan Islam di seluruh dunia. Itu pulalah alasan mengapa politik luar negeri Iran didasarkan pada Islam dan ajaran-ajaran revolusioner Imam Khomeini.

Pada sisi yang lain, penduduk Iran tergolong multikultur, kenyataan ini semakin membuat Iran sebagai negara yang patut diperhitungkan berdasarkan perspektif sosial ekonomi. Keadaan yang multikultur dan multi agama itu justru menguntungkan Iran dalam percaturan politik internasional, karena dengan

keadaan multikultur dan multiagama itu Iran berhasil menata kehidupan domestiknya. Iran sangat menghormati rakyatnya yang multikultur dan multiagama itu dan mereka ternyata bisa hidup damai di Iran. Kekayaan alam, terutama minyak dan bahan tambang lain, telah membuat Iran patut dikategorikan sebagai negara dengan tingkat perekonomiannya yang progresif. Rakyat Iran merasa bahwa kekayaan minyak itu betul-betul menyentuh rakyatnya dan betul-betul dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Iran. Tidak seperti pada zaman Shah dalam mana kekayaan minyak Iran justru dinikmati oleh AS melalui sistem kapitalismenya. Sistem pengelolaan minyak di Iran dilakukan oleh negara dan hasilnya adalah untuk seluruh rakyat Iran. Artinya upaya untuk mensejahterakan masyarakat dari hasil minyak, telah menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan hasil bumi di Iran.

4.3.1.4. Sistem Politik dan Kekuasaan

Pada dasarnya, dalam mengukur keberhasilan pembangunan politik suatu negara, serta kematangan politik suatu bangsa terdapat salah satu alat tolak ukur utamanya yaitu pada aspek pelembagaan suksesi politiknya. Tolak ukur tersebut akan lebih mudah terjadi jika suatu bangsa menghadapinya secara "antisipatoris", yakni memikirkannya sebelum soal suksesi menjadi kenyataan yang harus segera dipecahkan, dan tidak menghadapinya secara "ex post facto" (baru memikirkan setelah dihadapkan pada kenyataan). (Sihbudi; 2007; 244).

Revolusi Islam yang terjadi pada tahun 1979 di Iran, merupakan salah satu hasil dari proses suksesi politik. Revolusi tersebut telah mentransformasikan negeri ini dari negeri yang berorientasi Barat pada masa kepemimpinan Syah menjadi Republik Islam Iran pada masa kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Paling kurang ada dua hal yang menarik dari suksesi politik di sana, di antaranya :

1. Sejak berdiri pada 1979, Republik Islam Iran sudah mengalami pergantian presiden sebanyak lima kali, dan Mahmoud Ahmadinejad yang terpilih pada Juni 2005 merupakan presiden keenam di "negeri kaum mullah" ini.
2. Pergantian jabatan pemimpin (Spiritual) -- "Imam", "Faqih", atau Rahbar -- dari Ayatullah Al-Uzma Ruhollah Al-Musavi Al-Khomeini -- Bapak Revolusi Islam Iran dan Pendiri Republik Islam Iran, yang wafat pada 3

Juni 1989 – ke Ayatullah Ali Khamenei, ternyata berlangsung tanpa adanya gejolak politik yang berarti. Padahal ketika Imam Khomeini dalam keadaan sakit keras, hampir semua media massa Barat memprediksikan akan terjadinya pertarungan politik untuk memperebutkan posisi pemimpin spiritual itu. (Sihbudi; 2007; 244).

Sistem politik yang berlaku di Republik Islam Iran pada dasarnya masih bisa dikatakan termasuk relatif “liberal”, untuk ukuran Negara-negara berkembang di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena, struktur politik negara itu dilandaskan pada Islam bermazhab Syi’ah yang cenderung lebih bersifat “teokratis”, dalam praktiknya dapat terlihat dari tempat yang cukup penting diisi oleh lembaga-lembaga politik “modern”. Sistem politik dan kekuasaan yang demikian ini telah menempatkan Iran sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan teokrasi dan liberal sebagai dasar bagi pelaksanaan politik pemerintahannya. Pemimpin agung tetap dijadikan sebagai dimensi penting dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi praktek demokrasi seperti pemilu tetap dijalankan. Keadaan ini memang telah menjadi keunikan sendiri bagi Iran. Tetapi apapun, ternyata Iran tetap saja negara yang tergolong demokratis dan tergolong stabil dalam melaksanakan sistem politiknya.

Dimensi politik dan kekuasaan yang demikian ini secara langsung dapat mempengaruhi politik luar negeri Iran. Setiap kebijakan politik luar negeri Iran tidak pernah lepas dari pengaruh kekuasaan para pemimpin spiritual, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada eksekutif yang dalam hal ini adalah presiden terpilih. Fungsi utama pemimpin spiritual adalah mengarahkan dan turut mengawasi arah politik luar negeri yang didasarkan pada Islam. Oleh sebab itu sejumlah kebijakan politik luar negeri haruslah mendapatkan persetujuan dari lembaga agung para pemimpin spiritual itu. Tindak tanduk negara senantiasa diawasi agar sesuai dengan ideologi Islam dan ajaran-ajaran revolusi Imam Khomeini dan bagi mereka yang tidak mentaatinya, maka harus siap-siap tumbang di tengah jalan, karena kekuatan para pemimpin spiritual berada di tangan rakyat yang mempercayakan mereka untuk mengawasi secara vertikal jalannya pemerintahan. Dukungan rakyat terhadap para pemimpin spiritual sangat kuat dan

sebaliknya dukungan pemimpin spritual terhadap rakyat Iran juga sangat besar melalui perhatian dan pemusatan untuk kepentingan rakyat yang selalu disampaikan oleh para pemimpin spritual itu.

Para pemimpin spritual akan dengan segera meluruskan jalannya pemerintahan, termasuk dalam aspek politik luar negeri jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran revolusi. Itulah makanya Ahmadinejad selalu mendasarkan arah dan orientasi politik luar negerinya kepada nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran revolusi. Karena Ahmadinejad sangat taat dan patuh pada hukum Iran yang demikian ini. Sebaliknya mereka yang memimpin Iran sebelum Ahmadinejad atau yang menjadi rival Ahmadinejad dalam pemilu presiden tidak memperoleh mayoritas suara rakyat karena dianggap atau difatwakan oleh para pemimpin spritual melenceng dari koridor hukum Islam Iran.

4.3.1.5. Kekuatan Militer Iran

Pemerintah Iran bekerjasama dengan perusahaan *Defence Industrie Organization (DIO)* dan *Aerospace Industrie Organization (AIO)* serta beberapa sub perusahaannya di masing-masing angkatan, telah memproduksi berbagai peralatan perang militer dan persenjataan. Industri yang telah dicapai antara lain, kendaraan berlapis baja, berbagai persenjataan ringan dan berat, berbagai jenis peluru kendali, modifikasi dan "up-grade" tank, helikopter, pesawat penumpang, pesawat tempur latihan, peralatan komunikasi Pernika dan *night vision*. Selain itu telah menggunakan satelit untuk keperluan pusat komunikasi moderen yang dipakai untuk kepentingan militer dan umum. Iran telah melakukan kerjasama dibidang teknologi persenjataan dengan luar negeri. Berbagai pembangunan teknologi angkatan bersenjata dalam rangka program "self sufficiency".

Keberhasilan Pemerintah Iran dalam program *self sufficiency* untuk kepentingan pertahanannya telah menjadikan Iran sebagai negara yang terkuat di kawasan. Beberapa keberhasilan industri pertahanan Iran hasil kerjasama dengan Cina dan Rusia antara lain adalah : kendaraan berlapis baja, berbagai persenjataan ringan dan berat, berbagai jenis peluru kendali, modifikasi dan up-grade Tank, Helikopter, Pesawat penumpang, pesawat Tempur latihan, peralatan komunikasi Pernika dan *night vision*. Keberhasilan Iran dalam membuat Rudal Shahab - 4

mampu membawa hulu ledak seberat 1 ton dan berjarak jangkau 2000 km, telah menjadi perhatian serius dan kekhawatiran pihak barat. Kekawatiran tersebut bukan tidak beralasan, mengingat Rudal Shahab-4 yang dapat menempuh jarak 2000 km dan sanggup membawa hulu ledak seberat 1 ton tersebut akan sangat membahayakan kawasan apabila dipasang hulu ledak nuklir.

Kebijakan Iran di bidang pertahanan dan keamanan bertolak pada kedudukan pemimpin sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Iran yang menempatkan angkatan bersenjata Iran di bawah kontrol pemimpin. Kekuasaan pemimpin yang cenderung mutlak dapat membawa angkatan bersenjata Iran sebagai alat penguasa yang akan mengikuti garis kebijakan dan keinginan pemimpin. Keadaan ini disatu sisi menguntungkan karena pembinaan maupun penggunaan kekuatan angkatan bersenjata tidak berbelit-belit, disisi lain merugikan karena angkatan bersenjata dapat dipakai sebagai alat pelanggeng kekuasaan dari para penguasa, khususnya pemimpin. Kekuatan personil angkatan bersenjata Iran yang berjumlah sekitar 545.000 dan didukung peralatan militer darat laut dan udara, mampu mempertahankan kedaulatan wilayah Iran dari ancaman invasi lawan. Kemampuan pertahanan wilayah juga didukung oleh pasukan dari milisi Basij yang jumlahnya mencapai sekitar 12 juta orang. Landasan ideologi bagi doktrin angkatan bersenjata Iran berupa ideologi Islam, memberikan semangat dan kekuatan bagi para prajurit Iran dalam membela negara dan agamanya. Susunan bertempur angkatan bersenjata Iran merupakan gabungan angkatan bersenjata reguler dan angkatan bersenjata yang dibentuk untuk mengawal revolusi Islam dan didukung disposisi pasukan darat laut dan udara yang cukup menyebar diberbagai sektor, maka kedudukan pemimpin sangat menentukan. Angkatan Darat, dibagi dalam tiga sektor yaitu utara, tengah dan selatan dengan peralatan tempur yang disesuaikan karakteristik medan dan kemungkinan ancaman. Untuk Angkatan Lautnya digelar di pelabuhan-pelabuhan laut yang besar dan menyebar. Konsentrasi kekuatan dipusatkan pada wilayah bagian selatan, karena tempat ini merupakan wilayah strategis bagi pelayaran kapal-kapal internasional dan juga merupakan akses strategis masuknya kekuatan laut asing yang akan menyerang Iran. Sementara itu, kekuatan udaranya digelar

ditempat-tempat strategis untuk mengantisipasi ancaman udara lawan yang dapat masuk dari segala arah.

Kebijakan Pemerintah Iran yang disebut *self sufficiency* dan *total defence* yang dikembangkan Iran sangat beralasan. Pengalaman Iran dalam menghadapi embargo senjata dari AS telah menimbulkan semangat kemandirian dalam mencukupi kebutuhan persenjataannya. Para *defence planner* Iran menilai kebijakan tersebut sangat strategis dari sisi keamanan maupun ekonomi. Dengan memproduksi sendiri alat persenjataannya, maka kerahasiaan kemampuan militernya sulit diketahui dan menjadi tanda tanya bagi lawan. Selain itu kemampuan memproduksi sendiri berarti menciptakan lapangan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara konsep pertahanan semesta sangat diperlukan bagi Iran guna menghadapi musuh-musuh yang mungkin akan masuk dan menguasai daratan Iran. Konsep pertahanan ini akan terus dikembangkan Iran, karena dinilai efektif dan sustainable.

Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan berbagai macam latihan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuannya dalam menghadapi kemungkinan serangan musuh. Dengan latihan tersebut angkatan bersenjata Iran dapat menguji sistem pertahanannya sekaligus memberi peringatan kepada lawan bahwa Iran telah siap menghadapi segala bentuk ancaman maupun teror yang dilakukan oleh pihak barat. Pemilihan daerah latihan di wilayah Teluk Persia, Laut Oman dan perbatasan Iran-Irak jelas mengandung pesan bahwa wilayah tersebut sangat strategis bagi Iran maupun lawannya. Teluk Persia dan Laut Oman akan menjadi pusat konsentrasi kekuatan udara dan laut lawan untuk melakukan penyerangan maupun pengamanan jalur energi bila terjadi konflik bersenjata dengan Iran.

Embargo persenjataan dan suku cadang Amerika yang selama ini diberikan kepada Iran justru memperkuat tulang punggungnya. Pasalnya, pada saat embargo persenjataan dan suku cadang itu diberlakukan terhadapnya, hal tersebut memaksa tentara Iran untuk menjauhi medan bisnis serta kembali ke barak mereka untuk segera memutar otak agar bisa menciptakan inovasi baru dalam memproduksi alutsista dan suku cadangnya secara mandiri dan tidak lagi bergantung dari pasokan Negara lain. Namun, dengan kegigihan dan usaha kerasnya selama ini untuk menepis atas embargo yang diberikan kepadanya,

akhirnya dengan bangga mereka bisa memamerkan kemampuannya dalam memproduksi alutsista seperti pesawat-pesawat tempur (jet-jet dan helicopter), tank-tank super ringan, kapal selam dengan berkemampuan teknologi tingkat tinggi dan modern ke dunia internasional.

Saat ini, Iran sedang terkonsentrasi dalam proyek pembuatan dan proliferasi senjata Nuklir dengan daya ledak yang sangat tinggi dan memusnakan. Program ini diresmikan pada 1957 dibawah payung *Atoms for Peace Program*. Pada 1959, *Tehran Nuclear Research Center* (TNRC) berdiri dan dijalankan oleh *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI). TNRC dilengkapi reaktor penelitian nuklir berkekuatan 5 megawatt, beroperasi dari 1967 dan berkemampuan memperkaya uranium. Iran juga telah menciptakan aneka jenis rudal yang mampu untuk mencapai sasaran hingga dalam radius 2.000 kilometer, rudal tersebut merupakan simbol kekuatan Iran. Di antaranya : (Kazhim dan Hamzah; 2007; 38).

a. Rudal Jarak Pendek

- Samidroket artileri
- Fajr-3 roket artileri
- Tondar-69 roket artileri
- Oghab roket artileri
- Shahin-II roket artileri
- Naze'at roket artileri
- Zelzal roket artileri
- Fateh-110

b. Rudal Jarak Sedang

- R-17E, varian dari Scud B
- Shahab-1
- Shahab-2
- Shahab-3
- Shahab-3D
- Fajr-3 MIRV
- Kosar rudal siluman

c. Rudal Jarak Jauh

- Shahab-4
 - Shahab-5
 - Shahab-6
- d. Rudal Darat-Udara
- Misagh-1
 - Misagh-2
 - Sayyad-1
 - Shahab Thaqeb
- e. Rudal Anti Tank
- Saghegh
 - Ra'ad versi Iran untuk AT-3 Sagger
 - Rudal Anti-Kapal
 - Noor versi Iran untuk C-802
 - Torpedo
 - Hoot

Sementara itu, dari sisi personel militernya, sekalipun tak pernah belajar strategi perang dan kepemimpinan militer ke *West Point* (sekolah militer terbaik di AS), serta tidak pernah melakukan latihan bersama dengan serdadu AS, akan tetapi serdadu Iran tetap mempunyai keberanian dan nyali besar untuk menangkap 15 serdadu Inggris yang mencoba-coba untuk menerobos perbatasan laut mereka.

Secara umum, kekuatan tentara Iran sangat dirahasiakan dari pengetahuan umum. Namun, belakangan semenjak kepemimpinan Khomeini, Iran mengumumkan pembangunan beberapa senjata seperti peluru kendali Fajr-3, peluru kendali Kowsar, peluru kendali Fateh-110, peluru kendali Shahab-3 dan beberapa pembangunan industri militer. Peluru kendali Fajr-3 berada di antara pembangunan ketentaraan Iran yang paling berjaya buat masa ini, yang dibuat di Iran sendiri dan menggunakan benda cair minyak untuk pembakaran bahan api. Basis peluncuran peluru berpandu ini dirahasiakan.

Postur militer Iran terbagi atas dua pasukan yaitu pasukan militer Negara (tentara nasional) dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer negara terdiri sebanyak 420.000 batalyon yang terbagi atas tiga kelompok utama yaitu Angkatan Darat Iran sebanyak 350.000 pasukan, Angkatan Laut Iran sebanyak 18.000

pasukan dan Angkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan. Sedangkan pasukan militer revolusi mempunyai 125.000 pegawai yang terbagi atas lima cabang yaitu Pasukan Qods (pasukan khusus), Basij (paramiliter), Angkatan Laut Revolusi, Angkatan Udara Revolusi dan Angkatan Darat Revolusi. Kedua-dua pasukan bersenjata ini diletakkan dibawah kuasa Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran. (<http://www.angkasa-online.com/public/print/17/1/86.htm>)

Di Udara, Angkatan Udara Iran bernama Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF), memiliki jumlah pasukan sebanyak 52.000 orang. IRIAF mengoperasikan pesawat tempurnya yaitu di antaranya F-14A Tomcat, F-4 Phantom II, MiG-29A Fulcrum, Chengdu F-7M Airguard, Sukhoi Su-24MK Fencer-D, dan Mirage F1EQ. Namun, dari hasil temuan di lapangan masih membuktikan, bahwa F-14A Tomcat masih menjadi tulang punggung kekuatan IRIAF saat ini. Industri militer lokal Iran masih mampu dalam memelihara tingkat kesiapan rudal jarak jauh yaitu AIM-54 Phoenix. Dari total 284 unit AIM-54 (termasuk 10 varian latih ATM-54A) yang dibelinya semasa Shah, diperkirakan pada 1999 IRIAF masih punya 160 unit dalam kondisi siap tempur. Atau bila dihitung sekitar 40 persen dari kemampuan semula. Selain diotak-atik sendiri, sejumlah komponen vital rudal kabarnya bisa didapat Iran dari jalur tak resmi. (<http://www.angkasa-online.com/public/print/17/1/86.htm>)

Akan tetapi, keberadaan sisa Phoenix serta Fatter saat ini jelas dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan IRIAF. Oleh karena itu industri senjata lokal Iran mencoba untuk menciptakan rudal jenis baru. Kali ini yang jadi sasaran adalah rudal anti pesawat (SAM) MIM-23B I-HAWK. Selain untuk keperluan pertempuran udara, Iran juga merekayasa rudal HAWK bagi kebutuhan serang darat. Rudal untuk serangan darat ini banyak di produksi di dalam negeri serta direkayasa sedemikian rupa hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Penciptaan teknologi persenjataan jenis ini banyak yang diciptakan oleh Iran dan bahkan ada juga yang diproduksi untuk kepentingan ekspor, terutama ke negara-negara di Amerika Latin dan Afrika.

Arsenal udara-permukaan ini diberi nama Yasser. Untuk menciptakannya, Iran mengkombinasi rudal MIM-23 HAWK dengan hulu ledak bom M-117 yang berbobot 375 kilogram. Mengenai arsenal udara yang diberi nama Yasser ini, AS

dan sekutu-sekutunya masih kebingungan buat menganalisa sistem pemandunya. Beberapa pengamat memperkirakan rudal tersebut melesat dengan bantuan laser (*laser designator*). Sementara sisanya percaya pengoperasian rudal, tetap berpandu pada radar AWG-9 milik Tomcat. Dalam operasi udara, IRIAF memasang rudal Yasser pada armada F-14A dan F-4E Phantom II.

Penguatan artileri udara oleh Iran ini dapat dimaklumi karena penguatan ini sesungguhnya ditujukan kepada Israel. Kekuatan militer Israel adalah yang utama di wilayah Timur Tengah dan oleh karena itu Iran selalu berusaha untuk mengimbangnya, termasuk dengan penguatan artileri udara ini. Terlebih-lebih Israel selalu menjadikan matra udara sebagai kekuatan prioritas, maka Iran juga dalam beberapa tahun terakhir sudah mencanangkan peningkatan kekuatan udara. Beberapa kerjasama dilakukan oleh Iran dengan negara-negara lain, terutama dengan Cina dan Rusia dalam rangka membangun angkatan udara Iran. Selain itu Iran juga memperkuat persenjataan udaranya melalui kemampuan lokal yang dimilikinya, seperti pengembangan industri militer nasional yang diarahkan pada penguatan matra udara.

Perincian kekuatan IRIAF :

Tipe	Pembuat	Jumlah
F-14A Tomcat	AS	60
F-4D/E Phantom II	AS	18/46
Northrop F-5A/B/E/F	AS	10/25/57/18
F-7M Airguard	Cina	30
MiG-29A/UB Fulcrum	Rusia	35/6
Mirage F-1EQ/BQ	Perancis	18-20
Shenyang J-6	Cina	12
Su-24MK Fencer-D	Rusia	30
Su-25K/UBK/T	Rusia	13

Sumber : (<http://www.angkasa-online.com/public/print/17/1/86.htm>)

Terakhir, kekuatan yang paling besar yang saat ini sedang dikembangkan oleh Iran adalah Nuklir. Nuklir tersebut, awalnya dikembangkan sebagai tujuan damai, namun dalam perkembangannya nuklir tersebut dikembangkan sebagai

alat perimbangan kekuatan dari Negara-negara Barat yang selalu mengancam Iran terutama AS dan Sekutunya.

Pada dasarnya AS merupakan Negara yang paling vokal dalam menentang atas proliferasi nuklir di Iran. AS juga mengklaim bahwa pengembangan nuklir tersebut ada kaitannya dengan krisis yang terjadi di Lebanon yaitu konflik yang terjadi antara Hizbullah dan Israel. Karena saat ini, negara yang berperan aktif dalam membantu perjuangan Hizbullah adalah Iran. Menurut AS, jika Iran dibiarkan untuk mengembangkan nuklirnya sebagai senjata dan senjata tersebut dipakai oleh Hizbullah maka betapa berbahayanya kelompok tersebut, dan Israel pasti akan mengalami kekalahan dari Hizbullah.

Seperti apa yang kita ketahui, bahwa persekutuan AS-Israel sudah tidak perlu diragukan lagi. Saat ini mereka ibarat "dua sejoli" dan bagaikan "sisi mata uang" yang tidak dapat dipisahkan dari salah satunya. AS selalu mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan Israel. Begitu pula sebaliknya. Padahal, seperti halnya Israel dan AS (juga Rusia dan India), Iran merupakan Negara yang berdaulat yang dengan sendirinya mempunyai hak sepenuhnya untuk memperkuat pertahanan dirinya dari ancaman negara-negara atau kekuatan lain yang dapat membahayakan kedaulatannya. Begitu pula dengan senjata nuklir yang dikembangkannya padahal sudah berulang kali Teheran menegaskan bahwa program nuklir yang dikembangkannya untuk tujuan damai. Akan tetapi, rasa ketakutan yang menyelimuti AS-Israel membuat kedua Negara tersebut tidak percaya.

Dimensi penguatan militer Iran ini sudah barang tentu mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran. Keberanian Ahmadinejad dalam melawan setiap bentuk arogansi militer Israel serta arogansi hegemoni AS, bukanlah tanpa alasan. Keberanian yang diungkapkan dari serangkaian pernyataan politik luar negerinya tersebut paralel dengan penguatan militer nasional yang sedang dilakukan Iran. Sikap perlawanan yang ditunjukkan Iran tidak akan begitu saja muncul apabila kekuatan militernya sendiri tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Kemampuan militer Iran, dapat dikategorikan sebagai kekuatan militer terbesar setelah Israel di wilayah Timur Tengah. Ditambah lagi pengalaman perangnya selama kurang lebih delapan tahun dengan Irak, telah menempatkan Iran sebagai negara yang

patut diperhitungkan secara militer. Kapasitas militernya berada dalam kondisi yang sangat siap untuk melakukan serangan atau pertahanan jika terjadi peperangan. Dari beberapa bukti pernyataan yang disampaikan oleh pihak Iran, baik melalui Menlunya maupun presiden Ahmadinejad sendiri, tidak pernah terdengar Iran gentar atau takut dengan siapapun, tidak terkecuali Israel atau AS serta negara-negara Eropa.

Pada sisi yang lain, pengaruh penguatan militer terhadap politik luar negeri Iran ini sangat jelas terlihat dari orientasi dan target penguatan, yaitu diarahkan pada Israel. Pengembangan persenjataan Iran selalu diarahkan pada upaya bagaimana mengantisipasi Israel yang merupakan pihak paling diincar oleh Iran jika terjadi konflik bersenjata. Penempatan Israel sebagai target penguatan dan pengembangan militer dalam politik luar negeri Iran adalah bukti betapa aspek ini mempengaruhi politik luar negeri Iran secara keseluruhan. Jika pada masa sebelumnya, penguatan militer Iran di arahkan untuk mengimbangi kekuatan Irak (pada masa Saddam Hussein), maka Irak pasca Saddam Hussein tidak lagi menjadi target politik luar negeri Iran dalam konteks penguatan militer, melainkan adalah Israel.

4.3.2. Faktor Eksternal

4.3.2.1. Instabilitas Keamanan Regional

Kawasan Timur Tengah merupakan satu dari sekian banyak kawasan di dunia yang mempunyai tingkat instabilitas tertinggi. Instabilitas keamanan bahkan telah menjadi ciri khas kawasan tersebut. Di kawasan ini, Iran berada dalam posisi yang sangat terancam. Negara tersebut di kelilingi oleh pusaran konflik yang langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Iran. Ada konflik antara Iran dengan Irak (pada tahun 1980-an), kemudian antara Iran dengan Israel, antara Arab dengan Israel, antara Israel dengan Palestina dan antara negara-negara Arab lainnya seperti Libanon dengan Israel, Suriah dengan Israel, Yordania dengan Israel. Keseluruhan pusaran konflik ini telah membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak tenang. Terlebih-lebih dalam pusaran konflik tersebut melibatkan negara-negara kuat di luar kawasan seperti keterlibatan AS dan Rusia.

Keadaan yang demikian ini telah membuat politik luar negeri Iran memfokuskan dirinya pada dinamika keamanan yang berkembang di kawasan tersebut. Dalam pandangan politik luar negeri Iran saat ini, Israel adalah negara yang dianggap paling potensial dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan Iran. Keberadaan Israel dalam lingkaran konsentrik politik luar negeri Iran sangat diutamakan, dan kemudian menjadi rumit manakala Israel dapat sokongan penuh dari AS sebagai negara adidaya dunia. Dengan demikian, politik luar negeri Iran sebenarnya sangat fokus dalam menempatkan Israel dan AS sebagai negara yang dapat mengancamnya. Untuk itulah politik luar negeri Iran selalu bergantung pada dinamika politik yang dikembangkan oleh Israel dan AS di kawasan tersebut.

Selain daripada ancaman potensial Israel, instabilitas keamanan regional yang dinilai berpengaruh terhadap orientasi politik luar negeri Iran adalah posisi Palestina dan segala hal yang terjadi atas penduduk Palestina. Iran adalah negara yang secara terang-terangan mendukung opsi kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Palestina terhadap Israel. Dukungan nyata dari Iran atas perjuangan Palestina itu semata-mata dilakukan agar Israel tidak semena-mena di kawasan dan sekaligus melemahkan Israel dari dalam sendiri. Keadaan di Palestina serta di beberapa titik lokasi yang mempunyai perbatasan dengan Israel, antara lain dengan negara Suriah, Libanon dan Yordania ditambah dengan persetujuan kolektif antara sebagian besar negara-negara Arab dengan Israel telah membuat politik luar negeri Israel memfokuskan orientasinya pada kawasan Timur Tengah ini. Keadaan yang cenderung tidak stabil itu mau tidak mau telah memaksa Iran untuk memperkuat sistem pertahanan keamanannya yang ditujukan menghadapi sepaik terjang Israel.

Upaya menjalin kerjasama dengan beberapa negara Islam di Timur Tengah minus Israel pun dilakukan oleh Iran untuk dapat meminimalisir ancaman Israel, baik terhadap Iran sendiri maupun terhadap kawasan secara umum. Faktor instabilitas kawasan yang menempatkan Israel sebagai pemeran utama pencipta instabilitas itu telah membuat politik luar negeri Iran bersikap *ofensif* sekaligus bersikap *defensif* di dalam negerinya. Dalam berbagai kesempatan internasional, Iran selalu menempatkan Israel sebagai pihak utama yang melahirkan instabilitas di kawasan dan oleh karenanya Israel harus menjadi fokus utama dalam politik

luar negerinya. Pernyataan Ahmadinejad misalnya yang mengatakan bahwa Israel harus dihapuskan dari peta dunia adalah bukti dari pelaksanaan politik luar negeri Iran tersebut. Selain itu, keraguannya atas peristiwa *holocaust* di Eropa adalah bukti lain yang menunjukkan sikap Iran atas Israel. Iran tentu menyadari pernyataan-pernyataan itu berimplikasi negatif terhadap negaranya, tetapi hal itu ternyata tidak membuat Iran bergeming. Tetap saja dalam setiap kesempatan Ahmadinejad konsisten dalam setiap ucapannya.

Pengaruh lain dari instabilitas keamanan regional terhadap politik luar negeri Iran ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur militer Iran, termasuk di dalamnya konsentrasi pengembangan nuklir. Meskipun nuklir yang dinyatakan Ahmadinejad itu adalah untuk kepentingan damai, tetapi sesungguhnya penggunaan dan pengayaan uranium sangat mudah untuk dibelokkan menjadi sebuah persenjataan nasional yang membahayakan dan bagi Iran hal itu sangat mungkin untuk dilakukan mengingat adanya ancaman Israel yang sewaktu-waktu juga bisa melemahkan Iran. Itulah sebabnya Iran tetap ngotot dengan program pengembangan nuklirnya. Dalam perspektif keamanan Iran, hanya dengan pengembangan senjata nukliriah Israel dapat diimbangi. Selain itu, isu pengembangan nuklir ini secara tidak langsung dapat juga menempatkan Iran sebagai negara yang pada akhirnya diajak untuk berdialog dalam membicarakan keamanan kawasan yang selama ini tidak pernah diikutinya. Dengan demikian posisi tawarnya dalam ranah internasional turut diperhitungkan. Negara lain pun tidak lagi memandang sebelah mata terhadap Iran karena Iran dengan posisi yang memiliki fasilitas nuklir itu sudah dianggap aktor di kawasan yang sangat patut untuk diajak berdialog, khususnya ketika agendanya membahas keamanan kawasan.

4.3.2.2. Unilateralisme AS

Dalam konteks yang lebih global, politik luar negeri Iran juga sangat tergantung pada sikap AS yang cenderung sangat mendominasi dan mengarahkan sistem internasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Ketika AS mengembangkan sikap politik luar negeri yang menempatkan Iran sebagai salah satu negara poros setan pada masa kepemimpinan George Bush Jr. maka Iran

dengan segera melakukan langkah-langkah politik tingkat tinggi dengan memperkuat negaranya melalui pengembangan senjata nuklir. Politik luar negeri AS yang cenderung unilateralis dalam setiap langkah dan tindakannya, telah memaksa Iran untuk berbuat hal yang hampir sama, yaitu memperkuat dirinya dengan menambah keunggulan dalam bidang persenjataan militer. Oleh sebab itu, penguatan nuklir Iran adalah salah satu reaksi yang ditimbulkan oleh sikap unilateralisme yang dikembangkan AS dalam politik luar negerinya. Tidak hanya AS, tetapi juga oleh negara-negara sekutu AS yang menganut atau mengikuti politik luar negeri AS, seperti sejumlah negara-negara di Eropa dan Australia serta Israel tentunya sebagai sekutu ideologis abadi AS di kawasan Timur Tengah.

Unilateralisme yang dikembangkan oleh AS, sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dasar politik luar negeri Iran. Oleh karena itu Iran akan selalu menolak sikap AS yang menjalankan politik hegemoni atau unilateralisme itu, terlebih-lebih mendikte Iran untuk berada di bawah kontrol AS. Secara tegas, Iran telah menjadikan persoalan ini sebagai hal utama dalam politik luar negerinya.

4.3.2.3. Ketakutan terhadap Islam dalam Perspektif Global

Peristiwa pemboman gedung WTC di AS dan serangkaian pemboman di beberapa negara Eropa lainnya, telah melahirkan efek negatif bagi Iran. Peristiwa itu, melalui AS telah berhasil mengkampanyekan Islamo phobia secara global dalam setiap politik luar negeri negara-negara lain, terutama negara-negara barat. Dalam kaitan inilah Iran sebagai salah satu negara Islam memandang perlu untuk menepis sekaligus membalikkan fakta-fakta yang dikembangkan oleh AS itu. Sosialisasi kebencian terhadap Islam yang dikembangkan oleh AS secara global telah memaksa Iran untuk merubah arah politik luar negerinya yang berbuah pada upaya Iran untuk menyerang eksistensi Yahudi di dunia pada umumnya dan di Israel pada khususnya. Seringkali dalam setiap kesempatan, pemerintahan Iran melalui presiden Ahmadinejad mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyinggung kaum Yahudi dan AS. Sebenarnya, hal ini merupakan reaksi dari apa yang kerap dikembangkan AS melalui politik luar negerinya yang menebar kebencian terhadap Islam.

4.4. Kepentingan Nasional Iran

4.4.1. Pengembangan Nuklir

Negosiasi masalah nuklir dengan IAEA dan Uni Eropa terus berlanjut meski Iran terus dalam tekanan. Hingga saat ini DK PBB telah mengeluarkan tiga resolusi yakni Resolusi 1696 pada tanggal 31 Juli 2006, Resolusi 1737 tanggal 23 Desember 2006 dan resolusi 1747 tanggal 24 Maret 2007. Namun, Iran tetap menolak untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium karena yakin bahwa berdasarkan NPT Iran memiliki hak untuk memproduksi bahan bakar reaktor nuklir. Target selanjutnya adalah menuntut dicabutnya masalah nuklir Iran dari DK PBB dan dikembalikan ke IAEA. Program nuklir Iran yang terus disengketan negara-negara Barat akan terus berkembang dan diprediksikan semakin sulit untuk diselesaikan. Tekanan AS dan Israel dalam bentuk propaganda maupun aksi nyata dalam menghentikan program nuklir mandiri Iran tidak akan dipedulikan oleh rejim Iran. Penghentian nuklir Iran kemungkinan akan terus dilakukan melalui sanksi-sanksi DK PBB yang lebih berat. Namun demikian, negara-negara pemegang hak veto akan mengalami hambatan dalam mencapai kata sepakat pasca laporan IAEA 15 Nopember 2007 dan 3 Desember 2007. Apabila dengan sanksi-sanksi tersebut Iran tidak mau menghentikan pengayaan uraniumnya, ataupun AS tidak bisa menjatuhkan sanksi karena dihadang oleh Rusia atau Cina maka kemungkinan dilakukannya *pre-emptive strike* terhadap fasilitas nuklir Iran menjadi lebih besar.

Denyut aktifitas nuklir Iran dimulai pada masa pra revolusi Islam, tepatnya tahun 1959. Iran menandainya dengan mendirikan Pusat Atom Universitas Teheran yang kemudian disusul dengan terjalannya perjanjian perdana antara Iran dan AS untuk kerjasama nuklir. 11 tahun kemudian, AS mengoperasikan sebuah reaktor berkapasitas 5 megawatt untuk riset dan kegiatan akademi Universitas Teheran. Dalam pendirian reaktor itu, AS menerapkan limitasi ekstra ketat pada mekanisme keterlibatan dan kerjasama para teknisi Iran. AS sama sekali tidak memperkenankan para teknisi Iran yang tidak menguasai teknologi ini terlibat dalam penginstalasian dan pengoperasian reaktor.

Tahun 1971, Rezim Shah Pahlevi menjalin sejumlah kontak nuklir lain dengan beberapa negara Eropa, termasuk untuk pembangunan reaktor dengan Jerman, dan reaktor Darkhoin dengan Perancis, suplai bahan bakar nuklir AS, pembelian saham perusahaan Ordif. Namun, semua kerjasama dan kontrak itu menguap setelah rezim Pahlevi terguling oleh deru revolusi Islam. Negara-negara Barat itu tidak sudi lagi melanjutkan kerjasama dengan Iran. Iran yang berubah menjadi Republik Islam lantas menggandeng negara-negara lain untuk merampungkan pembangkit tenaga nuklirnya. Tapi di kemudian hari sebagian besar negara mitra baru Iran itu terpaksa membatalkan dan sebagian lain membatasi kerjasamanya dengan Iran akibat derasnya tekanan AS dan Barat. Dalam situasi serba ironi itu, Iran ternyata tetap berusaha memajukan proyek nuklirnya, tetapi kali ini dengan hanya mengandalkan kemampuan anak bangsa sendiri. Nyatanya, Iran malah berhasil menguasai teknologi eksplorasi tambang uranium dan mengkonversikan uranium menjadi "adonan kuning" (*yellow cake*) atau konsentrat uranium.

Selanjutnya, Iran merampungkan Pabrik Konversi Uranium (USF) di Isfahan dan mengoperasikan unit-unitnya. Di saat yang sama, pemerintah Teheran juga mengupayakan pembangunan mega instalasi nuklir Natanz untuk mengupayakan uranium. Melalui proyek ini Iran berhasil menguasai teknologi pembangunan dan pemasangan peralatan dan mesin-mesin sentrifugal yang diperlukan untuk proses pengayaan uranium.

Di luar beberapa kegiatan tersebut, para arsitek nuklir Iran juga berhasil mendisain dan mengoperasikan instalasi dan reaktor air ringan di Arak. Walaupun sudah menguasai teknologi siklus bahan bakar dan pengayaan uranium melalui mesin-mesin sentrifugal, Iran masih berusaha menggunakan beberapa mekanisme lain untuk pengayaan uranium. Hasilnya, Iran mampu memperkaya uranium melalui sistem laser, kendati masih dalam batas laboratorium.

Pasca Revolusi Islam, didukung oleh pengembangan instalasi-instalasi pembangkit nuklir serta pesatnya peningkatan kuantitas, kualitas dan iptek nuklir Iran, negara ini mulai mengupayakan terobosan untuk memasuki bidang siklus produksi bahan bakar nuklir dan berbagai aspeknya. Pada tanggal 11 Februari 2003, Iran mendeklarasikan kemampuannya memperkaya uranium.

Teknologi nuklir berhasil diraih Iran berkat teguhnya kepercayaan para pejabat dan ilmuwan nuklir negara ini kepada potensi, kemampuan dan jerih payah mereka. Semua prestasi itu terus dipelihara dengan dukungan rakyat dan manajemen yang dilakukan para pejabat Iran. Keteguhan dan dukungan rakyat Iran diakui sebagai faktor utama terpeliharanya semua prestasi itu. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya dibidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Resistensi asing bukan tidak dihadapi Iran, resistensi itu dilakukan baik pada tahap pengupayaan dan pencapaian teknologi nuklir maupun pada tahap pengembangannya. Namun demikian Iran tetap menjalankan program pengembangan nuklirnya. Dalam pandangan Iran, sesuai pasal keempat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Lebih dari itu, negara-negara yang memiliki teknologi nuklir bahkan berkewajiban membantu negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Selain dari pada itu Iran juga membayar iuran tahunan keanggotaan kepada IAEA dan oleh karenanya negeri mullah itu berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir sipil.

Di luar konteks ketentuan internasional, terdapat konteks lain yang juga menuntut pemerintah Iran untuk memprioritaskan kepentingan nasional, yaitu konteks kedaulatan nasional dan interdependensi negara. Karena tak ada satu negara pun patut menyerahkan masalah keamanan dan kepentingan nasionalnya kepada pihak asing. Dalam konteks ini pula, masalah pendayagunaan teknologi nuklir menjadi sangat krusial bagi Iran ketika negara ini harus memenuhi kebutuhannya kepada perkembangan di pelbagai bidang ekonomi, sosial, dan iptek.

Dalam pandangan Iran, pada masa mendatang teknologi nuklir akan menggeser posisi bahan bakar fosil untuk memenuhi keperluan energi dunia. Kini pun, banyak negara yang sudah menyiapkan diri dengan menambah jumlah instalasi nuklirnya. Industri nuklir dinilai sangat krusial mengingat teknologi nuklir dapat menghemat dan mempercepat produksi industri serta untuk keperluan sains.

Sampai saat ini, Barat berupaya mencegah keberhasilan Iran di bidang nuklir. Dalam menindaklanjuti kasus nuklir Iran, pihak Barat sama sekali tidak menggunakan parameter dalam NPT maupun IAEA, melainkan menggunakan cara-cara kekerasan dan arogansi. Bahkan, Barat tak segan-segan bertindak di luar aturan internasional. Secara keseluruhan, pihak Barat menerapkan standar ganda dalam kasus kepemilikan nuklir Iran. Sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, Barat mendukung pembangunan instalasi nuklir di Iran. Namun, pasca kemenangan Revolusi Islam Iran, pihak Barat justru menentang pembangunan instalasi tersebut. Meski aktivitas nuklir Iran diawasi oleh IAEA dan tidak menyeleweng dari NPT, pihak Barat selalu menunjukkan *interferensi* terhadap program nuklir Iran, dan di saat yang sama pihak Barat menjalin kerjasama nuklir dengan negara-negara lain termasuk India dan Pakistan yang justru bukan anggota NPT. Bahkan dalam kasus nuklir Rezim Zionis, pihak Barat justru memberikan bantuan kepada Tel Aviv.

Pihak Barat juga tidak menunjukkan reaksinya atas aktivitas nuklir Rezim Zionis yang telah memproduksi 200 hulu ledak nuklir, atau aktivitas nuklir Korea Selatan yang diam-diam telah menghasilkan pengayaan plutonium hingga 90 persen. Sedangkan terhadap program nuklir Iran, sikap Barat cenderung arogan. Jangankan soal reaktor nuklir, terhadap pembangunan reaktor listrik air ringan di Iran bagian barat pun, pihak Barat masih juga menentang. Pihak Barat menolak melanjutkan pembangunan dua reaktor nuklir di Iran yang prosesnya sudah dimulai sejak sebelum kemenangan Revolusi dan sudah mencapai 60 persen. Tidak hanya itu, mereka juga mencegah negara-negara lain termasuk Rusia melanjutkan proyek tersebut.

Fenomena ini sesungguhnya menunjukkan kentalnya rasisme dalam politik Barat. Di saat 50 ton uranium milik Iran disita dan disimpan di gudang-gudang di Jerman, serta 10 persen saham milik Iran di perusahaan pengayaan uranium Perancis dibekukan, Inggris dan Perancis malah memberikan bantuan teknologi nuklir secara ilegal kepada Rezim Zionis.

Dalam dua dekade terakhir, Republik Islam Iran telah menunjukkan itikad baiknya guna meyakinkan masyarakat internasional soal status damai program nuklir Teheran. Dua tahun lalu, Iran berunding dengan Eropa dan salah satu

pointnya adalah masalah nuklir. Dalam perundingan yang berlangsung selama sembilan hari itu, kedua pihak membahas program nuklir Iran dari berbagai segi termasuk masalah transparansi. Pada saat yang sama, IAEA juga mengawasi seluruh instalasi nuklir Iran.

Sepuluh tahun lalu Iran menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Di samping itu, Iran juga menandatangani berbagai perjanjian nuklir termasuk Konvensi Larangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT), Konvensi Larangan Perluasan Senjata Biologi (CWC), dan lain-lain. Melalui perjanjian tersebut, Republik Islam Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai. Meski demikian, sejak akhir tahun 2001 Barat meningkatkan agitasi dan tekanannya terhadap program nuklir Iran dengan dalih bahwa Iran akan menyalahgunakan untuk memproduksi senjata destruksi massal. Guna mengubah persepsi negatif masyarakat internasional soal program nuklir Iran, serta menunjukkan bahwa program nuklir Iran berjalan sesuai ketentuan IAEA, Republik Islam Iran menggalang kebijakan transparansi.

Dalam rangka transparansi dan menggalang kepercayaan internasional, Iran mulai menjalin kerjasama penuh dengan IAEA, dengan melakukan berbagai langkah. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut :

1. Secara sukarela menandatangani Protokol tambahan. Hal ini dilakukan Iran di saat banyak negara anggota IAEA yang belum menandatanganinya. Bahkan AS tidak bersedia menandatangani dan mengesahkannya.
2. Menjalinkan kerjasama yang lebih dari ketentuan dan aturan IAEA.
3. Membuka pintu bagi dilakukannya inspeksi oleh IAEA lebih dari 1600 orang/hari. Artinya, setiap harinya rata-rata tiga inspektur IAEA melakukan pengawasan terhadap instalasi nuklir Iran.
4. Memberikan laporan setebal 1030 halaman mengenai seluruh aktivitas dan program nuklir yang dijalankan oleh Iran. Padahal selain itu sudah ada laporan secara berkala dan di setiap moment baik melalui lisan maupun dalam pertemuan-pertemuan resmi.
5. Memberikan kesempatan untuk melakukan interview dengan para ahli nuklir dan para petugas pusat-pusat instalasi nuklir.

6. Mengizinkan tim inspeksi IAEA untuk memeriksa sejumlah pusat-pusat komando militer di Iran.
7. Secara berkala menanggukkan seluruh aktivitas nuklir, termasuk aktivitas pembuatan perlengkapan, riset, instalasi Natanz, pabrik konservasi uranium Isfahan. Kesemuanya dilakukan dalam rangka meyakinkan status damai aktifitas nuklir Iran

Semua langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam program nuklir yang dijalankan oleh Republik Islam Iran, dan fakta ini juga dikukuhkan oleh laporan-laporan yang dibuat oleh Dirjen IAEA. Meski Iran telah melakukan langkah-langkah tersebut, akan tetapi AS dan Eropa tetap tidak bisa diyakinkan dan bahkan terus menuntut Iran untuk menghentikan aktivitas pemutaran bahan bakar nuklir. Negara-negara tersebut juga tetap melanjutkan kebijakan permusnahannya terhadap nuklir Iran. Dalam kaca mata Barat terutama AS, jika Iran berhasil mengukuhkan teknologi nuklir dan berhasil melampaui seluruh tahapan pengembangannya, kekuatan nasional Iran di satu sisi dan pengaruhnya di tingkat regional dan global akan mengalami perubahan yang sangat besar. Alasan penentangan Barat terhadap aktivitas nuklir Iran, diyakini bukan hanya terbatas pada poin di atas. Meski demikian dengan berbagai alasan, pihak Barat terutama AS akan mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk memaksa Iran menghentikan aktivitas nuklirnya.

Tentunya harus diingat bahwa AS dan Barat telah mengembargo Iran dengan berbagai macam embargo teknologi termasuk produk-produk yang memiliki fungsi ganda, juga embargo keuangan, investasi layanan jasa dan sebagainya. Langkah penyempurna bagi AS adalah mengucilkan Iran dari dunia Internasional. Di antara sederet langkah yang dilakukan oleh AS adalah dengan memanipulasi ketentuan hukum yaitu dengan memanfaatkan isu protokol tambahan dan memaksa Iran segera menandatangani serta mengesahkannya, menyusun undang-undang mengenai terorisme nuklir dan menisbatkannya ke negara-negara semisal Iran, menekan IAEA untuk menghentikan kerjasama teknisnya dengan Iran, dan berbagai langkah lainnya. Akan tetapi semua langkah AS tersebut tidak berhasil melucuti Iran dari teknologi nuklir.

Sejak Iran mengumumkan keberhasilannya menguasai teknologi nuklir, kebijakan Barat dalam mencegah dan mengukung proyek nuklir Iran memasuki tahap baru. Untuk ini, Barat telah mempersiapkan tiga tahap, yaitu, penanggulangan, penghentian dan pemusnahan. Dalam melaksanakan rencana ini AS masuk medan dengan memerankan polisi jahat sementara Eropa masuk dengan perannya sebagai pihak yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Dengan cara ini Barat membuka front melawan proyek nuklir Iran. AS menyajikan pelimpahan isu nuklir Iran ke meja Dewan Keamanan PBB sebagai langkah akhir, sementara Eropa memilih cara untuk bermain secara tahap demi tahap.

Antara Februari dan Maret tahun 2005, Barat menyangka bahwa mereka telah berhasil mewujudkan target dalam permainan ini. Karenanya, mereka lantas secara terbuka mengumumkan bahwa Iran hanya dapat meyakinkan dunia akan itikad baiknya jika negara ini menurunkan niatnya untuk memproduksi bahan bakar nuklir sendiri. Untuk itu pada bulan Juni 2005, Eropa secara tertulis menuntut Iran untuk menghentikan aktivitas nuklirnya.

Setelah niat Eropa yang sebenarnya terlihat jelas, Iran sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin diperoleh berbagai kesepakatan-kesepakatan melalui meja perundingan. Menyusul terjadinya perubahan politik di Iran pasca pemilu, Teheran melakukan perubahan yang signifikan pula dalam kebijakannya menyangkut program nuklir. Dalam pandangan pemerintahan Iran yang baru, mempertahankan penanggulangan seluruh aktivitas nuklir, berarti sama dengan kegagalan Iran memperoleh teknologi nuklir yang sudah menjadi hak negara ini.

Dalam kondisi seperti inilah, Republik Islam Iran mengubah pola permainan dengan pertama-tama membuka segel intalasi UCF di Isfahan. Langkah berikutnya adalah memulai kembali riset nuklir dan langkah ketiga membatalkan pelaksanaan isu protokol tambahan yang sebelumnya dilakukan secara sukarela. Sejurus kemudian Presiden Ahmadinejad mengeluarkan instruksi untuk memulai kembali seluruh aktivitas yang berkenaan dengan program nuklir. Negara-negara Eropa menghentikan perundingannya dengan Teheran dan mengadakan sidang darurat Dewan Gubernur lalu mengeluarkan resolusi bernada keras terhadap Iran. Namun kekokohan bangsa Iran di hadapan tekanan Barat akhirnya membuat Barat mengurangi tuntutananya terhadap Iran. Melihat

kekokohan Republik Islam Iran dan ketidakpedulian Iran terhadap langkah Barat menyerahkan dokumen nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB membuat Barat terpaksa mengambil langkah mundur, yaitu mengakui hak Iran dalam membangun instalasi untuk memperkaya uranium (UCF) di Isfahan dan memproduksi uranium hexafluoride. Namun, mereka menetapkan syarat agar proses itu dilakukan di luar wilayah Iran.

Syarat itu diikuti oleh proposal Iran yang berisi tawaran agar Iran melakukan pengayaan uraniumnya di Rusia. Sejak saat itu, tekanan Barat ditujukan untuk menekan Iran agar menerima tawaran Rusia. Namun sejak awal Iran telah menegaskan bahwa pengayaan uranium adalah bagian dari kepentingan bangsa dan karenanya Iran menentang menjadi pelengkap dalam proses pengayaan uranium yang dilakukan di Iran. Menghadapi ketegasan sikap Iran ini, akhirnya Barat mengadakan sidang darurat IAEA dan mengeluarkan resolusi yang melaporkan masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Tidak diragukan lagi, melalui cara apapun, baik melalui Dewan Keamanan PBB atau cara-cara lain, Barat tidak berhasil menekan Iran agar menghentikan proyek nuklirnya. Para pengamat dan analis Barat banyak yang menilai bahwa serangan militer, embargo ekonomi, atau penyerahan dokumen nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Mereka bahkan berpendapat bahwa Republik Islam Iran yang didukung oleh kekuatan militer yang tangguh, dukungan rakyat, sumber daya alam, dan posisi strategis di Timur Tengah, telah menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan bisa ditaklukkan dengan serangan militer.

Selain itu, pengamat dan analis politik juga memperingatkan pemerintah negara-negara Barat bahwa langkah-langkah anti Iran, seperti embargo ekonomi atau serangan militer, akan menimbulkan dampak yang sangat dahsyat di dunia. Mereka menyimpulkan bahwa bagi bangsa Iran, masalah nuklir telah menjadi sebuah masalah yang berkaitan dengan harga diri bangsa dan bangsa Iran tidak akan mundur satu langkahpun dari tekadnya untuk menguasai teknologi nuklir. Itulah sebabnya para analis politik itu menyimpulkan bahwa serangan militer terhadap Iran hanya akan membuat masalah lebih rumit.

Untuk itu, langkah yang diambil Barat kini hanyalah sebatas perang psikologis. Mereka tak henti-hentinya melakukan propaganda negatif mendiskreditkan Iran dan melemparkan ancaman-ancaman kosong soal perang. Strategi baru yang dilakukan Barat, terutama AS untuk 'menggulung proyek nuklir Iran' memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menciptakan opini di tengah bangsa Iran mengenai dampak buruk bila pemerintah Iran terus bertahan di hadapan tekanan Barat dan opini bahwa penguasaan atas teknologi nuklir sama sekali tidak ada faedahnya. Kedua, menciptakan jurang antara pemerintah dan rakyat. Ketiga, memperlemah pemerintahan Iran. Oleh karena itu, mempertahankan keberhasilan dalam penguasaan teknologi nuklir yang selama ini telah dicapai dengan dukungan rakyat, kini merupakan masalah yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah Iran. Pemerintah Iran terus berusaha mengingatkan masyarakatnya bahwa hak bukanlah sesuatu yang diberikan pihak lain, melainkan sesuatu yang harus diambil atau diperjuangkan. Dalam kerangka inilah, bangsa Iran terus berjuang dan bertahan melawan berbagai tantangan untuk meraih haknya di bidang nuklir.

Program pengayaan bahan bakar nuklir, sekali lagi merupakan isu utama yang melatarbelakangi isu nuklir Iran saat ini, kemudian dikhawatirkan akan digunakan untuk produksi senjata berhulu ledak nuklir. Pengayaan uranium dibagi menjadi dua pengertian, pertama adalah *Low Enriched Uranium* (LEU), dimana kadar persentase pengayaan uraniumnya lebih kecil dari 20 persen. Kedua adalah *Highly Enriched Uranium* (HEU), dengan persentase pengayaannya lebih besar dari 20 persen. Meskipun pengayaan uranium untuk produksi senjata diperlukan grade lebih dari 90 persen, akan tetapi karena adanya potensi menggunakan lebih kecil grade-nya, bisa digunakan untuk hulu ledak. Itulah sebabnya reaktor nuklir dibatasi hanya di bawah 20 persen pengayaan.

Proses pengayaan uranium ini sebenarnya sudah dimiliki oleh beberapa negara yang mempunyai pembangkit nuklir, seperti Belanda, Jerman, Inggris, Rusia dan Jepang. Secara prinsip teknologi ini bisa juga digunakan untuk mengembangkan persenjataan nuklir dengan menggunakan metode gas centrifugal. Ketika perspektif nuklir telah bergeser ke arah penggunaan teknologi persenjataan, maka masalah kepemilikan nuklir erat kaitannya dengan politik

internasional. Dalam politik internasional upaya menjaga kedaulatan nasional adalah inti sari kepentingan nasional yang senantiasa dihadapkan secara interaksional dengan kepentingan nasional negara lain. Dalam keadaan yang demikian, motivasi kepemilikan nuklir tidak lagi dapat disandarkan pada tujuan-tujuan sipil atau tujuan damai. Dinamika lingkungan politik internasional yang cenderung mengalami perubahan telah menjadikan banyak negara menyangandarkan kekuatan nasionalnya pada kemampuan senjata nuklir. Atas dasar ini kepemilikan senjata nuklir merupakan pilihan satu-satunya yang diyakini dapat melangsungkan kehidupan negara. Realisme politik sangat kental dalam konteks kepemilikan senjata nuklir.

Iran adalah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mempunyai masalah krusial di tengah lingkaran konsentris politik luar negerinya. Instabilitas keamanan dan ketidakpastian politik keamanan di Timur Tengah serta tekanan yang secara terus menerus dihadapinya dari AS membuat Iran menetapkan sandaran kebijakannya pada pengembangan senjata bertenaga nuklir. Dari sisi pemerintah Iran, motivasi dan ambisi kepemilikan program nuklir di dorong dua aspek penting. Pertama, kepemilikan program nuklir dapat digunakan sebagai faktor *deterrent* (penangkalan) dan *balancer* (penyeimbang) realitas hubungan internasional kontemporer. Kepemilikan teknologi nuklir bukan semata-mata hanya ditujukan untuk kebutuhan energi domestik semata, tetapi merupakan alat penting politik luar negeri dalam interaksinya di sistem internasional. Selain itu faktor *deterrent* ini juga menjadi alat utama kebijakan pertahanannya yang tertuang sebagai doktrin pertahanan dalam melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Sementara itu, aspek kedua yakni peningkatan prestis internasional, mobilitas sosial dan *bargaining power* lebih ditujukan pada tingkat regional dimana Iran dikelilingi negara-negara yang juga memiliki teknologi persenjataan nuklir, seperti Irak dan Israel. Iran tidak memiliki pilihan lain selain berupaya untuk memiliki program nuklir, terutama di saat interaksi antar negara di Timur Tengah sangat diwarnai oleh *struggle for power* yang sangat menekankan aspek politik-militer.

4.5. Karakteristik Politik Luar Negeri Iran terhadap AS

Kondisi yang saling bertentangan (*vis a vis*) yang terjadi antara Iran dengan AS sebagaimana dapat dilihat pada masa pemerintahan Ahmadinejad, bukanlah sebuah situasi baru dalam hubungan kedua negara. Setidaknya kondisi tersebut telah muncul sejak tumbanginya rejim Shah dukungan AS di Iran pada tahun 1970an. Pengambilalihan pemerintahan dari Shah melalui revolusi oleh Imam Khomeini, merupakan titik awal terjadinya situasi kontradiksi tersebut. Keadaan pada masa awal revolusi yang jelas-jelas menciptakan hubungan yang saling berseberangan antara Iran dengan AS dengan yang dialami Iran saat ini dibawah kepemimpinan Ahmadinejad dapat dikategorikan sebagai lanjutan dari kisah revolusi tersebut. Pada masa awal revolusi yang dikomandoi oleh Imam Khomeini, Iran menolak keras intervensi AS dalam dimensi kehidupan sosial, ekonomi dan politik secara sistemik. Sedangkan pada masa kepemimpinan Ahmadinejad, Iran menolak keras hegemoni dan kontrol politik AS terhadap Iran sekaligus unilateralisme yang dijalankan AS atas sistem internasional. Termasuk di dalamnya adalah ketika Iran berusaha menyinggung status Israel dan memperjuangkan Palestina serta ketika Iran mengembangkan energi nuklirnya. Dari titik inilah bermula meruncingnya perseteruan antara AS dengan Iran.

Pada statemen publik pertamanya di acara Radio Republik Islam Iran sejak terpilih sebagai presiden, Ahmadinejad menyatakan ingin menciptakan Iran sebagai model pemerintahan yang modern, maju dan islami. Model pemerintahan seperti ini menurutnya tidak bisa tidak harus berpijak pada manajemen kerja yang kuat, profesional, bebas korupsi dan favoritisme politik. Baginya pemerintahan Islam ideal itu bukan sekedar konsep dan jargon, tetapi sebuah kerja keras tanpa kenal lelah, dan kerja keras dan tanpa kenal lelah itu tidak bisa ditawar-tawar, bahkan dengan imbalan sesuatu sesakral demokrasi. Masih menurut Ahmadinejad, "kita melakukan revolusi bukan dalam rangka memiliki demokrasi," katanya suatu ketika, mengacu pada sebagian kelompok yang bersembunyi di balik demokrasi untuk menampung para koruptor dan menjaga konglomerat (*Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007: 154*).

Basis pendekatan revolusi yang digunakan oleh Ahmadinejad dalam mengelola pemerintahan ternyata tidak hanya ditujukan untuk pengelolaan dalam

negeri, melainkan juga terhadap ranah internasional. Tampuk kekuasaan yang berhasil ia raih ternyata sekaligus juga telah merubah wajah dan tampilan politik luar negeri Iran. Tidak lama setelah Ahmadinejad menduduki kursi kepresidenan di Iran, ia dengan tegas menyerukan slogan anti Israel dan menunjukkan sikap perlawanan atas segala bentuk hegemoni Barat. Kemudian ia juga menegaskan kepada dunia bahwa Iran adalah negara berdaulat yang berhak mengembangkan teknologi nuklir sebagaimana negara-negara lain yang terlebih dahulu sudah mempunyai teknologi nuklir tersebut. Tampilan politik luar negeri Iran yang sedemikian rupa inilah yang sebenarnya telah membawa Iran kepada sebuah kondisi yang saling berhadap-hadapan dengan arus besar politik internasional yang berkembang saat itu, dalam mana AS mengambil peran utama di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, AS dan sekutu Baratnya sangat menentang keras sikap politik luar negeri Iran yang dikomandoi oleh presiden Ahmadinejad karena dianggap dapat menjadi ancaman serius bagi status quo politik dunia.

Sepanjang pemerintahan Ahmadinejad, khususnya antara tahun 2005 hingga 2009 karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS dapat dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, sangat jelas terlihat bahwa Iran ternyata lebih menampilkan politik luar negeri yang revolusioner. Politik luar negeri yang revolusioner adalah serangkaian strategi, sikap dan tindakan sebuah negara yang ditujukan kepada negara lain (dalam hal ini AS) melalui cara-cara non-konvensional demi menampakkan dan menjaga eksistensi serta mewujudkan kelangsungan hidup nasionalnya. Ciri khas dari karakter politik luar negeri Iran yang revolusioner ini ialah berani mengambil langkah-langkah maju dan beresiko tinggi serta melawan arus besar. Indikatornya adalah ketika Ahmadinejad seringkali menentang keras agenda *setting* yang dibangun oleh AS dan sekutu Baratnya. Contohnya dapat dilihat dari kasus pengembangan energi nuklir Iran, pandangannya terhadap keharusan bagi kemerdekaan Palestina, peninjauan kembali sejarah holocaust dan penghapusan Israel dari peta dunia. Lihat misalnya sikap dan pandangan Ahmadinejad sebagai Presiden ketika ia diwawancarai harian Jerman *Der Spiegel*, dengan tegas Ahmadinejad meragukan terjadinya holocaust dan mempertanyakan dengan jelas jika hal itu benar-benar terjadi, mengapa rakyat Palestina yang harus menerima deritanya, mengapa Eropa tidak

menyediakan tanahnya untuk zionis Israel. (*Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 241-242*).

Kedua, adalah karakter politik luar negeri yang reaksioner. Politik luar negeri yang reaksioner adalah serangkaian strategi, sikap dan tindakan sebuah negara yang muncul secara spontan dalam bentuk umpan balik atas dasar sensitifitas demi mempertahankan kehormatan, mempertahankan prinsip, serta memelihara dan menjaga nama baik negara dalam ranah internasional. Cara-cara yang dilakukan dalam menampilkan karakter yang reaktif tersebut cenderung memilih langkah-langkah yang non-konvensional juga, dalam arti di luar kebiasaan pergaulan internasional. Egosentrisme lebih banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ketika karakter politik luar negeri yang reaksioner ini dimunculkan. Contoh kasus dalam konteks Iran ini adalah ketika terjadi perjumpaan diplomatik yang sama sekali tidak diplomatik pada bulan September 2005 di lantai 38 markas besar PBB. Lima orang bersama asisten dan penerjemah sedang mengadakan rapat yang menegangkan. Salah satu dari mereka adalah Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran yang baru beberapa bulan terpilih. Berbicara dengan nada lembut, tapi tegas, Ahmadinejad sama sekali tidak berusaha menyembunyikan maksudnya kepada beberapa lawan bicaranya. "Jangan berani-berani mengancam kami dengan segala rupa sanksi, atau kalian akan menyesalinya" tukasnya setelah para Menlu Inggris (Jack Straw), Prancis (Philippe Douste-Blazy) dan Jerman (Joshka Fischer) membeberkan kemungkinan dijatuhkannya sanksi PBB atas Iran, "kalian jangan hanya mengikuti kemauan AS", ucap Ahmadinejad. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi" kata salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, "semua aturan yang kita pakai selama ini, ia terabas, dia tidak berbicara dengan bahasa kita. Seolah-olah ia baru keluar dari hutan belantara dengan tubuh penuh debu". (*Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007: 184*). Apa yang terjadi pada situasi tersebut, sesungguhnya menunjukkan bahwa Ahmadinejad adalah seorang yang sangat reaksioner. Kenyataan yang senada dengan hal tersebut di atas banyak dijumpai ketika Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad menjalankan politik luar negerinya.

Ketiga, adalah rasionalis. Karakter politik luar negeri yang rasionalis adalah perjuangan diplomatik untuk meyakinkan sejumlah pihak dalam ranah internasional atas dasar logika dan pengetahuan yang dapat diterima akal sehat. Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad selalu menjalankan metode yang demikian ini dalam politik luar negerinya ketika berhadapan dengan pihak lain. Contoh nyata adalah pembelaannya pada setiap kesempatan dengan menyebutkan "bila nuklir itu berbahaya, mengapa ada pihak yang dibiarkan menggunakannya ? Bila nuklir itu berguna mengapa ada pihak yang tidak diperbolehkan menggunakannya ? (Labib, Muharram, Kazhim, Hamzah; 2007; 185). Ungkapan yang demikian ini seringkali terucap dari Ahmadinejad dalam berbagai kesempatan, baik saat pertemuan-pertemuan resmi internasional maupun tidak resmi. Tampilan politik luar negeri yang demikian ini tergolong dalam karakter rasionalis.

BAB V

KESIMPULAN

Sepanjang kepemimpinan Ahmadinejad, hubungan AS dan Iran selalu diwarnai oleh hubungan yang sangat tidak harmonis. Masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Hal itu dapat dilihat dari karakter politik luar negeri yang dikomandoinya sendiri. Menentang AS adalah ciri khas politik luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadinejad. Dalam kerangka berpikir revolusionernya, negara seperti AS tidak perlu dijadikan sahabat bagi rakyat Iran. Karena bagi Ahmadinejad, negara adidaya tersebut mustahil dapat memberikan kontribusi positif atau kemajuan bagi rakyat Iran. Termasuk bagi masa depan bangsa Iran sendiri. Dalam hal ini, konfrontatifisme lebih mengemuka dibandingkan dengan korporatisme. Itulah ciri khas politik luar negeri Iran terhadap AS pada masa pemerintahan Ahmadinejad.

Ada sejumlah alasan yang membuat Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad lebih memilih konfrontasi terhadap AS ketika menjalankan politik luar negerinya. *Pertama*, karena Iran masih menempatkan AS sebagai negara yang cenderung menghambat kepentingan nasional, kemajuan dan progresifitas Iran dalam berbagai segmen bernegara. *Kedua*, karena dalam pandangan Iran, sikap, perilaku dan tindakan AS dalam domain internasional tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Iran. Hal utama yang dianggap tidak sejalan itu adalah karena praktek hegemoni, ketidakadilan dan dominasi power yang dijalankan AS selama ini lebih mengemuka dibandingkan dengan praktek yang bersahabat. Dalam pandangan Iran, AS sama sekali tidak menginginkan kemandirian dan kemajuan Iran. *Ketiga*, karena Iran merasa negaranya memiliki modal untuk paling tidak bisa menyamai dan mengimbangi pengaruh AS, terutama pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, baik secara ekonomi maupun politik. Kemajuan dalam hal penguatan militer Iran serta posisi strategisnya di kawasan Timur Tengah, ditambah dengan kekayaan sumberdaya mineralnya (minyak) dapat dikategorikan sebagai modal power untuk mengambil opsi konfrontasi tadi. *Keempat*, Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad mempunyai dukungan politik, baik secara nasional maupun regional, sehingga opsi konfrontatif dengan

AS menjadi lebih beralasan. Kemenangan mutlak yang diperoleh Ahmadinejad pada pemilu presiden 2005 merupakan modal besar, kemudian dukungan regional yang diperolehnya juga cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan isu Israel dan Palestina. Iran selalu mendapat dukungan dari negara-negara Islam di kawasan tersebut tatkala dihadapkan dengan isu Israel dan kemerdekaan Palestina. *Kelima* atau yang terakhir adalah karena Iran sangat percaya diri dengan disokong oleh segenap kekuatan nasional yang dimilikinya. Kemudian disokong juga oleh pengalaman selama masa isolasi internasional yang diberlakukan AS terhadap Iran. Iran telah membuktikan dirinya mampu bertahan dalam masa isolasi internasional yang dimotori oleh AS sehingga pilihan konfrontatif dianggapnya menjadi pilihan yang tidak menimbulkan resiko besar.

Konfrontasi dalam politik luar negeri Iran terhadap AS pada era kepemimpinan Ahmadinejad, ternyata bukanlah sekedar basa-basi. Meskipun sesungguhnya pernah terjadi upaya-upaya perbaikan hubungan diantara keduanya. Hal ini terbukti ketika terdapat upaya-upaya konstruktif yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mendamaikan hubungan kedua negara. Momentum itu bisa dilihat pada awal tahun 2009, ketika Barack Obama menjadi presiden AS. Namun demikian, titik terang kearah perbaikan hubungan tetap saja belum bisa diwujudkan.

Kemudian terkait dengan karakter politik luar negeri. Sepanjang pemerintahan Ahmadinejad, khususnya antara tahun 2005 hingga 2009 karakteristik politik luar negeri Iran terhadap AS dapat dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, sangat jelas terlihat bahwa Iran ternyata lebih menampilkan politik luar negeri yang revolusioner. Politik luar negeri yang revolusioner adalah serangkaian strategi, sikap dan tindakan sebuah negara yang ditujukan kepada negara lain (dalam hal ini AS) melalui cara-cara non-konvensional demi menampakkan dan menjaga eksistensi dan mewujudkan kelangsungan hidup nasionalnya. Ciri khas dari karakter politik luar negeri Iran yang revolusioner ini ialah berani mengambil langkah-langkah maju dan beresiko tinggi serta melawan arus besar. Indikatornya adalah ketika Ahmadinejad seringkali menentang keras agenda setting yang dibangun oleh AS dan sekutu Baratnya. Contohnya dapat dilihat dari kasus pengembangan energi nuklir Iran, pandangannya terhadap keharusan bagi

kemerdekaan Palestina, peninjauan kembali sejarah holocaust dan penghapusan Israel dari peta dunia. *Kedua*, adalah karakter politik luar negeri yang reaksioner. Politik luar negeri yang reaksioner adalah serangkaian strategi, sikap dan tindakan sebuah negara yang muncul secara spontan dalam bentuk umpan balik atas dasar sensitifitas demi mempertahankan kehormatan, mempertahankan prinsip, serta memelihara dan menjaga nama baik negara dalam ranah internasional. Cara-cara yang dilakukan dalam menampilkan karakter yang reaktif tersebut cenderung memilih langkah-langkah yang non-konvensional juga, dalam arti di luar kebiasaan pergaulan internasional. Egosentrisme lebih banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ketika karakter politik luar negeri yang reaksioner ini dimunculkan. *Ketiga*, adalah rasionalis. Karakter politik luar negeri yang rasionalis adalah perjuangan diplomatik untuk meyakinkan sejumlah pihak dalam ranah internasional atas dasar logika dan pengetahuan yang dapat diterima akal sehat. Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad selalu menjalankan metode yang demikian ini dalam politik luar negerinya ketika berhadapan dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Caff, Muhammad (2008), *Perang Nuklir; Militer Iran*, Zahra Publishing House; Jakarta.

Adi, Robert Tjahyono, (2007), *Mengenal 192 Negara di Dunia*, Jakarta, Pustaka Widyatama.

Ahmadinejad, Mahmud, (2008), *Ahmadinejad Menggugat; Republik Islam Iran Mematahkan Arogansi Amerika dan Israel*, Terj; Purkon, Amin, Habibie dkk, Jakarta; Zahra Publishing House.

Ahmadinejad, Mahmud, (2008), *Manifestasi Identitas Iran di New York*, International Union of Muslim University Students-Iran

Ansari, Ali M., (2008), *Supremasi Iran; Poros Setan atau Super Power Baru*, Terj; Syamsul Wardi, Jakarta; Zahra Publishing House.

Azis S.R., Abdul (2003), "Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus" dalam Burhan Bungin (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajagrafindo Persada; Jakarta.

Brown, Chris, (2001), *Understanding International Relation*, Palgrave: London.

Bandoro, Bantarto, "Kepentingan Nasional dan Diplomasi Internasional Indonesia", dalam http://www.iodasindonesia.com/vol_08september_2008bb-1.html, diakses 30 Desember 2008, pukul 16.00 WIB.

Clinton, W. David, (1991), "The National Interest; Normative Foundation" dalam Richard Little and Michael Smith (eds), *Perspective on World Politics; A Reader*, Rotledge; London and New York.

Coplin, William D., (1992), *Pengantar Politik Internasional; Suatu telaah teoritis*, Alih bahasa; Mercedes Marbun, (Penerbit Sinar Baru; Bandung).

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, (1994), "Introduction; Entiring the Field of Qualitative Research", dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, London.

Draft mata kuliah THI yang diasuh oleh Bapak Soesiswo Soenarko. Program Pascasarjana Kajian Wilayah Islam dan Timur Tengah, Universitas Indonesia, 2008.

El-Gogary, Adel, (2007), *Ahmadinejad; The Nuclear Savior of Tehran; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis*, Terj; Tim Kuwais, Jakarta; Pustaka Iman.

Hanrieder, W, "Compatibility and Consensus; a Proposal for the Conceptual Linkage of External and Internal Dimension of Foreign Policy", *American Political Science*, Vol. 61, (December, 1967).

- Hill, Christopher, (2003), *The Changing Politics of Foreign Policy*, Palgrave; London.
- Kazhim, Musa dan Alfian Hamzah, (2007), *Iran; Skenario Penghabisan*, Jakarta; Cahaya Insan Suci.
- Kenan, George F., (1951) dalam <http://www.siki.dkp.go.id/ANALISAIMPLIKASI>, diakses 30 Desember 2008, pukul 16.00 WIB
- Labib, Muhsin, Ibrahim Muharram, Musa Kazhim dan Alfian Hamzah (2007), *Ahmadinejad; David ditengah Ankara Goliath Dunia*, Hikmah Populer; Jakarta.
- Mas'ood, Mohtar, (1994), *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES; Jakarta.
- Millar, TB, (1969), "On Writing About Foreign Policy" dalam James N. Rosenau (ed), *International Politics and Foreign Policy; a Reader in Research and Theory*, The Free Press; New York.
- Nasr, Vali, (2007), *Kebangkitan Syiah*, Jakarta ; Diwan.
- Quirk, Robert E., et.al, (2007), *Poros Setan*, terj; Abdul Qodir Shaleh, Yogyakarta; Prismasophie.
- Rosenau, James N., (1981), *The Study of Political Adaptation; Essays on the Analysis of World Politics*, Frances Pinter Publishers Ltd; London.
- Sihbudi, Riza, (1995), *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Jakarta ; Pustaka Jaya.
- Simanjuntak, D. Dhany H., (2007), *Ahmadinejad Menentang Amerika; Dari Nuklir Iran, Zionisme hingga Penyangkalan Holocaust*, Narasi; Yogyakarta.
- Wuryandari, Ganewati, (ed), (2008), *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta dan P2P LIPI Jakarta.
- Yin, Robert K., (1996), *Studi Kasus; Desain dan Metode*, Rajawali Press; Jakarta.
- Zulkamain, (2005), "Adaptasi Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemerintahan Soeharto", dalam Azian Tamin (eds), *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, PSPI-PSP Madani Institute; Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana penjara paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

